BADAN POM

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

BALAI POM DI SURAKARTA

Jl. Letjen Suprapto No 5, Kerten,
Kec. Laweyan, Surakarta
Telp/ Fax (0271) 7788090
email : bpom_surakarta@pom.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Surakarta Tahun 2024 dapat selesai tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Tahun 2024 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan *(sustainable and continuing improvement)* dalam rangka peningkatan kinerja Balai POM di Surakarta pada tahun selanjutnya.

Surakarta, 25 Februari 2025

Kepala Balai POM di Surakarta,

Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 yang mengacu pada Renstra Balai POM di Surakarta tahun 2021-2024.

Nilai Kinerja Organisasi mengacu pada kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024 sebesar 108,96% kategori Istimewa dengan notifikasi . Dalam mengukur capaian kinerja, pendekatan balanced scorecard sudah menggunakan 3 perspektif, yaitu Stakeholder, Internal Process dan Learning & Growth. Perspektif terebut diturunkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 34 indikator kinerja utama.

Pernyataan keberhasilan pencapaian tiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 98,62% dengan kategori cukup, menunjukkan masih membutuhkan upaya untuk mencapai target Balai POM di Surakarta dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada tahun 2024
2. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 105,80% dengan kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Balai POM di Surakarta pada tahun 2024
3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 100,16% dengan kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada tahun 2024
4. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 120,00% dengan kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada tahun 2024
5. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 112,82% dengan kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada tahun 2024.
6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 120,00% dengan kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam Menguatnya

laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada tahun 2024

7. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh sebesar 114,07% dengan kategori Sangat Baik menunjukkan keberhasilan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan pada tahun 2024.
8. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 105,48% dengan kategori Sangat Baik menunjukkan keberhasilan Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2024
9. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan sebesar 101,84% dengan kategori Sangat Baik menunjukkan keberhasilan Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Surakarta yang optimalpada tahun 2024.
10. Indikator pada sasaran strategis kesepuluh yaitu terwujudnya SDM Balai POM di Surakarta yang berkinerja optimal, dikecualikan dalam perhitungan NPSS terdapat perubahan definisi operasional.
11. Capaian indikator pada sasaran strategis kesebelas sebesar 111,51% dengan kategori Sangat Baik menunjukkan keberhasilan Terkelolanya keuangan Balai POM di Surakarta secara akuntabel.

Realisasi capaian 34 IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. 21 (dua puluh satu) Indikator bernotifikasi biru dengan kriteria Sangat Baik (dengan capaian 100% ≤ x ≤ 120%) terdiri dari :
   a. Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 101,82%.
   b. Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 100,26%
   c. Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian sebesar 111,11%
   d. Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dengan capaian sebesar 114,07%
   e. Indikator Indeks Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 107,68%
   f. Indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 108,29%
   g. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan capaian sebesar 100,47%

h. Indikator Persentase Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan capaian sebesar 100,70%
i. Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan capaian sebesar 104,31%
j. Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan capaian sebesar 103,29%
k. Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan capaian sebesar 104,52%
l. Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan capaian sebesar 107,55%
m. Indikator Indeks Pelayanan Publik dengan capaian sebesar 109,30%
n. Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan capaian sebesar 106,38%
o. Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 110,36%
p. Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 100,63%
q. Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 112,82%
r. Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan dengan capaian sebesar 111,77%
s. Indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 100,80%
t. Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dengan capaian sebesar 118,75%
u. Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dengan capaian sebesar 106,51%

2. 6 (enam) Indikator bernotifikasi hijau dengan kriteria Baik (dengan capaian = 100%) terdiri dari :
   a. Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dengan capaian sebesar 100%
   b. Indikator Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 100%
   c. Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan capaian sebesar 100,00%
   d. Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian sebesar 100,00%
   e. Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian sebesar 100,00%

f. Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dengan capaian sebesar 100%

3. 5 (lima) Indikator bernotifikasi kuning dengan kriteria Cukup (dengan capaian 70% ≤ x < 100%) terdiri dari :
   a. Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian sebesar 91,67%
   b. Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 88,24%
   c. Indikator Indeks RB Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 99,19%
   d. Indikator Nilai AKIP UPT Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 94,57%
   e. Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 96,28%
4. 2 (dua) Indikator bernotifikasi abu-abu dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (dengan capaian X >100%) terdiri dari :
   a. Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan capaian sebesar 123,58%
   b. Indikator Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri dengan capaian sebesar 163,00%

Persentase capaian target indikator kinerja Balai POM di Surakarta pada Tahun 2024 antara 88,24% sampai dengan 163,00%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator "Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan" (CUKUP). Kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian indicator kinerja dengan melakukan bimtek kepada pelaku usaha khususnya pada pelaku usaha minyak goreng sawit. Namun masih Adanya kekurangpatuhan pelaku usaha terhadap peraturan baik dari kualitas/ mutu produk, menghasilkan hasil uji produk fortifikasi yang tidak memenuhi syarat.

Capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator "Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri" (TIDAK DAPAT DISIMPULKAN). Hal ini bisa disebabkan adanya target tahun 2024 yang rendah karena menggunakan baseline realisai tahun sebelumnya. Sedangkan Balai POM di Surakarta sudah melaksanakan dan mengimplementasikan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada tahun 2024 Balai POM di Surakarta melaksanakan 34 (tiga puluh empat) indikator kegiatan untuk mendukung pencapaian 11 (sebelas) sasaran strategis dengan hasil 9 sasaran strategis efisien dan 2 sasaran strategis tidak efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,04 sampai 0,22. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Balai POM di Surakarta belum mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Pada tahun 2024 Balai POM di Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 24 November 2023 sebesar Rp9.867.975.000,00. Dan mengalami perubahan di tgl 06 September 2024 menjadi sebesar Rp.10.839.975.000,00 dengan Realisasi anggaran tahun 2024 adalah Rp10.664.271.577,00 atau 98,38% tahun 2024 anggaran Balai POM di Surakarta dilakukan *Automatic Adjusment* sehingga pagu anggaran menjadi Rp10.664.271.577,00 sehingga persentase realisasi terhadap pagu *Automatic Adjusment* adalah 99,23%.

Surakarta, 25 Februari 2025

Kepala Balai POM di Surakarta,

Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

HIGHLIGHT

1.INISIATIF DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasPermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Pada Tahun 2024 Balai Besar POM di Surakarta telah melakukan pembangunan ZI dan mendapatkan penilaian pembangunan ZI oleh Inspektorat. Secara singkat dapat disampaikan upaya BPOM Surakarta dalam pemberantasan korupsi dan pelayanan bebas dari korupsi antara lain :

a.Balai POM di Surakarta telah menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.

b.Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM dan telah terlibat secara aktif dalam penyusunan penetapan dan pemantauan kinerja serta pencapaian kinerja secara berkala termasuk kualitas pelayanan public

c.Telah dilakukan internalisasi Budaya PIKKIR dan Reformasi Birokrasi secara berkala melalui progam kerja AOC yang berdampak pada hasil survei berakhlak pada kategori cukup yaitu 66,5% dan berada diatas rata-rata BPOM yaitu 57,7%.

d.Balai POM di Surakarta telah menyusun standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan yang telah dipublikasikan di subsite, media sosial dan ruang pelayanan.

e.Hasil Survei BPOM Surakarta untuk Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,98 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,84 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB. Dari nilai ini terus diupayakan peningkatan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dimana salah satu pelayanan terhadap pedampingan UMKM dalam mendapatkan izin edar melalui layanan media sosial Whatsapp khusus sertifikasi yang mudah di akses oleh masyarakat.

HIGHLIGHT

2. INOVASI DALAM MANAJEMEN KINERJA

a. JARIK

JARIK (Jum'at Asyik bincang Reformasi BiroKrasi) merupakan kegiatan yang akan dilakukan berupa pertemuan rutin seluruh pagawai Balai POM di Surakarta yang diadakan setiap hari Jum'at pada minggu ke-3 bulan berjalan. Dengan program JARIK ini diharapkan pemahaman Reformasi Birokrasi pegawai Balai POM di Surakarta dapat meningkat dan tercapainya internalisasi budaya Birokrasi BERAKHLAK.

b.TUMPENGAN

TUMPENGAN (Tukar Motivasi dan Penyemangat ASN) merupakan kegiatan tukar kado yang dijalankan dua bulan sekali dengan tukar kado seharga Rp.10.000 – Rp.15.000, pada kado wajib diberi tulisan penyemangat agar meningkatkan nilai harmonis pada aspek BerAKHLAK pegawai BPOM di Surakarta.

c.Last of Us

Last of Us (LApor Sipt Tertib OF coUrSe)

Program Last Of US dilakukan setiap minggunya dengan melakukan penarikan data pengawasan yang sudah dilaporkan dibandingkan dengan capaian sarana yang telah dilakukan pengawasan yang kemudian akan dilaporkan ke kepala Balai. diharapkan pegawai UPT dapat melaporkan SIPT secara tertib sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

d.MINA PADI

MINA PADI (diseMINAsi PelAtihan dan DIskusi) merupakan kegiatan diseminasi agar penyebarluasan informasi dapat terlaksana dengan baik. Pemerataan informasi dapat menunjang kinerja BPOM di Surakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan Kompetensi diantara pegawai, wadah sharing knowledge/ informasi/ diskusi dan sebagai ajang penyamaan persepsi atas suatu informasi.

HIGHLIGHT

2. INOVASI DALAM MANAJEMEN KINERJA

e.MANDAT
MANDAT (Manrisk Update tiap Triwulan) merupakan program yang dilakukan setiap triwulan dengan meminta setiap ketua tim setiap IKU di Balai POM Surakarta untuk melakukan identifikasi risiko. Hasil identifikasi risiko dari setiap fungsi akan dievaluasi oleh tim SPIP untuk selanjutnya dilaporkan unit pusat.
f.SI PETRUK
Si PETRUK (Si Pegawai TeRlalU sering fleKsi merupakan program yang dilaksanakan setiap bulan untuk memonitoring kehadiran/presensi pegawai Balai POM di Surakarta yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kedisiplinan pegawai
g.Layanan Si Merak
Layanan Si Merak (Layanan konsultasi di MPP, Cerak tur Kepenak), merupakan layanan konsultasi langsung (tatap muka) untuk mempermudah pelaku usaha atau Masyarakat umum dalam mendapatkan informasi baik layanan pengaduan, informasi umum tentang Obat dan Makanan, maupun konsultasi sertifikasi. Layanan MPP (Mal Pelayanan Publik) wilayah Balai POM di Surakarta terdapat di Mal Pelayanan Publik Jenderal Sudirman Kota Surakarta, Mal Pelayanan Publik Sevaka Bhakti Wijaya Kabupaten Sukoharjo dan Mal Pelayanan Publik Askara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen.
h.Layanan Sregep
Layanan Sregep (Layanan Whatsapp Respons Gesit dan Cepat) merupakan merupakan layanan online melalui aplikasi whatsapp dalam rangka mempercepat informasi masyarakat dengan respon yang gesit dan cepat. Nomor layanan wahatsapp yang dimiliki ada 2 yaitu 0851-5613-4032 (layanan informasi umum dan pengaduan) dan 0823-2773-2663 (layanan sertifikasi pelaku usaha dan pendampingan UMKM dalam rangka pendaftaran ijin edar).

HIGHLIGHT

3. PENGHARGAAN DARI EKSTERNAL BAIK LEMBAGA PEMERINTAH MAUPUN SWASTA

PIAGAM
PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

LOKA POM SURAKARTA (672839)

Sebagai Juara Ke-3 Satuan Kerja dengan Kategori Terbaik
Dalam Rangka Pengimplementasian Digipay Satu

Surakarta, 24 Juli 2023

Dikandatangani secara elektronik
HARTANA
KEPALA KPPN SURAKARTA

- Penghargaan sebagai Juara Ke-3 satuan kerja dengan Kategori Terbaik Dalam Rangka Pengimplementasian Digipay Satu

PIAGAM PENGHARGAAN

Arjuna Awards

diberikan kepada

BALAI POM DI SURAKARTA
(672839)

Sebagai Juara 1 Satker Dengan Implementasi KKP Terbaik Semester I
Tahun Anggaran 2024 Kategori Pagu Kecil

Surakarta, 25 Juli 2024

EKO BUDIYANTO
KEPALA KPPN SURAKARTA

- Penghargaan Arjuna Award sebagai Juara 1 Satker Dengan Implementasi KKP Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2024 Kategori Pagu Kecil

HIGHLIGHT

3. PENGHARGAAN DARI EKSTERNAL BAIK LEMBAGA PEMERINTAH MAUPUN SWASTA

- Penghargaan Arjuna Award (Apresiasi Kinerja Untuk Mitra KPPN Surakarta) sebagai Juara 2 Satker Dengan Implementasi KKP Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2024 Kategori UP Kecil

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

RINGKASAN EKSEKUTIF 2

HIGHLIGHT 7

DAFTAR ISI 12

BAB I 14

PENDAHULUAN 14

1.1. LATAR BELAKANG 14

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 14

1.3. STRUKTUR ORGANISASI 16

1.4. ISU STRATEGIS 17

BAB II 28

PERENCANAAN KINERJA 28

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA 28

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 29

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) 30

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 33

2.5. METODE PENGUKURAN 37

BAB III 38

AKUNTABILITAS KINERJA 38

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 38

3.2. EVALUASI AKHIR PERIODE RENSTRA (TAHUN KE-5) 195

3.3. EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS 208

3.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 213

3.5 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 225

3.6. REALISASI ANGGARAN 225

BAB IV 229

PENUTUP 229

4.1. KESIMPULAN 229

4.2. SARAN 231

LAMPIRAN I 232

1. PERJANJIAN KINERJA 232

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 237

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024 237

BALAI POM DI SURAKARTA 237

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA 238

LAMPIRAN II 242

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 242

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Balai POM di Surakarta secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Balai POM di Surakartake masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Surakartamerupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai POM di Surakartaberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Surakarta memiliki cakupan wilayah kerja di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen.

Balai POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Surakarta menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM yang berada di Jawa Tengah dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Semarang guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Surakartadisusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Surakarta terdiri atas seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

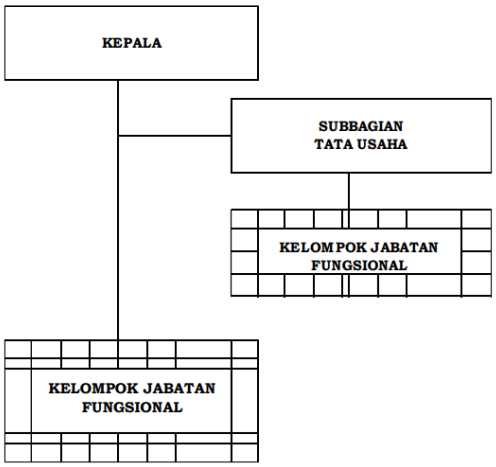

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Surakarta

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Surakarta perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Isu Internal

a. **Kelembagaan Balai POM di Surakartayang didukung oleh sistem manajemen yang adaktif dengan hubungan linsek yang kuat.**

Balai POM di Surakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018 sebagai Loka POM dan menjadi Balai POM pada Oktober 2023. Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Balai POM sesuai dengan amanah Peraturan Badan POM dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Balai POM (eselon 3). Dengan eselonisasi tersebut tidak menghalangi koordinasi dengan lintas sektor terkait di wilayah kerja dengan eselonisasi yang lebih tinggi. Beberapa Nota Kesepahaman telah terbentuk dengan lintas sektor di wilayah kerja, antara lain:

1) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta
2) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Surakarta bersama dengan Rencana Kerja dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta.
3) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
4) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangnyar.

Selain kerja sama dengan pemerintah daerah, Balai POM di Surakarta juga telah bekerja sama dengan organisasi, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat, yaitu dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di wilayah kerja, Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI), Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), dan Yayasan Gita Pertiwi. Adanya kerja sama yang telah terjalin menjadi modal dalam fungsi

pengawasan Obat dan Makanan ke depan yang lebih optimal dan sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan agar Badan POM mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

b. SDM muda yang kompeten dan mempunyai integritas dan komitmen yang kuat terhadap organisasi

Dalam kehidupan organisasi publik sumber daya manusia memegang peranan yang semakin penting, karena ia penentu utama dalam meningkatkan kinerja organisasi publik. Di samping itu, perannya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain termasuk teknologi yang canggih sekalipun (Syafri dan Alwi, 2014). Sumber daya manusia muda dan kompeten menjadi aset organisasi yang harus dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Komposisi sumber daya manusia Balai POM di Surakarta terdiri dari 30 pegawai, 8 laki-laki dan 22 perempuan.

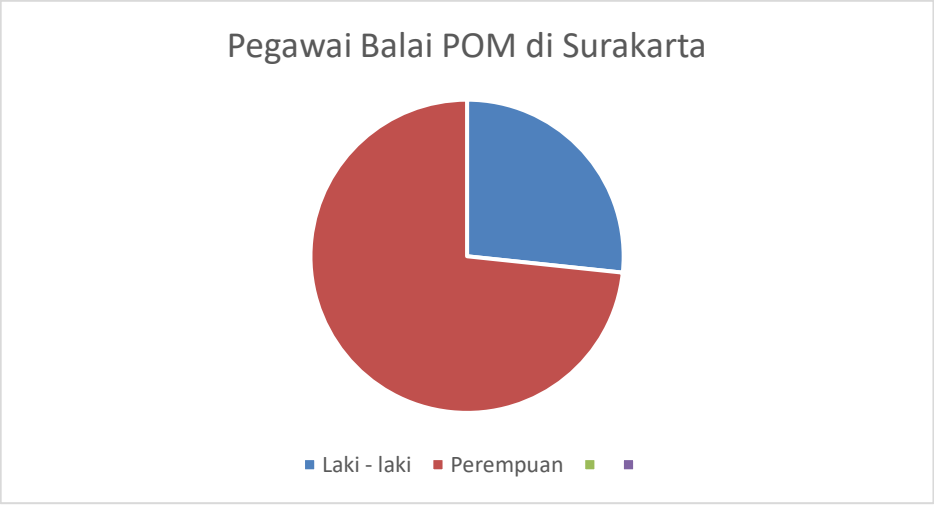

Gambar 2. Profil Pegawai Tahun 2024

Jumlah pegawai dengan sebagian besar adalah generasi milenial dan gen Z yang akrab dengan teknologi menjadi modal bagi organisasi dalam pengembangan dan pemanfaatan IT dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan. Masa dimana Indonesia memasuki bonus demografi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia produktif, pembangunan SDM menjadi penting dan ini sejalan dengan program pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Peningkatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia harus dikelola agar budaya organisasi dalam pelaksanaan fungsi Badan POM di UPT dapat dilaksanakan secara optimal. Manajemen SDM diperlukan agar peningkatan kompetensi dan integritas dapat terarah dan terukur. Era dimana Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0 yaitu era yang menekankan pada pola d*igital economy, artificial intelligence, big data, robotic* dan lain sebagainya; dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kecerdasan IT untuk melakukan fungsi pengawasan dimana produksi dan distribusi Obat dan Makanan juga mengalami perubahan menuju era digitalisasi. Dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai bentuk perkuatan organisasi dalam menghadapi era revolusi industri.

c. Sarana dan prasarana terutama fasilitas perkantoran dan laboratorium belum memadai

Kantor yang ditempati saati ini berlokasi di Jalan Letjen Suprapto Nomor 5, Kerten, Laweyan, Surakarta 57143. Kantor merupakan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 545 m^2 dan luas bangunan 150 m^2 dengan status pinjam pakai sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 030/0023006 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Sumber : Laporan Tahunan Balai POM di Surakarta 2020)

Sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM, dengan kondisi bangunan tersebut belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, terutama dengan adanya proyeksi peningkatan UPT Balai POM di Surakarta menjadi Balai POM, ketersediaan tanah untuk pembangunan kantor sesuai dengan standar sangat dibutuhkan. Pengadaan tanah untuk perkantoran UPT Balai POM menjadi prioritas penting untuk terlaksananya kegiatan dan fungsi Balai POM secara optimal baik melalui jalur hibah maupun pembelian tanah.

d. Layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan lintas sektor

Layanan publik adalah salah satu layanan yang diberikan oleh UPT berupa layanan informasi, pengaduan dan layanan sertifikasi. Standar pelayanan publik pemerintah

mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Digitalisasi layanan di Badan POM telah dilaksanakan dalam rangka kemudahan akses dan kecepatan layanan di era digital. Kemudahan layanan tersebut harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan semangat pembentukan UPTBalai POM dalam rangka mendekatkan Badan POM kepada masyarakat.

Pelayanan publik dan sistem pengawasan berbasis digital menjadi tantangan tersendiri di era revolusi industri 4.0. Pemerintah dalam mengimbangi digitalisasi ini maka menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan sistem ini diharapkan setiap lini dapat terhubung dengan baik, cepat dan transparan. Kemudahan akses tersebut didukung oleh berbagai mal pelayanan publik yang yang mulai dibangun di wilayah kerja Balai oleh pemerintah daerah dan UPT Badan POM sebagai salah satu instansi yang mengisi layanannya. MPP yang sudah terselenggara di tahun 2020 adalah MPP Surakarta serta menyusul untuk tahun 2022 adalah MPP Kabupaten Sukoharjo dan tahun 2023 adalah MPP Kabupaten Sragen. Dengan adanya MPP tersebut tentunya akan berkontribusi dalam mendekatkan layanan Badan POM kepada masyarakat di wilayah kerja sehingga kemudahan akses dan layanan dapat tersosialisasikan kepada masyarakat.

e. **Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan**

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat *full spectrum*, mulai dari *pre-market* hingga *post-market*. Sistem pengawasan *full spectrum* ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang yang tidak aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari 3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan. Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

f. Kepala UPT dengan eselonisasi yang tidak setara dengan lintas sektor dan sering mengalami mutasi

Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan mengamanahkan Badan POM untuk mengoordinasikan pengawasan Obat dan Makanan dengan K/L dan Pemerintah Daerah terkait. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi koordinator pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan lintas institusi tersebut sulit (Sumber: Badan POM Hadir Kerja Bersama untuk Bangsa, Penny K. Lukito, 2019). Adanya perbedaan eselonisasi dan tugas berat sebagai amanah Inpres No. 3 Tahun 2017 menjadi pekerjaan rumah besar bagi UPT di daerah terutama Balai POM yang dikepalai oleh eselon 3. Kepala Balai POM di Surakarta tergolong sering mengalami pergantian yaitu 4 kali sejak 2018, sehingga dibutuhkan strategi tersendiri dalam melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait.

Isu Eksternal

a. Banyaknya jumlah UMKM di wilayah kerja

Salah satu misi Badan POM adalah memfasilitasi pengembangan industri Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM, di era pandemi ini terdapat kenaikan jumlah UMKM secara signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan diberikannya Bantuan Produktif Usaha Mikro oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi. Pertumbuhan jumlah UMKM di masa pandemi ini sebagian besar didominasi oleh UMKM di bidang makanan. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM selaku Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan agar mereka mampu menjamin produk yang dihasilkan aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi.

Industri manufaktur skala kecil dan mikro mendominasi populasi industri manufaktur yang menjadi ranah pengawasan Badan POM. Untuk itu pemerintah secara khusus memberi perhatian dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. Bertumbuhnya usaha mikro di wilayah kerja Balai POM di Surakartaterutama di bidang pangan dan Obat Tradisional menjadi perhatian khusus bagi pengembangan program-program Balai POM dalam rangka mendukung misi Badan POM untuk memfasilitasi industri manufaktur dengan keberpihakan kepada UMKM. Tantangan terhadap pembinaan ini adalah peredaran produk makanan mengandung bahan berbahaya dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di wilayah kerja.

Kondisi pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Banyaknya sektor perekonomian yang gulung tikar dan munculnya sektor-sektor ekonomi baru membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Kolapsnya beberapa sektor usaha membuat pemerintah menciptakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemi pada bulan Juli tahun 2020 melalui Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Melalui program yang dicanangkan pemerintah ini, beberapa deregulasi diberlakukan dalam menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif. Salah satu yang telah dilakukan oleh Badan POM adalah melalui kemudahan dalam perizinan yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi mikro kecil dan menengah di Indonesia.

Kondisi pandemi ini, sejumlah 87,5% UMKM terdampak pandemi dan 93,2% diantaranya terdampak dari sisi penjualan. Empat puluh persen UMKM mengalami penurunan penjualan antara 25% hingga 50%. Adanya kebijakan – kebijakan daerah yang berpihak kepada pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berimbas kepada bertumbuhnya jumlah UMKM – UMKM di bidang Obat dan Makanan. Di awal tahun 2020 dilakukan deregulasi terhadap fasilitas bersama untuk produksi PKRT berupa handsanitizer di UMKM Kosmetik di wilayah Indonesia

hingga Conditional Approval untuk pemenuhan Cara Produksi Yang Baik untuk UMKM.

Untuk mendukung UMKM berdaya saing ini diperlukan penguatan tiga pilar pengawasan dalam menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pilar tersebut adalah Pelaku Usaha, Pemerintah dan Masyarakat. Pilar pengawasan pertama sebelum produk beredar adalah dari pelaku usaha. Kesadaran pelaku usaha untuk menjamin keamanan mutu khasiat produk yang dihasilkan adalah lini pertama perlindungan konsumen, untuk itu diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pedoman Cara Pembuatan atau Distribusi yang Baik.

b. Pesatnya perkembangan IPTEK

Pandemi COVID 19 telah mengubah hubungan interaksi Masyarakat dunia untuk adaptif dalam menggunakan teknologi digital. Bahkan di Indonesia khususnya, pandemi telah meredam banyak sektor termasuk ekonomi. Sementara untuk sektor teknologi informasi dan komunitas (TIK) tetap kuat dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap bertahan. Sekjen Kementerian Kominfo menegaskan Kembali bahwa ekonomi digital telah dan akan terus menjadi katalisator pertumbuhan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat selama pandemi. (Sumber : www.kominfo.go.id/content/detail/32602/pandemi-covid-19-pacu-adaptasi-gunakan-teknologi-digital/0/berita_satker).

Sejalan dengan strategi pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi dalam transformasi digital yang salah satunya melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Badan POM telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini dapat dilihat dari elektronisasi berbagai proses dalam pengawasan obat dan makanan, contohnya melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), SmartPOM, *Badan POM Command Centre* (BCC), *2D Barcode*, e-registration, Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan lain-lain. Transformasi digital ini memerlukan sumber daya manusia yang adaptif dan sarana-prasarana pendukung yang relevan.

Digitalisasi proses di Badan POM memerlukan sumber daya manusia yang mampu melakukan transfer informasi maupun sosialisasi kepada masyarakat dan lintas

sektor pengguna aplikasi digital tersebut. Berkembangnya IPTEK juga berpengaruh dalam pola peredaran Obat dan Makanan di masyarakat. Perkembangan IPTEK tersebut membutuhkan inovasi-inovasi dalam pola pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

c. Budaya masyarakat yang konsumtif

Kota Solo sebagai pusat ekonomi dengan mata pencaharian rata-rata penduduknya adalah wiraswasta/pedagang mempunyai kebiasaan masyarakat yang konsumtif. Hal ini menumbuhkan perekonomian terutama sektor usaha kecil di bidang makanan. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memberi perhatian khusus pada pemenuhan pengelolaan pangan yang adil dan berkelanjutan bagi warganya. Tahun ini, Pemerintah Kota Solo mulai menyusun peta jalan (*roadmap*) untuk program Kota Cerdas Pangan sebagai tindak lanjut keikutsertaan Solo dalam penandatanganan Pakta Milan, akhir 2020 lalu (Sumber: https://www.solopos.com/ikuti-pakta-milan-pemkot-solo-susun-roadmap-kota-cerdas-pangan-1232066). Pakta Milan adalah perjanjian internasional untuk mewujudkan kota cerdas pangan bagi warganya. Sejauh ini sudah lebih dari 200 kota yang menandatangani pakta tersebut. Dari Indonesia, baru dua kota yang tercatat ikut pakta tersebut yakni Bandung (sejak Agustus 2020) dan Solo (sejak November 2020).

Dalam rangka sinergisme program pemerintah daerah dan pusat, diperlukan peran Badan POM melalui Balai POM di Surakartadalam mengawal keamanan dan mutu pangan yang beredar sebagai peran aktif dan dukungan dalam program Kota Cerdas Pangan tersebut. Balai POM telah secara aktif ikut serta dalam penyusunan *roadmap* kota cerdas pangan melalui kerjasama dengan Yayasan Gita Pertiwi.

d. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha

Data jumlah sarana produksi dan Distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta adalah 1908 sarana produksi dan 2184 sarana distribusi. Dari data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta di tahun 2020, persentase tidak memenuhi ketentuan untuk sarana produksi dan distribusi obat dan makanan adalah sebesar 26% dan 43%. (Sumber: Laporan Tahunan Balai POM di Surakarta, 2020). Penyumbang terbesar tidak memenuhi ketentuan dari sarana produksi adalah sarana produksi pangan dengan 64% dan dari sarana distribusi adalah sarana distribusi pangan dengan 70% tidak memenuhi ketentuan.

e. Tingginya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Data rawan kasus Balai POM di Surakarta didominasi oleh peredaran kosmetik yang tidak mempunyai izin edar, obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) dan peredaran obat keras tanpa keahlian dan kewenangan. Dari 39 laporan intelijen yang diterbitkan di tahun 2023, 50% di antaranya terkait dengan pelanggaran di bidang Obat Tradisional. Tingginya tingkat kerawanan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh belum terinformasikannya masyarakat secara masif terkait berbahayanya produk Obat Tradisional tanpa izin edar dan masih tingginya pengaruh iklan terhadap pemilihan produk Obat Tradisional di wilayah Surakarta. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya cegah tangkal dan penindakan dengan mengedepankan prinsip ultimum remidium tanpa mengesampingkan upaya-upaya hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

f. Wilayah kerja mempunyai potensi strategis di bidang sosial, ekonomi, politik

Wilayah kerja Balai POM di Surakarta yang meliputi Kota Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen merupakan wilayah aglomerasi yang dulunya merupakan bagian dari Keresidenan Surakarta dengan pusat perdagangannya di Kota Surakarta. Kota Surakarta juga menjadi *centre of interest* dimana Presiden RI ke 7, Ir. H. Joko Widodo berasal dan pernah memimpin kota ini. Dan untuk masa 2021 sampai dengan 5 tahun ke depan kota ini dipimpin oleh Walikota Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden RI saat ini.

Amanat Inpres No. 3 Tahun 2017 dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 dalam bentuk kerja sama kolaborasi dan sinergis yang sudah terjalin di wilayah kerja yaitu: 1) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Surakarta, 2) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 3) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan 4) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Implementasi terhadap kerja sama yang telah terjalin belum secara optimal dimanfaatkan dalam menjalin koordinasi dengan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Perlu dilakukan koordinasi secara lebih intensif dengan lintas sektor terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja yang belum optimal, di antaranya:

- Tindak lanjut terhadap Permendagri No. 41 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
- Permasalahan terkait hasil uji produk mengandung bahan berbahaya di beberapa pasar besar di wilayah kerja yang masih mengandung bahan berbahaya (Rhodamin B, Formalin, dan Boraks).
- Sinergi dalam pengawasan Obat dan Makanan Ilegal.
- Masih tingginya kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu di beberapa wilayah, yaitu Sragen dan Wonogiri.

Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2021-2024

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Balai POM di Surakarta kedepan yaitu:

a. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

b. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Belum Efektif

Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamanahkan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

c. Peningkatan Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan

Sistem pembinaan dan pemberian efek jera terhadap pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang kurang efektif akan menyebabkan masifnya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk itu secara sistematis diperlukan sistem pembinaan dan penindakan yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kerja sama dengan lintas sektor terkait.

d. Peredaran *Hoax* tentang Obat dan Makanan di Masyarakat

Hoax terkait Obat dan Makanan menjadi isu yang strategis dan menjadi lingkaran setan yang kalau tidak segera diberantas akan berakibat pada mispersepsi

masyarakat terkait kebenaran informasi yang beredar. Perlunya edukasi masyarakat dalam melakukan *counter effect* adanya *hoax* ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan informasi yang benar di masyarakat akan membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan yang efektif.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Sejalan dengan visi dan misi Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

"Obat dan Makana naman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
3. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemnadirian bangsa;
4. Pengelolaan pemerintaham yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan public yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya peran serta Masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan Masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran startegis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapaia Balai POM di Surakarta dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta, serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Surakarta. Sasaran strategis Balai POM di Surakarta tergambar pada peta strategi level II Balai POM di Surakarta berikut :

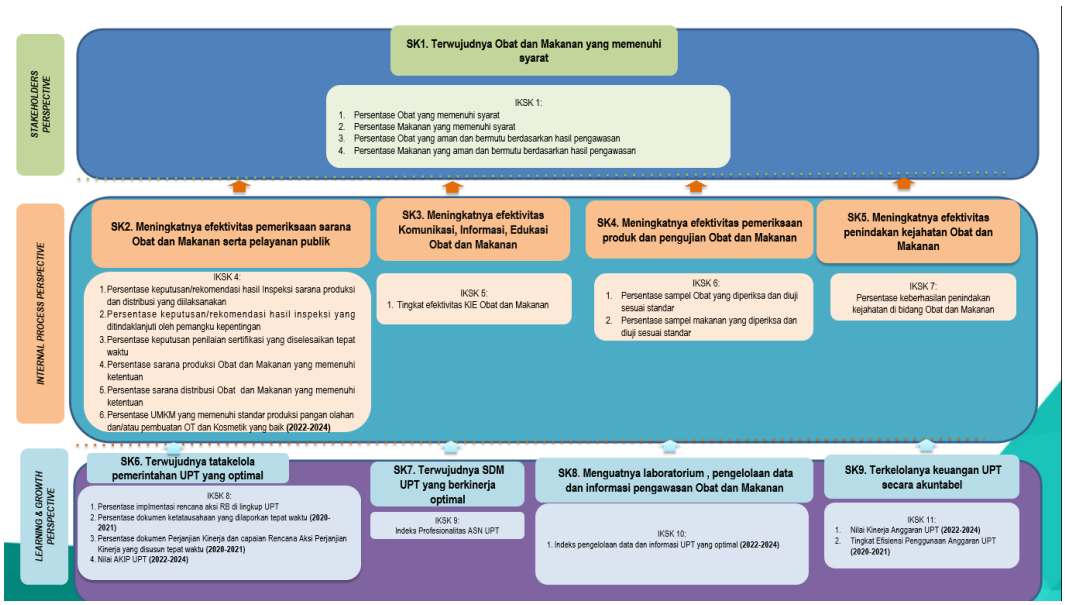

Gambar 3. Peta Strategis Balai POM di Surakarta Tahun 2021-2024

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Balai POM di Surakarta menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 34 (tiga puluh empat) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Balai POM di Surakarta tahun 2021 – 2024.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024.

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahuan Tahun 2024 Balai POM di Surakarta

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.3
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97.6
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inpeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94.4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.5
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	83.9
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.2
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Surakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen RenstraBalai POM di Surakarta tahun 2021- 2024 dan DIPA Balai POM di SurakartaTahun anggaran 2024dengan jumlah anggaran sebesar Rp 9.867.975.000,00 (Sembilan miliyar delapan ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2024 dengan indicator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Surakarta.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai POM di Surakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.4%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95.4%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97.6%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persenatse Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.3%
		Persentase Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	92.9%
		Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71%
		Indeks Pelayanan Publik	3.55%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	94%
		Persentase keterlibatan UPT dalam Program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	96
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	8
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar panga aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindkaan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78%
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40%
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3%
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makana aman dan bermutu	72.56%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.4%
		Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74.41%
		Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik UPT	95.75%
9	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks Reformasi Birokrasi UPT	75%
		Nilai AKIP UPT	78.66%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	76.64%
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90.64%
11	Terkelolanya keuangan UPt secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.51%
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	80%
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	88%
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60%

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2024. Target pada RKT Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Balai POM di Surakarta Tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada sasaran kegiaan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai POM di Surakartasebagai UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima Amanah (Kepala Balai POM di Surakarta).Dengan pemberi Amanah (Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan prganisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Surakarta selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-perfomance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2024 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai POM di Surakarta

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.4	97.4	97.4	97.4	35,557,250
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95.4	95.4	95.4	95.4	27,574,450
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	90	90	90	23,619,850
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97.6	97.6	97.6	97.6	20,198,650
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85	85	85	85	17,112,300
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persenatse Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.3	99.3	99.3	99.3	67,299,300
		Persentase Keputusan/ rekomendasi	92.9	92.9	92.9	92.9	67,299,300

		hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan					
		Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	61,595,100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	63,962,500
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	116,323,600
		Indeks Pelayanan Publik			3.55	3.55	19,350,000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	30	59	69	94	40,337,100
		Persentase keterlibatan UPT dalam Program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota				95	14,540,450
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	96	96	96	96	49,144,400
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak	24	60	78	8	285,941,000

		Sekolah (PJAS) Aman					
		Jumlah desa pangan aman	17	39	77	1	138,313,000
		Jumlah pasar panga aman berbasis komunitas	20	31	86	1	62, 340,000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10.5	25	38.5	50	29,843,500
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12.5	30	40.5	50	20,885,000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindkaan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	50	60	78	355,337,300
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				40	3,189,952,000
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	3	3	500,508,200
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makana aman dan bermutu				72.56	41,777,600
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan				90.4	25,866,250

	Obat dan Makanan	Obat dan Makanan					
		Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				74.41	69,373,100
		Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik UPT				95.75	19,350,000
9	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks Reformasi Birokrasi UPT				75	713,000,500
		Nilai AKIP UPT				78.66	713,000,500
		Nilai Pengelolaan Kearsipan				76.64	494,708,200
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT				90.64	715,950,500
11	Terkelolanya keuangan UPt secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	64	76	87	90.51	526,670,000
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa				80	509,158,200
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara				88	293,815,900
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri				60	538,270,000

2.5. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indicator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indicator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indicator dari setiap indicator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing – masing indicator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus :

$$\%\ \boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}}\ \mathbf{x\ 100\%}$$

Kategori penilaian capaian kinerja triwulan terhadap target triwulan yang digunakan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	= 100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	< 70%	

Gambar 4. Kategori Pencapaian Indikator Terhadap Target Tahun 2024

Dalam menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$\mathrm{NPS}_2 = \frac{1\mathrm{NPI}\ 1 + 1\mathrm{NPI}\ 2}{2}$$

$$\mathrm{NPS}_3 = \frac{1\mathrm{NPI}\ 1 + 1\mathrm{NPI}\ 2 + 1\mathrm{NPI}\ 3}{3}$$

$$\mathrm{NPS}_4 = \frac{1\mathrm{NPI}\ 1 + 1\mathrm{NPI}\ 2 + 1\mathrm{NPI}\ 3 + 1\mathrm{NPI}\ 4}{4}$$

$$\mathrm{NPS}_5 = \frac{1\mathrm{NPI}\ 1 + 1\mathrm{NPI}\ 2 + 1\mathrm{NPI}\ 3 + 1\mathrm{NPI}\ 4 + 1\mathrm{NPI}\ 5}{5}$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Surakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara, analisis penyebab keberhasilan dan/ atau peningkatan pencapaian kinerja, nalisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, analisis kegiatan/ program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja, upaya peningkatan kinerja.

Balai POM di Surakarta memperoleh Nilai Kinerja Organisasi/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Tahun 2024 sebesar 108,96% dengan kriteria "Istimewa" dengan notifikasi NPSS merupakan rata-rata dari NPS dari Perspektif Stakeholder sebesar 106,06%, NPS Perspektif Internal Proses sebesar 109,69%, NPS Perspektif Learning & Growth sebesar 111,12%. Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) unit kerja sebagai dasar penetapan predikat kinerja organisasi Tahun 2024.

Gambar 3. 1 Dashboard Simetris Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Surakarta Tahun 2024

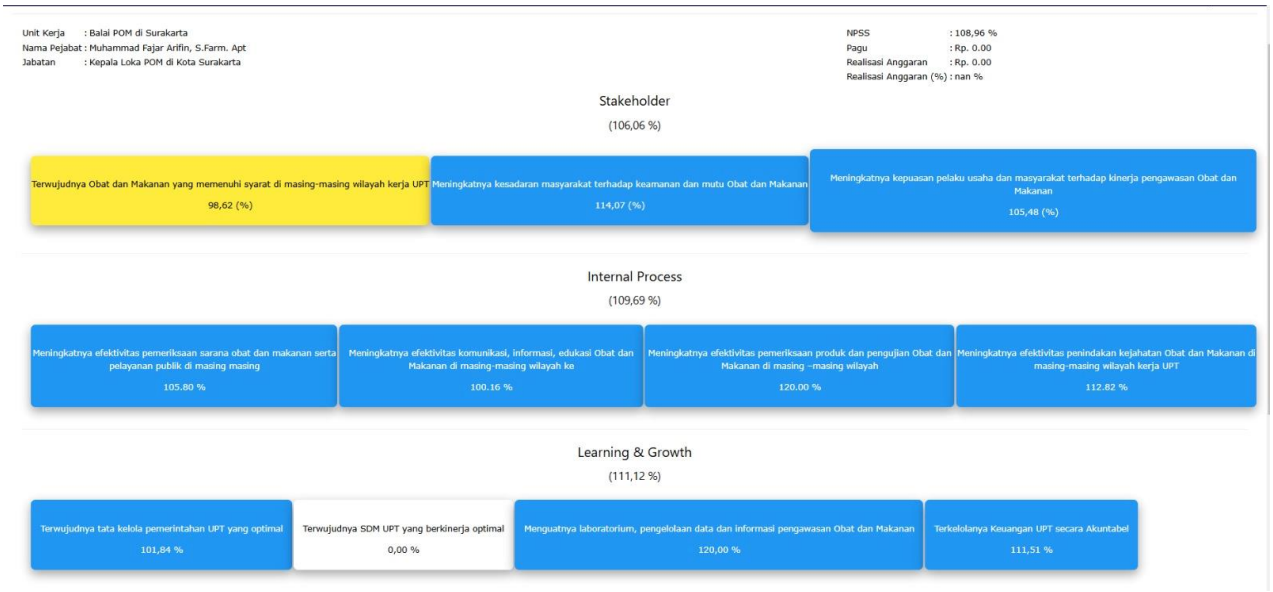

Pada tahun 2024 dari 11 sasaran strategis Balai POM di Surakarta telah berhasil mencapai target 9 sasaran strategis dengan kategori “sangat baik”, 1 sasaran strategis dengan kategori “Cukup” dan 1 sasaran strategis dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan nota dinas sekertariat utama nomor PR.09.03.2.01.25.42 tanggal 15 Januari 2025, akan dikecualikan dari perhitungan NPSS karena terdapat perubahan definisi operasional indikator. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kategori
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	98,62%	Cukup
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	105,80%	Sangat Baik
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	100,16%	Sangat Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	120,00%	Sangat Baik

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kategori
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	112,82%	Sangat Baik
6.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120,00%	Sangat Baik
7.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	114.07%	Sangat Baik
8.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	105,48%	Sangat Baik
9.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Surakarta yang optimal	101,84%	Sangat Baik
10.	Terwujudnya SDM Balai POM di Surakarta yang berkinerja optimal	*	*
11.	Terkelolanya keuangan Balai POM di Surakarta secara akuntabel	111,51%	Sangat Baik

*Sasaran Strategis terwujudnya SDM Balai POM di Surakarta yg berkinerja optimal mempunyai indikator kinerja indeks profesionalitas ASN dikecualikan dari perhitungan NPSS karena terdapat perubahan definisi operasional.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah diperjanjikan 11 sasaran strategis dan 34 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,40%	99.17%	101.82%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,40%	95.65%	100.26%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%	100,00%	111,11%

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,60%	89.47%	91.67%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00%	75.00%	88.24%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,30%	100,00%	100,70%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	92,90%	96.90%	104,31%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	98.13%	103.29%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	62.71%	104.52%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00%	76.36%	107.55%
		Indeks Pelayanan Publik	3,55%	3,88%	109,30%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	94,00%	100.00%	106.38%
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00%	104,84%	110,36%

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	96,00%	96.60%	100.63%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	8,00	8,00	100,00%
		Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	100,00%
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1,00	1,00	100,00%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50.00%	100.00%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50.00%	100.00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00%	88,00%	112,82%
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40,00%	49,43%	123,58%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	3,00	3,00	100,00%
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	72,56%	82,77%	114,07%
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,40%	97,34%	107,68%
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74,41%	80,58%	108,29%

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	95,75%	96,20%	100,47%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Surakarta yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Surakarta	75,00%	74,39%	99,19%
		Nilai AKIP UPT	78,66%	74,39%	94,57%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	76,64%	85,66%	111,77%
10	Terwujudnya SDM Balai POM di Surakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta	90,64%	87,27%	96,28%
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Surakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta	90,51%	91,23%	100,80%
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	80,00%	95,00%	118,75%
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	88,00%	93,73%	106,51%
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60,00%	97,80%	163,00%

Dari 34 (tiga puluh empat) IKU, hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 21 indikator dengan kategori “Sangat Baik”, 6 indikator dengan kategori “Baik”, 5 indikator dengan kategori “Cukup”, 2 indikator dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”. Kategori Sangat Baik dan Baik menunjukkan bahwa target tahun 2024 sudah dapat tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Surakarta, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1
TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI SURAKARTA

Nilai pencapaian sasaran strategis 1 terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Surakarta adalah 98,62% pada akhir tahun 2024.

Pencapaian tersebut didukung oleh 5 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 6. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,40%	99,17%	101,82%	Sangat Baik

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

% Obat MS = (Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan pedoman sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar);

2) Produk kedaluwarsa;

3) Produk rusak;

4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan;

5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 121 sampel acak Obat yang dilakukan oleh Balai POM di

Surakarta dengan hasil 120 sampel MS dan 1 TMS. Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada Tahun 2024 telah berhasil mencapai target yaitu 101,82 % dengan kriteria **" Sangat Baik".**

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 7. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tahun	TARGET	REALISASI	% Capaian
2021	90,50%	93,28%	103,10%
2022	91,00%	83,76%	92,04%
2023	91,50%	97,37%	106,42%
2024	97,40%	99,17%	101,82%

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, namun tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan kepatuhan pelaku usaha yang meningkat terhadap produk yang diedarkan. Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 dengan hasil capaian sebesar 101,82% dengan kriteria "Tercapai/Melampaui".

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara**

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan UPT Balai POM yang setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	98,06%	98,52%	99,17%	83,69%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 99,17% kemudian Balai POM di Kediri dengan realisasi

sebesar 98,52% dan yang terendah adalah Balai POM di Tarakan dengan realisasi sebesar 83,69%.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Jumlah total sampel Obat yang memenuhi syarat di Balai POM di Surakarta adalah 121 sampel. Penyebab tercapainya persentase Obat yang memenuhi syarat diantaranya adalah kepatuhan pelaku usaha obat, obat tradisional dan kosmetik terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/mutu sehingga produk yang dihasilkan cukup baik. Pembinaan yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan sarana distribusi turut memberi dampak sehingga tidak ditemukan lagi produk-produk tanpa izin edar, rusak dan kadaluarsa yang beredar di pasaran.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 9. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja Indikator persentase Obat yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
persentase Obat yang memenuhi syarat	35.557.250	35.496.989	99,83%	101,82%	0,02	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran masuk dalam kriteria Efisien. Tahun 2024 pelaksanaan kegiatan meliputi pengadaan sampel dan perjalanan pengadaan sampel sudah terselesaikan dengan kriteria efisien.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Balai POM di Surakarta sudah berhasil mencapai target persentase Obat yang memenuhi syarat. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat, antara lain :

1) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan
2) Pengawasan penandaan yang dilakukan secara rutin dievaluasi oleh Badan POM dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi sehingga pelaku usaha lebih memperhatikan pemberian label/penandaan
3) Pembinaan ke pemilik/penanggungjawab sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang sesuai dengan ketentuan
4) Saat inspeksi rutin ke sarana produksi agar menerapkan GMP (Good Manufacturing Practice) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya perbaikan atau rekomendasi untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja ialah :

1. Koordinasi dengan Balai penguji dan melakukan monitoring kegiatan sampling dan pengujian Obat.
2. Pengaturan jadwal petugas sampling dan berkoordinasi dengan katim yang lain.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 10. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,4%	95.65%	100,26%	Sangat Baik

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

% Makanan MS = (Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 46 sampel acak makanan yang disampling oleh Balai POM di Surakarta pada tahun 2024, terdapat 44 sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 2 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat Wilayah Balai POM di Surakarta pada tahun 2024 yaitu sebesar 100,26 % dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	97,00	94,29	97,21%
2022	97,2	90,91	93,53%

2023	97,4	95,35	97,90%
2024	95,4	95,65	100,26%

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat realisasi yang semakin meningkat sampai akhir tahun 2024 yaitu sebesar 95,65%. Urutan Capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat dari yang terkecil pada tahun 2022 sebesar 93,53%, Capaian pada tahun 2021 sebesar 97,21%, capaian tahun 2023 sebesar 97,90% dan capaian tahun 2024 sebesar 100,26%.

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

Tabel 12. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,57%	88,52%	95,65%	67,35%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 95,65% kemudian Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 91,57% kemudian Balai POM di Kediri dengan realisasi sebesar 88,52%. Dan yang terendah adalah Balai POM di Tarakan dengan realisasi sebesar 67,35%.

d. Analisis penyebab Keberhasilan dan/ atau kenaikan pencapaian kinerja

Penyebab keberhasilan dan atau kenaikan pada indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah adanya penurunan target dari tahun sebelumya yaitu dari 97,4% menjadi 95,4%. Selain itu karna adanya kepatuhan dari pelaku usaha dalam hal ini terkait penandaan /label maupun penerapan CPPOB (Cara Produksi pangan Olahan yang Baik).

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 13. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN 2024	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	27.574.450	27.512.853	99,78	100,26	0,00	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dikategorikan Efisien. Balai POM di Surakarta telah melakukan kegiatan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara baik dan benar sehingga bisa mencapai nilai Efisien

f. Analisis kegiatan/ program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat, antara lain karena adanya kepatuhan dari pelaku usaha dalam hal ini terkait penandaan /label maupun penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik).

g. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja indicator persentase Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, antara lain :

1) Melakukan kegiatan sampling sesuai pedoman sampling tahun 2024
2) Melakukan koordinasi dengan Balai penguji terhadap sampel yang dikirim.
3) Melakukan monitoring kegiatan sampling.
4) Saat inspeksi rutin ke sarana industri makanan dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing*

Practice) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.

5) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk makanan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak, dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 14. Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	90,00	100,00	111,11	Sangat Baik

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

% Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres No. 80 Tahun tentang 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan.

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka POM. Kriteria Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan 5 sampel *targeted* Obat yang

dilakukan oleh Balai POM di Surakarta dengan hasil Memenuhi Syarat untuk semua sampel. Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 yaitu 111,11% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 15. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	89,20	78,85	88,4
2022	89,40	68,63	76,77
2023	89,60	88,24	98,48
2024	90,00	100,00	111,11

Target Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan sama dengan target tahunan yaitu 90%. Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan untuk Tahun 2024 yaitu sebesar 111,11% dengan kategori tercapai/melampaui. % Capaian pada tahun 2024 merupakan capaian yang tertinggi dibandingkan capaian di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 16. Perbandingan Realisasi dan Capaian Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dibandingkan dengan Balai POM lain yang setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	98,25	92	100	76,92

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 100 % kemudian Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 98,25% dan yang terendah adalah Balai POM di Tarakan dengan realisasi sebesar 76,92%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Balai POM di Surakarta berhasil mencapai target untuk indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2024. Analisa penyebab berhasilnya indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu ialah sebagai berikut :

1. Berkomunikasi dengan Balai Besar POM sebagai balai penguji.
2. Melakukan Monitoring kegiatan sampling Obat secara berkala.
3. Kepatuhan Pelaku Usaha Obat terhadap Peraturan baik dari segi label maupun kualitas/mutu produk cukup baik sehingga menghasilkan produk yang memenuhi ketentuan.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 17. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	% REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	23.619.850	23.559.741	99,75	111,11	0,11	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,11 pada Triwulan IV tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai Persentase Obat

yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan yang memenuhi syarat.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang menunjang keberhasilan indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 ialah sebagai berikut :

1) Berkomunikasi dengan Balai Besar POM sebagai balai penguji terkait perencanaan dan pengujian sampel yang dievaluasi secara rutin setiap bulan
2) Pengawasan Penandaan yang dilakukan secara rutin dan laporan penandaan dikirimkan ke Pusat untuk ditindaklanjuti.
3) Pembinaan ke sarana distribusi agar mendistribusikan produk Obat yang memenuhi ketentuan.
4) Pembinaan ke sarana produksi saat inspeksi rutin agar selalu menerapkan GMP (Good Manufacturing Process melalui kegiatan pengawasan rutin agar produk Obat yang dihasilkan memenuhi ketentuan.

g. Upaya peningkatan kinerja

Upaya perbaikan/ rekomendasi untuk meningkatkan kinerja adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 18. Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	97,60%	89,47%	91,67%	Cukup

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

% Makanan MS = (Jumlah Sampel Targeted Makanan MS dibagi Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi. Sampel *targeted* yang dimaksud terdiri dari sampling pangan tertentu (sampling tindak lanjut kasus pelangaran, dalam rangka pendampingan UMK, spesifik daerah, pengembangan Laboratorium air, minuman beralkohol lokal, ruang lingkup akreditasi, kemasan pangan), dan sampling yang mendukung program nasional PJAS. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Hasil evaluasi label (MK/TMK Minor/TMK Mayor) tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel, penentu keputusan kesimpulan akhir sampel sampling bertarget tetap berdasarkan hasil uji. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil sampling terhadap 19 sampel *targeted*

pangan yang dilakukan Balai POM di Surakarta dengan hasil 17 sampel Memenuhi Syarat dan 2 sampel tidak memenuhi syarat. Capaian persentase M akanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 sebesar 91,67% dengan kategori Cukup.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 19. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	74,00	96,67	130,64
2022	73,00	96,30	131,92
2023	76,00	84,21	110,8
2024	97,60	89,47	91,67

Dari Tabel di atas didapatkan data adanya penurunan capaian persentase M akanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024. Pada tahun 2021 persentase capaian yang didapatkan sebesar 130,64%, kemudian pada tahun 2022 persentase mencapai 131,92%. Pada tahun 2023 persentase capaian sebesa 110,8% dan capaian pada tahun 2024 sebesar 91,67%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 20. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN

Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87,76	95,24	89,47	81,82

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase M akanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Kediri dengan realisasi sebesar 95,24% kemudian Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 89,47% kemudian Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 87,76%. Dan yang terendah adalah Balai POM di Tarakan dengan realisasi sebesar 81,82%.

d. Analisis penyebab Kegagalan dan/ atau Penurunan pencapaian kinerja

Penyebab kegagalan pada indikator persentase M akanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah adanya hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat. Selain itu karena adanya kenaikan target pada tahun 2024, sehingga dengan hanya 1 (satu) sampel saja yang tidak memenuhi syarat maka indicator tersebut tidak tercapai.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 21. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN 2024	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	20.198.650	20.137.968	99,70	91,67	-0,08	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien dengan tingkat efisiensi -0,08 pada tahun 2024. Kriteria tidak efisien dalam hal ini disebabkan karena terdapat

ketidaksesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

f. Analisis kegiatan/ program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain Adanya target indicator kinerja yang tinggi sehingga satu sampel tidak memenuhi syarat maka dapat menyebabkan tidak tercapainya indicator kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Selain itu juga karena ketidakpatuhan pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik).

g. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja pada indikator persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain :

1) Melakukan koordinasi dengan Balai penguji terkait sampel yang dikirim untuk dilakukan pengujian
2) Melakukan monitoring kegiatan sampling Produk Makanan.
3) Melakukan reviuw Target Indikator Kinerja

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 22. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00	75,00	88,24	Cukup

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

% Pangan fortifikasi MS = (Jumlah Sampel Fortifikasi MS dibagi Total Sampel Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Sampling fortifikasi meliputi garam konsumsi, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit. Seluruh sampel pangan fortifikasi diuji (walaupun dalam kondisi TIE, rusak, dan TMK Label). Untuk kesimpulan hasil uji fortifikasi berdasarkan 2 hal, yaitu :

1) Kesimpulan fortifikan
2) Kesimpulan akhir hasil pengujian

Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat diperoleh dari hasil sampling terhadap 5 sampel garam di peredaran, 14 sampel minyak goreng sawit dan 1 sampel tepung terigu yang dilakukan Balai POM di Surakarta selama tahun 2024 dengan hasil 15 sampel MS dan 5 sampel TMS. Capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2024 yaitu 88,24% dengan kategori Cukup.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 23. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	90	80	88,89
2024	85.00	75.00	88,24

Pada tahun 2021 dan tahun 2022 belum dilakukan sampling fortifikasi. Pada tahun 2023 mendapatkan capaian sebesar 88,89%. Pada tahun 2024 mendapatkan capaian sebesar 88,24%. Terdapat penurunan capaian pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023.

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara**

Tabel 24. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	94,44	69,57	75	96,88

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Tarakan dengan realisasi sebesar 96,88% kemudian Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 94,44% kemudian Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 75%. Dan yang terendah adalah Balai POM di Kediri dengan realisasi sebesar 69,57%.

d. Analisis penyebab kegagalan dan/ atau penurunan pencapaian kinerja

Penyebab kegagalan pada indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adalah adanya hasil pengujian vitamin A dari sampel minyak goreng sawit yang ada di repacker tidak memenuhi syarat.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 25. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN 2024	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	17.112.300	17.051.905	99,65	88,24	-0,11	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien dengan tingkat efisiensi -0,11 pada tahun 2024. Kriteria tidak efisien dalam hal ini disebabkan karena terdapat

ketidaksesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. Hal ini disebabkan karena banyaknya pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat.

f. Analisis kegiatan/ program yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan. Penyumbang banyaknya nilai Tidak Memenuhi Syarat pada sampel fortifikasi adalah pada hasil uji minyak goreng. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya komitmen pelaku usaha dalam hal ini repacker terhadap kadar vitamin A yang dihasilkan.

g. Upaya peningkatan kinerja

Upaya perbaikan/ rekomendasi untuk meningkatkan kinerja adalah dengan melakukan review terhadap Target Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan melakukan peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap cara produksi pangan olahan yang baik melalui pelatihan maupun pemeriksaan rutin.

SASARAN STRATEGIS 2
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 8 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 26. Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana	99,3	100	100,70	Sangat baik

produksi dan distribusi yang dilaksanakan				

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT/Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT/Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat atau UPT lain / Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT / Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK (Penghentian Sementara Kegiatan)/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE (Nomor Izin Edar) dan/atau tindak lanjut kasus yang

berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID/Komisi Penyiaran Indonesia Daerah), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat.
4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada tahun 2024, Balai POM di Surakarta telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 134 keputusan/rekomendasi dari 134 keputusan/rekomendasi yang diterima. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana distribusi, produksi, dan fasyanfar yang dilaksanakan di tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,70% dengan kategori **"Sangat baik"**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 27. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	87	91,07	104,7%
2022	89	99,13	111,38%

2023	91	99,25	109,07%
2024	99,3	100%	100,7%

Realisasi dan capaian tahun 2024 dapat memenuhi target, hal tersebut sama apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2021, 2022 dan 2023). Hal tersebut menandakan bahwa Balai POM di Surakarta telah berhasil mempertahankan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi dengan kategori sangat baik dari tahun 2021-2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara.

Tabel 28. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2024 di Balai POM di Mamuju, Balai POM di Kediri, Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Tarakan adalah sama yaitu 100%.

d. Analisis penyebab keberhasilan dan/ atau peningkatan pencapaian kinerja

Capaian untuk indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2024 cenderung stabil setiap bulannya dan telah memenuhi target. Analisa penyebab keberhasilan di tahun 2024 adalah pembuatan tindak lanjut oleh petugas Balai POM di Surakarta yang dikerjakan sesuai waktunya dengan

pengawasan yang dilakukan di awal sampai dengan tengah bulan sehingga petugas masih mempunyai waktu yang cukup dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 29. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN 2024	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	59.188.300	58.967.771	99,63	100,70	0,01	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,01 pada tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

f. Analisis kegiatan/ program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain dengan melakukan monitoring pembuatan tindak lanjut oleh petugas dan pembuatan jadwal perbulan untuk pelaksanaannya. Program tersebut berjalan efektif dan dapat dilanjutkan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selanjutnya

g. Upaya peningkatan kinerja

Upaya perbaikan/ rekomendasi untuk meningkatkan kinerja adalah dengan melakukan monitoring pembuatan tindak lanjut oleh petugas dan pembuatan jadwal perbulan untuk pelaksanaannya.

2. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 30. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	92,90	96,90	104,31	Sangat Baik

Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = (A+B)/2

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai POM di Surakarta kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, fasyanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). *Stakeholder* yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas

sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE, dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasyanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada tahun 2024 Balai POM di Surakarta telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT Badan POM (Balai) kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 129 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 125 sarana/pelaku usaha/instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/*feedback* dan 4 pelaku usaha yang tidak memberikan tindak lanjut/*feedback*. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 104,31% dengan kategori **"Sangat Baik"**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 31. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	78	78,95	101,22
2022	80	90,78	113,48
2023	83	92,86	111,88
2024	92,90	96,90	104,31

Pada tahun 2024 realisasi dapat mencapai target yang ditetapkan yakni 104,31%, hal tersebut sama dengan realisasi yang dicapai pada tahun - tahun sebelumnya (2021 - 2023). Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan diatas selama 4 tahun melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Surakarta dapat mempertahankan capaian dengan kategori Sangat Baik dari tahun 2021-2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara.

Tabel 32. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	91,84	97,5	96,9	97,06

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Kediri dengan realisasi sebesar 97,5%, diikuti Balai POM di Tarakan dengan realisasi sebesar 97,06%, kemudian Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 96,9% dan realisasi terendah adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 91,84%. Dari empat Balai diatas yang dibandingkan, seluruhnya telah mencapai target IKU yang ditetapkan pada tahun 2024.

d. Analisis penyebab keberhasilan dan/ atau peningkatan pencapaian kinerja

Penyebab berhasilnya indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklajuti/dilaksanakan oleh pemangku kepentingan tahun 2024 ialah sebagai berikut :

- Melakukan monitoring timeline tindak lanjut CAPA

- Melaksanakan desk CAPA bagi pelaku usaha obat dan makanan pada tanggal 21 Juni 2024 dan 28 November 2024

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 33. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN 2024	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	59.188.300	58.967.771	99,63	104,31	0,05	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran sebesar 0,05 dengan kriteria Efisien. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklajuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha telah dilaksanakan sesuai target pada tahun 2024.

f. Analisis kegiatan/ program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan pada tahun 2024 dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan melakukan monitoring CAPA secara rutin dan melakukan desk CAPA.

g. Upaya peningkatan kinerja

Upaya perbaikan/ rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pada indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan adalah dengan melakukan monitoring tindak lanjut/feedback pelaku usaha sehingga dapat diketahui apabila terdapat pelaku usaha yang belum memberikan tindak lanjut/feedback dapat segera ditindaklanjuti. Upaya perbaikan/rekomendasi selanjutnya adalah dilakukan desk CAPA secara rutin untuk memfasilitasi pelaku usaha yang kesulitan memenuhi perbaikan sesuai rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Surakarta.

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 34. Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	REALISASI Tahun 2024	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024	95%	98.12%	103.28%	Sangat baik

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : (Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%

Keputusan penilaian sertifikasi berupa Surat Rekomendasi Cara pembuatan yang Baik untuk sarana produksi obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan/atau Surat Rekomendasi Cara Distribusi yang Baik untuk sarana

distribusi obat dan kosmetik. Rekomendasi Sertifikasi Cara Pembuatan yang Baik dan Surat Rekomendasi Cara Distribusi yang Baik mencakup Surat Rekomendasi Sertifikat CPOTB Tahap 1, 2 dan 3 dalam rangka pendaftaran produk OT, Surat Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dalam rangka notifikasi produk kosmetik, Surat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dalam rangka pendaftaran izin edar pangan olahan, hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB, dan surat hasil pemeriksaan Badan Usaha Pemilik Notifikasi dalam rangka notifikasi produk kosmetik. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024 sebesar 98.12% dengan kriteria **"Sangat Baik"** dan **berhasil mencapai target TW Tahun 2024** yang ditetapkan yaitu 95%

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 35. Persentase realisasi dan capaian tahun 2024 Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023)

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	72%	81.32%	112,94%
2022	75%	85.96%	114.61%
2023	80%	89.6%	112%
2024	95%	98.12%%	103.28%

Realisasi dan capaian Tahun 2024 dapat memenuhi target, hal tersebut sama apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2021, 2022 dan 2023). Hal tersebut menandakan bahwa Balai POM di Surakarta telah berhasil mempertahankan Capaian Persentase **Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu** dengan kategori baik dan sangat baik dari tahun 2021-2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara.

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	98.13%	120%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase **Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu** dilaksanakan Tahun 2024 di Balai POM di Surakarta adalah yang paling rendah di antara Balai POM Mamuju dan Balai POM Kediri. Hal ini disebabkan, pelaku usaha wilayah BPOM di Surakarta yang mengajukan permohonan sertifikasi pada triwulan IV masih dalam batas waktu mutu baku proses evaluasi tetap dimasukkan dalam perhitungan persentase keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu. Namun demikian capaian tetap dalam kategori **" Sangat Baik"**

d. Analisis penyebab keberhasilan dan/ atau peningkatan pencapaian kinerja

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 sebesar 103.28% dan berhasil melampaui target yang ditetapkan Tahun 2024 yaitu 95% dengan realisasi 98.12%. Keberhasilan pencapaian target pada Tahun 2024 didukung oleh pelaksanaan kegiatan DESK CAPA dimana petugas sertifikasi melakukan *desk* tatap muka, media daring maupun layanan dengan aplikasi *messenger* dengan pelaku usaha terkait pemenuhan persyaratan sertifikasi dan langkah-langkah menyusun dokumen CAPA sehingga pelaku usaha dapat segera mengirimkan dan menyelesaikan pemenuhan persyaratan sertifikasi. Kegiatan Desk CAPA pada triwulan 3 dan 4 Tahun 2024 dilaksanakan sinergi dengan layanan sertifikasi yang dilaksanakan tiap hari Senin dan Jumat di Ruang Layanan Sertifikasi BPOM di Surakarta.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 37. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET Anggaran 2024	REALISASI Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran 2024	% capaian indikator	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024	61.595.100	61.595.019	100%	103.28%	0.03	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran "Efisien" dimana selaras antara capaian kinerja dan anggaran. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan yang baik terhadap jumlah permohonan sertifikasi yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan jumlah sumber daya yang dimiliki baik anggaran maupun kompetensi petugas.

f. Analisis kegiatan/ program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian target tahun 2024 didukung oleh Program Kegiatan yang secara konsisten dilakukan sebagai berikut:

a. Melakukan kegiatan DESK CAPA yaitu petugas sertifikasi melakukan desk dengan pelaku usaha terkait pemenuhan persyaratan sertifikasi dan langkah-langkah menyusun dokumen CAPA

b. Melakukan kegiatan MONDAY(MONITORING DAY) yaitu melakukan monitoring kinerja dan anggaran pada hari Jumat pada akhir minggu dan didokumentasikan pada laporan monitoring hasil keputusan layanan sertifikasi tiap bulan atau laporan prrogresif bulanan.

g. Upaya peningkatan kinerja

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang dilakukan pada tahun 2024 meliputi:

a. Melakukan penyusunan panduan layanan sertifikasi sehingga memudahkan pelaku usaha memahami pemenuhan persyaratan sertifikasi sehingga memudahkan pelaku usaha melakukan pengajuan

di sistem elektronik. Panduan layanan akan terus dikembangkan pada tahun 2025 sesuai update regulasi BPOM.

b. Pengadaan alat gawai layanan sertifikasi sehingga memudahkan personil sertifikasi dalam memberikan layanan ke pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi

c. Peningkatan kompetensi personil melalui kegiatan yang sebagai berikut:
   - Pelatihan Workshop Fasilitator Registrasi Pangan Olahan tanggal 26 Februari 2024 – 1 Maret 2024
   - Pelatihan Inspektur Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Junior Tahun 2024 tanggal 19 Agustus - 30 Agustus 2024
   - Bimbingan Teknis NUANSA tanggal 25 - 26 Juli 2024
   - Magang fasilitator registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi tanggal 17 - 20 September 2024.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN IV tahun 2024

Tabel 38. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang emenuhi ketentuan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang emenuhi ketentuan	60	62.71%	104.52%	Sangat baik

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: (Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi Target Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana produksi yang diperiksa meliputi UMOT, UKOT, Industri Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik golongan A dan B, Industri pangan MD serta PIRT. Persentase sarana produksi Obat dan

Makanan yang memenuhi ketentuan merupakan bentuk kepatuhan para pelaku usaha di bidang produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau temuan major yaitu personil yang bekerja di area produksi menderita penyakit menular atau peralatan yang bersentuhan langsung dengan produk tidak dibersihkan dari produk sebelumnya pada UMOT dan UKOT dan level A dan B produksi pangan (MD) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.

Pada tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap 59 sarana produksi di wilayah Balai POM di Surakarta terdiri dari Industri Farmasi 3 sarana, Industri Suplemen Kesehatan 3 sarana, Industri Obat Tradisoonal 2 sarana, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 14 sarana, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 3 sarana, Industri Kosmetika 19 sarana, Industri Pangan 13 sarana dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 2 sarana, dengan hasil 37 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 22 sarana tidak memenuhi ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 adalah sebesar 104,52 %. Realisasi tersebut telah dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 60%, dengan persentase capaian 62.71% sehingga kriteria capaian terhadap target adalah "**sangat baik**".

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 39. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	59	47,83	81,07
2022	63	35,71	56,68
2023	66	52,73	79,89

2024	60	62,71	104,53

Target indikator kinerja persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 sebesar 60%. Target tersebut sama dengan target akhir Renstra, karena tahun 2024 merupakan periode akhir renstra 2020-2024. Terdapat peningkatan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Peningkatan realisasi dikarenakan kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan CPOTB, CPKB dan CPPOB meningkat

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Persentase sarana porduksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang emenuhi ketentuan	70.59	62.03	62.71	77.78

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana porduksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Tarakan dengan realisasi sebesar 77,78% dan yang terendah adalah Balai POM di Kediri dengan realisasi sebesar 62,03%.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan dikarenakan kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan CPOTB, CPKB dan CPPOB meningkat. Pemeriksaan sarana produksi dilakukan secara luring berdasar skoring. Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut telah diberikan pembinaan dan sanksi secara

proporsional sesuai pedoman Tindak Lanjut, termasuk melalui pemberian rekomendasi untuk Menyusun Corrective Action and Preventive Action (CAPA).

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 41. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN 2024	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55,800,500	55,799,100	100,00	108,85	0,09	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,09% pada tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang emenuhi ketentuan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja dengan melakukan kegiatan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha yang diselenggarakan dengan Program Satu Dahsyat (Sarana Produksi Patuh dan Memenuhi Syarat). Kegiatan dilaksanakan secara Hybrid selama 1 (satu) hari tanggal 21 Oktober 2024. Kegiatan dilakukan di PT Deltomed Laboratories yang dihadiri oleh : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri yang diwakili oleh Sub Koordinator Farmamin, Alkes dan PKRT (1 orang), PC IAI Kabupaten Wonogiri (1 orang), Ketua PAFI Kabupaten Wonogiri (1 orang), Universitas Setia Budi (4 orang), PT Deltomed Laboratories (2 orang), Ketua Jurusan Jamu Poltekkes Surakarta (1 orang), Fasilitator Poltekkes Surakarta (4 orang), Pelaku Usaha (31 orang), BPOM di Surakarta (13 orang).

g. Upaya peningkatan kinerja

Upaya perbaikan/ rekomendasi untuk meningkatkan kinerja adalah :

1. Melakukan kegiatan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan aspek-aspek CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik), CPOTB (Cara Produksi Obat tradisional yang Baik), CPKB (Cara Produksi Kosmetik yang Baik) dan CPPOB (Cara Produksi pangan Olahan yang Baik).
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan sarana Produksi yang dilakukan

6. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 42. Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan	71%	76,36 %	107,55 %	Sangat Baik

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kosmetik, dan SK
3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan

4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh petugas Balai POM di Surakarta pada Tahun 2024 kepada 313 sarana dengan hasil 239 sarana memenuhi ketentuan dan 74 sarana tidak memenuhi ketentuan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta memberikan capaian persentase 107,55 % dan masuk pada kriteria "sangat baik".

b. Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 43. Realisasi Persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2021-2023

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	60,00	65,94	109,9 %
2022	63,00	57,14	90,70
2023	66,00	70,98	107,54
2024	71,00	76,36	107, 55

Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi pada tahun 2021 telah tercapai sebesar 109,9 % namun mengalami penurunan pada Tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024 capaian memenuhi target dengan nilai perolehan yang konsisten Perlu tetap dilakukan upaya agar capaian dapat dipertahankan atau meningkat secara berkesinambungan

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 44. Perbandingan Realisasi Persentase Persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan Tahun 2024 dengan UPT Balai POM Setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan	76,51	71,5	76,36	69,12

Berdasarkan tael di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan yang tertinggi adalah Balai POM di Mamuju , kemudian Balai POM di Surakarta, selanjutnya adalah realisasi di Balai POM di Kediri dan yang terendah adalah Balai POM di Tarakan.

d. Analisis penyebab keberhasilan dan/ atau peningkatan kinerja

Pada tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap 313 sarana dengan hasil 239 sarana memenuhi ketentuan dan 74 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan dilakukan terhadap 21 puskesmas dengan hasil 21 sarana memenuhi ketentuan (100 %) , 20 rumah sakit dengan hasil 18 sarana (90%) memenuhi ketentuan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebanyak 7 sarana dengan hasil 6 sarana memenuhi ketentuan (85,71%), 5 Instalasi Farmasi Pemerintah dengan 4 sarana semua memenuhi ketentuan (80%) , dan 24 klinik dengan hasil 19 sarana memenuhi ketentuan (79,17 %), 35 sarana Apotek dengan hasil 11 sarana Memenuhi ketentuan (68,57), 8 Toko Obat dengan hasil 2 sarana memenuhi ketentuan (25 %) .

Selain pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat, pada tahun 2023 Balai POM di Surakarta juga telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat.

Tradisional berupa depot jamu, distributor, toko/ kios jamu, toko herbal sebanyak 40 sarana dengan hasil 17 sarana memenuhi ketentuan (42,5 %) , 59 sarana kosmetik berupa distributor, toko kosmetik, Badan Usaha pemilik Notifikasi (BUPN) dengan hasil 37 sarana memenuhi ketentuan (62,71%), suplemen kesehatan berupa Toko, swalayan, distributor, agen dengan sistem MLM (*Multi Level Marketing*) sebanyal 24 dengan hasil 24 Memenuhi ketentuan (MK) dan 70 sarana pangan olahan antara lain distributor pangan, minimarket, swalayan, toko dengan hasil 63 sarana Memenuhi ketentuan (90 %). Hasil pemeriksaan terhadap 313 sarana distribusi Obat dan Makanan menunjukkan

hasil 239 sarana memenuhi ketentuan (76,36%) dan 74 sarana tidak memenuhi ketentuan (23,64%). Persentase tertinggi pada hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan antara lain pada sarana pelayanan kefarmasian Toko Obat dan Apotek yang disebabkan karena proses perpanjangan perijinan yang terlambat oleh pelaku usaha, aspek pengadaan tidak melalui jalur resmi, masih ditemukan Toko Obat dan Apotek yang bertindak sebagai distributor dan penjualan tidak sesuai dengan ketentuan (Obat keras pada toko obat dan obat setelan di Apotek). Pada saat pemeriksaan dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan tindak lanjut berupa peringatan keras.

Selain itu pada sarana distribusi Obat Tradisional dan Kosmetik juga menunjukkan masih banyak yang Tidak memenuhi ketentuan , hal tersebut menunjukkan masih tingginya angka ketidakpatuhan ini dikarenakan belum adanya efek jera kepada pelaku usaha, sehingga masih banyak ditemukan produk tanpa izin edar (TIE) dan kedaluwarsa di pasaran. Pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha terus dilakukan baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat dan pelaku usaha.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 45. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN iv	% REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	%CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	102,433,600	101,433,600	99,57 %	1,08	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena realisasi anggaran sejalan dibandingkan persentase capaian indikator tahun 2024. Penggunaan anggaran untuk pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2024 sebesar 100 %. Upaya untuk mempertahankan pencapaian target kinerja dilaksanakan

dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada sesuai dengan perencanaan yang telah disusun

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Distribusi Obat dan makanan tidak terlepas dari Upaya yang dilakukan oleh BPOM di Surakarta antara lain :

1. KIE yang dilakukan petugas pada saat pemeriksaan kepada pelaku usaha melalui aplikasi BPOM Mobile
2. Sosialisasi yang dilakukan kepada Masyarakat melalui media social dan secara langsung dan penyebaran slogan cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluwarsa) yang masih relevan digunakan sebagai salah satu tools yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa obat dan makanan yang akan di konsumsi aman dan bermutu.
3. Pendampingan berupa Forum komunikasi atau bimbingan teknis dan desk CAPA kepada pelaku usaha dengan melihat *trend analisys* hasil pemeriksaan serta tetap memperhatikan ketersediaan anggaran sehingga dapat dilakukan secara daring dan luring.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Berdasarkan data hasil pemeriksaan sarana distribusi TA 2024, sarana pelayanan kefarmasian berupa Apotek dan Toko Obat serta sarana distribusi obat tradisional dan kosmetika memberikan kontribusi Tidak Memenuhi Ketentuan yang tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat dipertahankan. Upaya peningkatan antara lain :

1. Balai POM di Surakarta melakukan sosialisasi dengan bertindak sebagai narasumber pada kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Organisasi Profesi, memberikan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaaan obat yang benar. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan para pelaku usaha mengetahui bagaimana

cara mengelola obat yang benar sehingga akan meningkatkan persentase distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

2. Upaya untuk meningkatkan angka persentase distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang memenuhi ketentuan, Balai POM di Surakarta juga rutin melakukan KIE kepada masyarakat terkait memilih produk Obat dan Makanan yang aman. Sehingga dengan rutin melakukan edukasi kepada masyarakat, mereka akan pintar dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan dapat memutus rantai demand dari peredaran produk yang TIE

6. Indeks Pelayanan Publik

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 46. Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik	3,55	3,88	109,30	Sangat Baik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
2) Profesionalitas SDM (18%);
3) Sarana Prasarana (15%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) Badan POM dengan kategori nilai:

Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal

1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 - 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3, 01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4, 01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pada triwulan III tahun 2024 telah dilakukan penilaian terhadap UPP Balai POM di Surakarta oleh Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) Badan POM, dengan nilai 3.88 dengan kategori berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 adalah BAIK. Berikut ini adalah hasil evaluasi dari tiap aspek:

Kode	Aspek	Indeks per Aspek
I	Kebijakan Pelayanan	4.86
II	Profesionalitas SDM	3.2
III	Sarana Prasarana	3.74
IV	Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)	4.7
V	Konsultasi dan Pengaduan	3.15
VI	Inovasi	0.5

Capaian Indeks pelayanan Publik tahun 2024 adalah 109,30% dengan kriteria Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 47. Perbandingan Realisasi serta Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	-	-	-
2022	-	-	-

2023	-	-	-
2024	3.55	3.88	109.30

Capaian realisasi Indeks Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Surakarta tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah 109.30% dengan kriteria Tercapai/Melampaui.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 48. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Indeks Pelayanan Publik	4.78	3.88	3.88	4.67

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 4.78 kemudian Balai POM di Tarakan dengan realisasi sebesar 4.67. Dan yang terendah adalah Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Kediri dengan realisasi sebesar 3.88. Balai POM di Surakarta baru ditingkatkan status UPT-nya menjadi Balai pada Oktober 2023 dan mendapatkan IKU IPP pada tahun 2024 dengan target 3.55. Capaian Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Surakarta tahun 2024 sudah baik, yaitu sebesar 109.30.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Indeks Pelayanan Publik merupakan target IKU baru bagi Balai POM di Surakarta di tahun 2024 sebagai UPT Balai POM yang diresmikan pada Oktober 2023. Target IKU Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 dapat tercapai dengan kategori **"BAIK"** karena personil Infokom telah mempelajari juknis secara autodidak dan berkonsultasi secara intensif dengan balai koordinator yaitu Balai Besar POM di Semarang dan Balai Besar/Balai POM

lain yang telah berpengalaman mengampu IKU ini. Sehingga diperoleh perencanaan yang sesuai dengan kapasitas UPT.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik.

Berbagai upaya dilakukan oleh Balai POM di Surakarta untuk mencapai target nilai, yaitu 3,55. Upaya yang dilakukan untuk mendukung penilaian maksimal, antara lain:

1) Melakukan reviu Standar Pelayanan Publik secara berkala kurang dari 1 (tahun), dan mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari berbagai unsur masyarakat.
2) Melakukan SKM setiap bulan untuk mengukur kualitas pelayanan publik.
3) Melakukan publikasi tentang Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan SKM di berbagai media elektronik/non elektronik.
4) Untuk mempertahankan profesionalisme SDM petugas pelayanan publik, secara kontinu memberikan pendidikan/pelatihan untuk peningkatan kompetensi, pemberian beasiswa, coaching/mentoring, capacity building dan mekanisme lainnya untuk memotivasi, meningkatkan kualitas petugas layanan publik, dan konsistensi penerapan budaya pelayanan prima.
5) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti penyediaan minuman dan permen.
6) Memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai timeline, mengoptimalkan penyusunan laporan dan monev pengaduan secara berkala, dll.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 49. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	% REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik	19.350.000	19.342.810	99.96	109.30	0,09	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,48 pada tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai Indeks Pelayanan Publik.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang target kinerja untuk Indeks Pelayanan Publik antara lain Forum Konsultasi Publik dengan berbagai pemangku kepentingan (pelaku usaha, akademisi, lintas sektor, asosiasi, media masa) untuk mendapatkan masukan dan saran tentang Standar Pelayanan Publik. Balai POM di Surakarta juga terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik diantaranya dengan menyediakan berbagai macam alternatif pelayanan publik yang dapat diakses oleh konsumen yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, kondisi sosial, ekonomi, demografi, dll. Selain itu Balai POM di Surakarta juga melakukan survei Indeks Pelayanan Publik secara periodik untuk melihat respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan, serta melakukan tindak lanjut terhadap masukan yang diberikan oleh pelanggan.

g. Upaya peningkatan kinerja

Capaian yang diraih tahun ini merupakan tantangan untuk meningkatkan dan menyempurnakan hasil penilaian UPP di tahun berikutnya. Upaya yang perlu diperhatikan adalah penyamaan persepsi, pemahaman, dan

pemerataan kompetensi petugas pelayanan publik, penyempurnaan sistem informasi/website yang dimiliki, dan perlunya melakukan *benchmarking* (studi tiru) ke unit pelayanan publik lainnya baik swasta atau instansi pemerintah lainnya di bidang pelayanan untuk menambah wawasan kebutuhan pelayanan terkini dan menyempurnakan pelayanan publik yang telah dimiliki.

7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 50. Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	94%	100%	106,38%	Sangat Baik

Perhitungan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi meliputi pangan olahan, OT, dan Kosmetik untuk tahunan adalah jumlah UMKM yang memenuhi standar dibandingkan yang didampingi. Jumlah UMKM Obat Tradisional yang didampingi dan memenuhi standar produksi sejumlah 1 sarana dari 1 sarana yang didampingi, jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi dan memenuhi standar sejumlah 2 sarana dari 2 sarana yang didampingi, dan jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi dan memenuhi standar sejumlah 7 sarana dari 7 sarana yang didampingi. Sehingga Prosentase UMKM yang memenuhi standar = (A + B + C)/3, artinya (100% + 100% + 100%)/3 adalah 100%.

Target capaian indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar pada tahun 2024 adalah 94%, sehingga capaiannya 106,38% Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahunan yaitu dalam kategori **Sangat Baik.**

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2022 – 2023)

Tabel 51. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2024 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2022	77%	100%	129,87%
2023	79%	93,33%	118,14%
2024	94%	100%	106,38

Target Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan % capaian indikator kinerja tahun sebelumnya (2022 – 2023) sudah memenuhi target yang ditetapkan, meskipun secara capaian persentasenya menurun.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara.

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2024 dengan UPT Balai POM Setara.

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	83,33%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik untuk Balai POM di Surakarta tahun 2024 sama dengan Balai POM Tarakan dan Balai POM Kediri. Seluruh UMKM yang didampingi teleh terbit IP CPPOB, rekomendasi CPKB maupun rekomendasi CPOTB. Dan yang terendah adalah Balai POM Mamuju artinya belum tercapai targetnya. Namun secara keseluruhan semua UPT diatas telah tercapai

kinerja untuk pendampingan UMKM dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan target IKU BPOM atau capaian Nasional yang hanya 81%.

d. Analisis penyebab keberhasilan dan/ atau peningkatan kinerja

Balai POM di Surakarta telah berhasil mencapai target persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik. Seluruh target jumlah UMKM yang didampingi telah memenuhi standar, dengan rincian 2 sarana UMKM Obat Tradisional telah terbit rekomendasi CPOTB, 3 sarana UMKM Kosmetik terlah terbit rekomendasi CPKB dan 7 sarana UMKM pangan olahan telah terbit IP CPPOB.

Pendampingan UMKM obat tradisional untuk 2 sarana UMKM telah dilakukan sesuai tahapan proses yang telah ditentukan yaitu telah terlaksananya penetapan target UMKM obat tradisional sesuai perencanaan, Bimtek penerapan CPOTB dan denah bagi UMKM OT sesuai perencanaan, Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (pendampingan) sesuai perencanaan, sertifikasi UMK OT sesuai perencanaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendampingan UMKM yang memenuhi standar pembuatan OT yang baik sesuai perencanaan.

Pendampingan UMKM Kosmetik untuk 3 sarana UMKM telah dilakukan sesuai tahapan proses yaitu telah terlaksananya laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT, bimtek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi) sesuai perencanaan, pelaksanaan pendampingan UMK Kosmetik sesuai perencanaan, dan pelaporan kegiatan pendampingan UMK Kosmetik sesuai perencanaan.

Pendampingan UMKM pangan olahan dengan target 7 sarana UMKM telah dilakukan tahapan proses sesuai ketenuan yaitu telah terlaksananya penetapan UMK pangan olahan target, Bimtek CPPOB sesuai perencanaan, Fasilitasi Pendampingan UMKM produksi pangan olahan sesuai perencanaan, PSB/ Sertifikasi CPPOB sesuai perencanaan, dan pelaporan pendampingan UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan sesuai perencanaan Tahapan pendampingan ini banyak didukung oleh pendampingan melalui zoom meeting sebagai pendampingan awal dan pendampingan secara langsung ke sarana serta dilakukannya *desk* pendampingan. Bulan

September pengadaan *smartphone* untuk layanan sertifikasi sangat membantu dalam pendampingan untuk UMK yang menghendaki layanan melalui daring.

e. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 53. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIEN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	35.841.600	35.829.306	99,97	106,38	0,06	Efisien

Berdasarkan tabel diatas bahwa pecapaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik terhadap penggunaan sumber daya adalah efisien. Balai POM di Surakarta telah melakukan kegiatan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara baik dan benar sehingga bisa mencapai nilai Efisien

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mendukung pelaksanaan pendampingan UMKM ini dilakukan :

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi tiap kegiatan yang diselenggarakan dan dilaporkan dalam setiap bulan di rapat progresif
2. Meningkatkan kompetens petugas bagian sertifikasi
3. Melakukan program pendampingan lebih terpadu yang dilakukan secara rutin
4. Menjalin kerjasama dengan Lintas sektor yang lebih erat dalam rangka menyebarkan informasi registrasi produk dan menjaring pelaku usaha yang berminat mendaftarkan produknya

5. Pendampingan komprehensif UMKM yang sudah masuk system e-sertifkasi hingga terbit sertifikat CPOTB, CPKB atau Izin Penerapan CPPOB

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja mendukung persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2024 dilakukan :

1. Pendampingan tetap dilakukan secara menyeluruh bagi UMKM yang akan berkonsultasi dengan adanya *Desk* Sertifikasi dan bagi UMKM yang belum memenuhi standar
2. Dilanjutkan Layanan Tatap Muka Sertifikasi di Balai POM di Surakarta setiap hari Senin dan Jum'at
3. Melakukan sertifikasi/ audit lapangan bagi UMKM yang belum dikunjungi
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas UMKM yang didampingi

8. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 54. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota	95,00	104,84	110,36	Sangat Baik

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada :

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota. TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
2. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
   a. TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
   b. Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Kabupaten/kota dalam kegiatan KIE Keamanan Pangan dan Fortifikasi Pangan
3. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.
   a. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
   b. Peran UPT antara lain:
      - menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Nonfisik BOK POM tahun n+1 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
      - pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM;
      - monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu;
      - monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM.

Perhitungan target dan realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan dan

Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota bersifat kumulatif dan dihitung di akhir tahun dengan target tahunan 95 % dan hasil capaian di akhir Tahun 2024 yaitu 95% dengan % Capaian sebesar 100%. Hingga Bulan Desember 2024 sudah dilakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Aspek TKPPOM
    1. Keterlibatan Balai POM dalam SK TKPPOM Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.
    2. Sidak Obat dan Makanan Ilegal Oleh TKPPOM di Kota Surakarta pada tanggal 28 Maret 2024
    3. Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri di bersama Dinas Kesehatan Kab Karanganyar tanggal 20 Maret 2024.
    4. Desk Penilaian Mandiri Pengawasan PIRT Pre dan Post Market untuk Kabupaten Sragen tanggal 14-15 Maret 2024
    5. Advokasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen terkait DAK, TKPPOM dan PJAS tanggal 19 Februari 2024
    6. Sidak Obat dan Makanan di pasar karangpandan dan pasar bejen kabupaten karanganyar tanggal 4 April 2024.
    7. Visitasi PMI Kabupaten Karanganyar bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar tanggal 28 Mei 2024.
    8. Koordinasi terkait pembentukan TKPPOM Kabupaten Sragen bersama Baperida Kabupaten Sragen tanggal 24 Juni 2024.
    9. Koordinasi terkait TKPPOM dengan Kabupaten Wonogiri tanggal 16 Juli 2024.
    10. Koordinasi terkait TKPPOM dengan Dinas Kesehatan dan Baperida Kab Sragen 14 Oktober 2024.
    11. Sidak Saryanfar Di Kota Surakarta 10 Oktober 2024.
    12. Sidak Obat dan Makanan Ilegal di Kabupaten Sukoharjo 29 November 2024
2. Aspek TPPS
    a. KIE Keamanan Pangan di Kantin Sekolah di Kabupaten Wonogiri tanggal 28 Maret 2024.
    b. Koordinasi dan Audiensi dengan TPPS Kabupaten Karanganyar terkait Pangan Fortifikasi tanggal 19 April 2024.

c. Koordinasi dan Audiensi dengan TPPS Kota Surakarta terkait pangan Fortifikasi, keamanan Pangan dan Intervensi Serentak Penanganan Stunting (ISPS) tanggal 21 Juni 2024.
d. Koordinasi dan Audiensi dengan TPPS Kabupaten Sragen terkait pangan Fortifikasi, keamanan Pangan dan Intervensi Serentak Penanganan Stunting (ISPS) tanggal 24 Juni 2024.
e. Laporan capaian hasil pengawasan sarana distribusi pangan dalam rangka pengisian capaian indikator persentase sarana fortifikasi yang diperiksa tanggal 4 Juli 2024
f. Koordinasi terkait TPPS dan Fortifikasi Pangan dengan Kabupaten Wonogiri tanggal 16 Juli 2024.
g. Rapat Penajaman capaian indikator percepatan penurunan stunting oleh Bappeda Kota Surakarta tanggal 22 Agustus 2024.
h. Koordinasi terkait stunting di kab sragen 14 Oktober 2024.
i. KIE Stunting dan KP SMAN 1 Karangpandan 26 November 2025.
j. KIE Stunting dan KP di SMPN 1 Sukoharjo 16122024 2. Audiensi dan Koordinasi dengan TPPS Kab Sukoharjo 17122024

3. Aspek DAK
   a. Verifikasi pertimbangan lokus DAK N+1 untuk tahun 2025 di wilayah kerja Balai POM di Surakarta maka diusulkan 4 Kabupaten Kota yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri dengan justifikasi bahwa pernah memiliki pengalaman mendapatkan DAK NF POM, Sumber Daya Manusia memadai dan komunikasi serta koordinasi dengan Balai POM berjalan baik.
   b. Rapat Persiapan Pengawasan PIRT di Dinas Kesehatan Kota Surakarta tanggal 22 Februari 2024
   c. Rapat Pengkajian PIRT di Dinas Kesehatan Kota Surakarta tanggal 29 Februari 2024.
   d. Desk Penilaian Mandiri Pengawasan PIRT Pre dan Post Market untuk Kabupaten Wonogiri tanggal 14-15 Maret 2024
   e. Monitoring dan Evaluasi Capaian DAK NF POM periode Triwulan 1 di Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri tanggal 28 Maret 2024.

f. Monev Pengkajian PIRT oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta tanggal 22 April 2024.
g. Rapat Persiapan Pengawasan Saryanfar bersama Dinas Kesehatan Kota Surakarta tanggal 18 April 2024.
h. Rapat Perisapan Bimtek Saryanfar bersama Dinas Kesehatan Kota Surakarta tanggal 20 Mei 2024.
i. Narasumber Bimtek Saryanfar bersama Dinas Kesehatan Kota Surakarta tanggal 19 Juni 2024
j. Rapat Persiapan Pengawasan Saryanfar bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tanggal 14 Juni 2024
k. Rapat Persiapan Bimtek dan Pengawasan Saryanfar bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 25 Juni 2024.
l. Monitoring dan Evaluasi Capaian DAK NF POM periode Triwulan II di Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri tanggal 28 Juni 2024.
m. Laporan Hasil Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian tahun 2021-2024 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar tanggal 4 Juli 2024.
n. Koordinasi terkait pelaksanaan DAK dengan Kabupaten Wonogiri tanggal 16 Juli 2024.
o. Narasumber Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Penanggung Jawab IRTP di Kab. Wonogiri 30 Juli 2024.
p. Narasumber Bimbingan Teknis Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Wonogiri tanggal 26 Agustus 2024.
q. Narasumber Bimtek CPPOB di Kota Surakarta tanggal 27 Agustus 2024.
r. Narasumber Bimbingan Teknis Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Wonogiri tanggal 4 September 2024.
s. Narsum PKP dinas kesehatan kota surakarta 31 Oktober 2024
t. Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Saryanfar di Dinkes Kota Surakarta 17 Oktober 2024
u. Monitoring dan Evaluasi Capaian DAK NF POM periode Triwulan III di Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

v. Monitoring dan Evaluasi Capaian DAK NF POM periode Triwulan IV di Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.
w. Narasumber Bimtek Saryanfar di Kab Karangnanyar 1 s.d 3 Oktober 2024.
x. Rapat TL Hasil Pengawasan Penandaan dan Pengujian Sampel di Dinkes Kab Karanganyar 14 November 2024.
y. Rapat TL Hasil Iklan di Dinkes Kab Karanganyar 28 November 2024.
z. Rapat Hasil Pengawasan Fasyanfar di Dinkes Kab Karanganyar 04 Desember 2024.
aa. Narasumber PV Saryanfar Dinkes Sukoharjo 23 Oktober 2024.
bb. Rapat Evaluasi Pengawasan fasyanfar Dinkes Sukoharjo 17 Oktober 2024.
cc. Koordinasi dan Sharing Peniaian Mandiri CPPOB-IRTP Dinkes Wonogiri 21 November 2024
dd. Bimtek CAPA Fasyanfar Dinkes Wonogiri 28 Noevmber 2024.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 55. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	95,00	104,84	110,36

Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan dan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota merupakan indikator kinerja baru di Tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian di tahun 2021 sampai dengan

tahun 2023. Namun capaian di akhir tahun sudah melebihi target yaitu 104,84% dengan % capaian 110,36%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara.

Tabel 56. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2024 dibandingkan dengan Balai POM yang setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota	99,86	98,17	104,84	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan dan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 104,84 % kemudian Balai POM di Tarakan dengan realisasi sebesar 100 %. Dan yang terendah adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 99,86%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Balai POM di Surakarta berhasil mencapai target Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan dan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota tahun 2024. Analisa penyebab berhasilnya indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan dan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2024 ialah sebagai berikut :

1. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Balai POM di Surakarta dengan Pemerintah Daerah di wilayah kerja Balai POM dan Unit Pusat yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga Balai POM di Surakarta selalu dilibatkan dalam kegiatan serta pemerintah daerah juga mau dilibatkan dalam kegiatan yang dikelola oleh Badan POM.
2. Telah tersediannya saluran atau wadah komunikasi yang intensif antara Balai POM di Surakarta dengan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan sebagai penerima DAK NF POM serta dengan unit Pusat Biro Perencanaan Keuangan.
3. Dukungan dari Pimpinan Unit yaitu Kepala Balai POM di Surakarta baik dalam berkoordinasi dengan Pimpinan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam Aspek TKPPOM, Aspek TPPS dan Aspek DAK.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 57. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	% REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota	12.804.200	12.749.118	99.57	110,36	0,11	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,11 pada tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran

yang digunakan dengan pencapaian nilai Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan dan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota..

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang menunjang keberhasilan indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan dan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 ialah sebagai berikut :

1) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan DAK NF POM tahun 2024 dengan Dinas Kesehatan secara berkala.
2) Pembinaan dan Pendampingan pelaksanaan DAK NF POM tahun 2024 dengan terlibat pada rapat persiapan kegiatan seperti pada rapat persiapan pengawasan PIRT oleh Dinas Kesehatan.
3) Berkoordinasi dengan TPPS kabupaten/kota dalam pengawasan pangan fortifikasi dan keamanan pangan daerah
4) Selalu berperan serta dalam kegiatan sidak obat dan makanan ilegal oleh TKPPOM kabupaten/kota melalui kegiatan pengujian cepat bahan berbahaya pada pangan dan pembinaan pada pelaku usaha terkait pengelolaan obat.

g. Upaya peningkatan kinerja

Upaya perbaikan/ rekomendasi untuk meningkatkan kinerja adalah dengan selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan dan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

SASARAN STRATEGIS 3
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE yang dilakukan Badan POM meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

Tabel 58. Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	96	96,6	100,63	Sangat Baik

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan diperoleh dari hasil survei dengan responden masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media selama tahun berjalan. Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE.
2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima.
3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE.
4) Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Responden survei adalah individu yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Balai POM di Surakarta sepanjang tahun 2024.

Survei dilakukan secara daring (*online*) dengan memberikan tautan survei. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, Balai POM di Surakarta melakukan survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 terhadap 160 responden dan menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 96,6 (data: evaluasikie.pom.go.id). Dengan demikian tingkat efektivitas KIE dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 100,63% atau kategori **"SANGAT BAIK"**.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 59. Perbandingan Realisasi serta Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	89	90,24	101,39
2022	90,80	91,09	100,32
2023	92,60	95,14	102,74
2024	96,00	96,60	100,63

Berdasarkan data pada tabel di atas, tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dari tahun 2021 hingga tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan di masing-masing tahun dengan capaian **"SANGAT BAIK"**. Realisasinya pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 60. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,42	93,74	96,6	93,01

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi tertinggi diperoleh Balai POM di Surakarta dan yang terendah adalah Balai POM di Tarakan. Dengan hasil tersebut, Balai POM di Surakarta perlu mempertahankan agar realisasi yang diperoleh sama baiknya.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Berdasarkan hasil survei tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan triwulan tahun 2024, diperoleh indeks sebesar 96,6 dan capaian **memenuhi target** yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik.** Indeks 96,6 tersebut merupakan kontribusi empat aspek yaitu aspek ragam kegiatan 97,34; aspek pemahaman 98,51; aspek manfaat 97,81; dan aspek minat 89,84. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang memberikan nilai tinggi sebagai pembentuk indeks efektivitas KIE. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa KIE yang disampaikan Balai POM di Surakarta mudah dipahami dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan audiens.

Hal-hal yang mempengaruhi capaian target kinerja adalah:

1) Konsistensi dalam merencanakan konsep, ragam, dan konten/materi kegiatan KIE yang terstruktur, sistematis, dan menarik. Perencanaan ini termasuk pemilihan media yang diminati dan yang sesuai untuk seluruh segmen masyarakat (seperti usia, domisili perkotaan/pedesaan, tren terkini, dll), baik menggunakan media langsung. media nonelektronik, maupun media elektronik.
2) Penambahan variasi kegiatan khususnya pada saat KIE secara langsung (target peserta yang besar), seperti mengadakan kuis mentimeter untuk remaja, pelajar, dan mahasiswa.
3) Perencanaan yang dilakukan tidak hanya dilakukan di satu daerah, tetapi dilakukan pemerataan ke seluruh wilayah dengan berbagai ragam media KIE yang digunakan.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 61. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	%REALISASI ANGGARAN 2024	%CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	47.944.400	47.929.514	99,97	100,63	0,01	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,01 pada akhir Tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dan perwujudan upaya peningkatan kemandirian masyarakat akan produk obat dan pangan yang aman dan bermutu.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 sebesar 96,6 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media. Media yang memberikan nilai indeks tertinggi sebesar 100 pada tahun 2024 antara lain *talkshow* radio, pameran, dan brosur. Hal tersebut menunjukkan bahwa Balai POM di Surakarta harus mempertahankan kualitas KIE pada media tersebut.

g. Upaya peningkatan kinerja

Berdasarkan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media tahun 2024, menunjukkan KIE melalui media *billboard*, media *online*, dan media sosial masih menunjukkan nilai indeks terendah pada kisaran 92—95. Oleh karena itu, kedepannya perlu peningkatan kualitas dan kuantitas KIE pada ketiga media tersebut dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan ketersediaan anggaran agar KIE yang diberikan dapat meningkatkan minat, manfaat, dan pemahaman masyarakat.

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 62. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	8	8	100	Baik

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada tahun 2024 akan dilaksanakan di Kabupaten Sragen. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 8 sekolah di Kabupaten Sragen. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Balai POM di Surakarta akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian komunitas sekolah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan PJAS yang dikonsumsi dalam kondisi aman, bermutu, dan bergizi. Intervensi keamanan PJAS dilakukan melalui semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Sekolah yang diintervensi pada tahun 2024 ini terdiri dari SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Sragen.

Hingga akhir tahun 2024, seluruh tahapan program telah dilaksanakan, yaitu:

1) Koordinasi program PJAS dengan Bapperida Kabupaten Sragen, Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen pada tanggal 23 dan 24 Januari 2024.
2) Audiensi program PJAS dengan Bupati Sragen pada tanggal 19 Februari 2024.
3) Kegiatan Advokasi Lintas Sektor PJAS pada tanggal 7 Maret 2024 (10%).
4) Sosialisasi Keamanan Pangan telah dilaksanakan pada 24 April 2024.
5) Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah telah dilaksanakan pada 22 Mei 2024.
6) Pemberian Paket Edukasi kepada delapan sekolah target telah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah pada 22 Mei 2024.
7) Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah dilaksanakan pada bulan Juli--September 2024.
8) Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman pada 13--14 November 2024.

Seluruh sekolah target intervensi tahun 2024 sebanyak delapan sekolah berhasil mendapatkan sertifikat penghargaan sekolah yang memiliki komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 63. Perbandingan Realisasi serta Capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2024 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	8	8	100.00

Capaian realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai POM di Surakarta tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah 100.00% dengan kriteria Tercapai/Melampaui.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	83	6	8	39

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi 83 sekolah kemudian Balai POM di Tarakan dengan realisasi 39 sekolah, Balai POM di Surakarta dengan realisasi 8 sekolah dan terakhir Balai POM di Kediri dengan realisasi sebesar 6 sekolah. Seluruh UPT dapat memenuhi target yang diberikan oleh pusat. Perbedaan jumlah realisasi yang signifikan dikarenakan realisasi jumlah sekolah yang diintervensi merupakan jumlah akumulasi selama tahun 2019--2024. Balai POM di Surakarta dengan peningkatan status menjadi Balai pada Oktober 2023 baru mendapatkan IKU pada tahun 2024 dengan target 8 sekolah dan berhasil dipenuhi.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman merupakan target IKU baru bagi Balai POM di Surakarta di tahun 2024 sebagai UPT Balai POM yang diresmikan pada Oktober 2023. Namun target jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai POM di Surakarta dapat tercapai dengan kategori "BAIK" karena personil Infokom telah mempelajari juknis secara autodidak dan berkonsultasi secara intensif dengan balai koordinator yaitu Balai Besar POM di Semarang yang telah berpengalaman mengampu IKU ini. Sehingga diperoleh perencanaan yang sesuai dengan kapasitas UPT.

Program sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2024 dilakukan di Kabupaten Sragen yang merupakan lokus kegiatan Keterpaduan Keamanan Pangan Tahun 2024 oleh Balai POM di Surakarta. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Balai POM di Surakarta telah melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas yang ada di masing-masing sekolah sehingga mampu terbentuk komunitas sekolah yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu di lingkungan sekolah.

Keberhasilan program didukung oleh koordinasi yang baik antara Balai POM di Surakarta dengan OPD terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Kementerian Agama) di Kabupaten Sragen, sehingga tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yaitu pada Triwulan II. Selain itu, keberhasilan juga didukung komunikasi yang efektif dengan Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam melakukan Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah. Pada tahap akhir program, dilakukan kegiatan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman terhadap delapan sekolah target intervensi tahun 2024. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Diharapkan sekolah yang diintervensi dengan program PJAS Aman dapat meneruskan program ini secara

berkesinambungan dengan melahirkan inovasi-inovasi yang dapat dilaksanakan oleh kader keamanan pangan sekolah junior (siswa sekolah) dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan program PJAS. Dengan demikian penerima manfaat dari program PJAS akan semakin luas dan berkembang.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 65. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	% REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	231.941.000	231.929.125	99.99	100	0,00	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,00 pada tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya dilakukan oleh Balai POM di Surakarta untuk mencapai target IKU, yaitu 8 sekolah. Koordinasi menjadi kegiatan kunci dalam keberhasilan pencapaian target tahun 2024. Balai POM di Surakarta sebagai pihak eksternal yang akan mengintervensi komunitas di daerah tertentu tentunya membutuhkan dukungan dan komitmen dari pemda untuk kelancaran dan keberhasilan program di daerah tersebut. Pada akhir

kegiatan juga dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi untuk mendorong pihak pemda agar dapat melakukan replikasi program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayahnya. Semakin banyak sekolah yang menerapkan program tersebut maka jangkauan keamanan pangan di lingkungan sekolah akan semakin luas.

g. Upaya peningkatan kinerja

Pelaksanaan program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2024 telah dilaksanakan di Kabupaten Sragen. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas antara lain guru, siswa, orang tua siswa, penjaja kantin sekolah, dan penjaja makanan di luar sekolah. Agar kegiatan PJAS dapat tetap berlangsung dalam jangka waktu lama dan meluas ke sekolah lainnya maka diperlukan upaya dan strategi. Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah
2) Meningkatkan keterlibatan Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kantor kementerian Agama dalam kegiatan
3) Mendorong pemda dan sekolah yang telah diintervensi untuk melakukan replikasi kegiatan
4) Mendorong Pemda untuk memberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah menerapkan keamanan pangan
5) Mendorong Dinas Kesehatan agar lebih intensif melaksanakan pengawalan keamanan pangan di sekolah

3. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 66. Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Desa Pangan Aman	1	1	100	Baik

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan

pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kemanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada tahun 2024 akan dilaksanakan di Kabupaten Sragen. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 8 sekolah di Kabupaten Sragen. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Balai POM di Surakarta akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas-komunitas yang ada di masing masing pasar, desa, dan sekolah sampai akhirmya terbentuk komunitas mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, dll.

Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapperida, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus

desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survei usulan lokus dari OPD.

Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Balai POM di Surakarta. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip-prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui *sampling* dan uji kandungan bahan berbahaya pada pangan menggunakan *rapid test*. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari Program Keterpaduan Keamanan Pangan.

Setelah semua tahapan di atas selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan mengetahui penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Hal yang sangat diharapkan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika pemerintah daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan ini ke desa, pasar atau sekolah yang lain.

Kriteria desa yang diintervensi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman oleh Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah:

1) Kepala Desa/Lurah mempunyai komitmen untuk melaksanakan program keamanan pangan secara berkelanjutan.

2) Mempunyai potensi untuk pengembangan ekonomi desa melalui program keamanan pangan antara lain Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), warung/toko/ritel pangan desa.
3) Memiliki program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), terutama di bidang pangan.
4) Mempunyai potensi untuk pengembangan wisata.
5) Mempunyai potensi untuk pengembangan industri berbasis pangan lokal.
6) Mempunyai potensi sumber daya pangan lokal.
7) Membutuhkan bantuan perbaikan keamanan pangan terkait kasus stunting, penyakit akibat pangan (*food borne diseases*), termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.
8) Memiliki program yang dapat disinergikan dan dikolaborasikan dengan program "Keamanan Pangan Desa" yang akan dilaksanakan, antara lain Rumah Desa Sehat, Pekarangan Pangan Lestari, Kampanye Destinasi Wisata, Kampung Keluarga Berkualitas, Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal.
9) Belum pernah diintervensi oleh UPT BPOM.

Berdasarkan rekomendasi atau usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sragen dan hasil survei, kajian potensi dan kondisi desa oleh Balai POM di Surakarta maka ditetapkan desa intervensi tahun 2024 adalah Desa Sukorejo, Kabupaten Sragen. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Hingga akhir tahun 2024, seluruh tahapan program Desa Pangan Aman telah dilaksanakan:

1) Koordinasi program Desa Pangan Aman dengan Bapperida, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen tanggal 23 Januari 2024 (2%).
2) Pelaksanaan survei desa tanggal 6 Februari 2024 (2%).

3) Audiensi program Desa Pangan Aman dengan Bupati Sragen tanggal 19 Februari 2024 (5%).
4) Pelaksanaan Advokasi Kelembagaan Desa tanggal 7 Maret 2024 (8%).
5) Penyusunan laporan Advokasi Kelembagaan Desa tanggal 1 April 2024 (5%).
6) Proses pengadaan *gimmick*, *rapid test*, dll yang dimulai pada bulan April 2024 (1%).
7) Persiapan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) yang dimulai pada bulan Mei 2024 (3%).
8) Pelaksanaan Pelatihan KKPD tanggal 6-7 Juni 2024 (8%).
9) Pemberian Produk Informasi Keamanan Pangan kepada KKPD tanggal 6 Juni 2024 (2%).
10) Persiapan Bimtek Komunitas Keamanan Pangan Desa yang dimulai pada bulan Juni 2024 (3%).
11) Penyerahan *gimmick* untuk komunitas desa pangan aman pada 9 Juli 2024 (2%).
12) Pelaporan Pelatihan KKPD pada 13 September 2024 (6%).
13) Pelaksanaan Bimtek Komunitas pada 9 Juli 2024 (14%).
14) Pelaksanaan Fasilitasi Keamanan Pangan Desa pada 10 Juli 2024 (11%).
15) Pelaksanaan Pengawasan Pre-Intervensi Keamanan Pangan Desa pada 10 Juli 2024 (5%).
16) Pelaksanaan Pengawasan Post-Intervensi Keamanan Pangan Desa pada 17 Oktober 2024 (6%).
17) Pelaksanaan Monev Program Desa Pangan Aman pada 5 November 2024 (12%).
18) Penyusunan dan pengiriman Profil Lomba Desa Pangan Aman pada 31 Desember 2024 (5%).

Sehingga diperoleh jumlah desa pangan aman sebanyak 1 desa dengan capaian 100% dan kategori **"BAIK".**

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 67. Perbandingan Realisasi serta Capaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2024 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	1	1	100

Balai POM di Surakarta baru ditingkatkan klasifikasi UPT-nya menjadi Balai POM pada Oktober 2023 serta baru mendapatkan IKU dan program Jumlah Desa Pangan Aman pada tahun 2024 dengan target 1 desa. Sehingga sepanjang periode 2021—2024, Balai POM di Surakarta baru melakukan intervensi program ke 1 desa yaitu Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 68. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Jumlah Desa Pangan Aman	31	1	1	7

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Jumlah Desa Pangan Aman yang tertinggi adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi 31 desa yang merupakan akumulasi desa intervensi tahun 2019—2024. Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Kediri merupakan Balai POM dengan realisasi terendah karena kedua UPT tersebut baru ditingkatkan klasifikasi UPT-nya pada Oktober 2023 serta diberikan target IKU dan program Jumlah Desa Pangan Aman pada tahun 2024 dengan target masing-masing 1 desa.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Jumlah desa pangan aman merupakan target IKU baru bagi Balai POM di Surakarta di tahun 2024 sebagai UPT Balai POM yang diresmikan pada Oktober 2023. Target IKU jumlah desa pangan aman tahun 2024 dapat tercapai dengan kategori **"BAIK"** karena personil Infokom telah mempelajari juknis secara autodidak dan berkonsultasi secara intensif dengan balai koordinator yaitu Balai Besar POM di Semarang dan Balai Besar/Balai POM lain yang telah berpengalaman mengampu IKU ini. Sehingga diperoleh perencanaan yang sesuai dengan kapasitas UPT.

Selain itu, Balai POM di Surakarta langsung berinisiatif melakukan kerja sama dan koordinasi dengan OPD terkait (Bapperida, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Kesehatan) di Kabupaten Sragen pada tanggal 23 Januari 2024. Selanjutnya, Balai POM di Surakarta memperoleh rekomendasi lokus intervensi dari Bapperida Kabupaten Sragen melalui surat No. 500.1.4.3/369/23/2024 Tanggal 2 Februari 2024 tentang Usulan Lokus Intervensi Program Keterpaduan Keamanan Pangan. Terhadap usulan tersebut telah dilakukan juga survei ke usulan lokus desa secara langsung pada tanggal 6 Februari 2024 sehingga diperoleh informasi riil kondisi dan potensi desa. Pada akhirnya, hasil survei tersebut mengerucutkan target intervensi desa pangan aman tahun 2024 adalah Desa Sukorejo dan telah disampaikan pada saat audiensi dengan Ibu Bupati Sragen tanggal 19 Februari 2024. Hasil audiensi tersebut adalah adanya dukungan yang berarti dari Ibu Bupati sehingga semakin menggerakan OPD di Kabupaten Sragen untuk responsif terhadap pelaksanaan Program Keterpaduan Keamanan Pangan di Kabupaten Sragen. Termasuk saat penyelenggaraan Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan tanggal 7 Maret 2024, Ibu Bupati seyogyanya hadir secara langsung namun karena adanya tugas mendadak yang sama penting dan tidak dapat ditinggalkan maka kehadiran beliau didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Dari forum advokasi diperoleh komitmen Pemda Kabupaten Sragen terhadap Program Keterpaduan Keamanan Pangan.

Setelah advokasi selesai dilaksanakan, kemudian disusun laporan Advokasi Kelembagaan Desa. Proses pengadaan *gimmick*, *rapid test*, dll yang dimulai pada bulan April 2024, dimulai dengan membuat inventarisasi kebutuhan, anggaran, dan keperluan berupa produk informasi keamanan pangan untuk kader dan komunitas desa serta *rapid test* kimia.

Persiapan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) yang dimulai pada bulan Mei 2024 dengan menyusun daftar materi dan narasumber sesuai juknis. Pelatihan KKPD dilaksanakan tanggal 6-7 Juni 2024 dengan narasumber dari Balai POM di Surakarta dan Sanitarian Puskesmas Sambirejo yang membina Desa Sukorejo. KKPD yang diundang mengikuti pelatihan adalah 15 orang warga Desa Sukorejo yang terdiri dari 1 laki-laki dan 14 perempuan dengan rincian: 11 kader keluarga, 1 kader sekolah, dan 3 kader masyarakat. KKPD yang diundang mengacu Keputusan Kepala Desa Sukorejo No. 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Keamanan Pangan Desa (KPD) dan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) Sukorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Pada saat Pelatihan KKPD, Balai POM di Surakarta juga menyerahkan Produk Informasi Keamanan Pangan (PIKP) meliputi poster keamanan pangan, permainan ular tangga keamanan pangan, *flipchart*/lembar balik keamanan pangan, kaos kader, *totebag,* papan jalan, *notebook*, dan satu *set rapid test kit* kimia.

Setelah KKPD memperoleh pelatihan, tahapan selanjutnya adalah Bimtek Komunitas Keamanan Pangan Desa dengan narasumber KKPD Sukorejo. Persiapan telah dilakukan dengan bersurat dan berkomunikasi dengan Tim KPD untuk memberikan usulan 52 komunitas desa yang akan diundang sesuai juknis serta KKPD yang akan ditugaskan sebagai narasumber dan panitia bimtek komunitas.

Dari persiapan tersebut, bimtek komunitas telah terlaksana dengan baik dan lancar pada tanggal 9 Juli 2024 beserta penyerahan *gimmick* untuk komunitas desa pangan aman. Pada hari kedua dilanjutkan dengan Fasilitasi dan Pengawasan Pre-Intervensi Keamanan Pangan Desa pada 10 Juli 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi komunitas secara

langsung untuk praktik keamanan pangan dan mendapat gambaran awal terkait keamanan pangan yang ada di desa melalui *sampling* dan pengujian.

Untuk mengetahui keberhasilan fasilitasi keamanan pangan, dilakukan Pengawasan Post-Intervensi Keamanan Pangan Desa pada 17 Oktober 2024. terdapat penurunan produk pangan olahan tidak memenuhi syarat (TMS) di Desa Sukorejo dari 2 produk atau 16,67% TMS (pre-intervensi) menjadi 1 produk atau 9,09% TMS. Kepada pelaku usaha yang menggunakan produk TMS telah dilakukan fasilitasi kembali dan rekomendasi untuk menggunakan produk pangan olahan yang aman. Selain itu, terdapat 2 pelaku usaha PIRT yang telah berhasil mendapat SPP-IRT.

Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi program, telah dilaksanakan Monev Program Desa Pangan Aman pada 5 November 2024. Progres, keberhasilan, dan kendala yang dihadapi disampaikan dalam forum ini. Pemerintah desa juga telah menetapkan rencana aksi mandiri program keamanan pangan desa untuk tahun 2025. Desa Sukorejo merupakan kanditat satu-satunya dari Balai POM di Surakarta untuk diikutsertakan dalam Lomba Desa Pangan Aman, Penyusunan dan pengiriman Profil Lomba Desa Pangan Aman telah dilakukan pada 31 Desember 2024.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 69. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	%REALISASI ANGGARAN 2024	%CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Jumlah Desa Pangan Aman	138.313.000	138.303.715	99,99	100	0,00	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,00 pada Tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian Jumlah Desa Pangan Aman dan

perwujudan upaya peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku komunitas desa terhadap keamanan pangan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Persiapan kegiatan serta koordinasi yang baik dengan pemerintah desa, OPD terkait, TKPD, dan KKPD menjadi kegiatan kunci dalam keberhasilan pencapaian target tahun 2024. Balai POM di Surakarta mempersiapkan seluruh tahapan program mulai dari advokasi hingga lomba desa pangan aman, bukan hanya dengan internal UPT namun juga bekerja sama dengan TKPD Sukorejo, KKPD Sukorejo, OPD terkait (Dinkes, Dinas PMD, DKP3, dll), dan Puskesmas Sambirejo.

g. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa upaya yang dapat direkomendasikan agar kegiatan pengawalan keamanan pangan di desa dapat terlaksana lebih baik dan memenuhi batas waktu sesuai juknis, serta kegiatan program Desa Pangan Aman dapat dipertahankan dengan baik dan menyebar ke desa lainnya antara lain sebagai berikut:

1) Perlu adanya kerja sama intensif dengan Tim KPD (perangkat desa dan tokoh masyarakat desa yang berpengaruh) dalam mengawal rencana aksi keamanan pangan desa tahun 2025 agar program tidak ada berlangsung di tahun 2024 saja. KKPD juga perlu didorong untuk terus menyampaikan informasi keamanan pangan secara luas pada berbagai kegiatan desa.
2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.
3) Mendorong agar pemerintah daerah memasukkan kegiatan keamanan pangan dalam perencanaan anggaran desa dan melakukan replikasi kegiatan.
4) Mendorong pemerintah daerah dan desa untuk memasukkan kegiatan keamanan pangan dalam kegiatan lain yang telah dilaksanakan desa (sinergitas kegiatan keamanan pangan dengan kegiatan lain).

4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 70. Realisasi Persentase Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100%	Baik

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK).

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada tahun 2024 dilaksanakan di Kabupaten Sragen. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi pemasok dan permintaan.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi pemasok dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi permintaan dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media

komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Hingga akhir tahun 2024, progres program PPABK yang telah dilaksanakan adalah:

1) Koordinasi program PPABK dengan Bapperida Kabupaten Sragen, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen pada tanggal 24 dan 25 Januari 2024 (2%).
2) Survei Pasar dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sragen, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sragen, dan pengelola pasar pada 15 dan 16 Februari 2024 dan pembuatan laporan survei pasar (5%).
3) Audiensi program PPABK dengan Bupati Sragen pada tanggal 19 Februari 2024 (5%).
4) Kegiatan Advokasi Lintas Sektor PPABK pada tanggal 7 Maret 2024 (8%).
5) Pelaporan kegiatan Advokasi PPABK telah dikumpulkan ke Direktorat PMPU-PO pada 4 April 2024 (5%).
6) Proses pengadaan perlengkapan peserta Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar mulai dilakukan pada bulan Mei 2024 (3%).
7) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar pada 26 Juni 2024 (9%)
8) Pelaksanaan Sampling dan Pengujian tahap 1 pada 26 Juni 2024 sebanyak 40 sampel dari total 100 sampel (3%)
9) Pembuatan laporan Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar (5%)
10) Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Tahap 1 terhadap 60 sampel pada tanggal 3 dan 16 Juli 2024 (9%)
11) Persiapan pelaksanaan Penyuluhan Pedagang Pasar di bulan Juli 2024 (2%)
12) Persiapan pelaksanaan Kampanye Komunitas Pasar di bulan Juli 2024 (2%)
13) Pembuatan laporan Sampling dan Pengujian Tahap 1 (5%)

14) Pelaksanaan Penyuluhan Pedagang Pasar pada 19 Agustus 2024 (7%)
15) Pelaksanaan Kampanye Komunitas Pasar pada 19 Agustus 2024 (7%)
16) Pembuatan laporan dan pelaporan Penyuluhan Pedagang Pasar (3%)
17) Pembuatan laporan dan pelaporan Kampanye Komunitas Pasar (3%)
18) Persiapan kegiatan Sampling dan Pengujian Tahap 2 (3%)
19) Pelaksanaan kegiatan Sampling dan Pengujian Tahap 2 (9%)
20) Pengujian kegiatan Sampling dan Pengujian Tahap 2 (3%)
21) Pelaporan kegiatan Sampling dan Pengujian Tahap 2 (2%)

Dari tahapan-tahapan tersebut diperoleh jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sejumlah 1 (satu) pasar dengan capaian 100.00% dan kategori **"BAIK".** Hasil tersebut sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 71. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	1	1	100%

Balai POM di Surakarta baru ditingkatkan klasifikasi UPT-nya menjadi Balai POM pada Oktober 2023 serta baru mendapatkan IKU dan program Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2024 dengan target 1 pasar. Sehingga sepanjang periode 2021—2024, Balai POM di Surakarta baru melakukan intervensi program ke 1 pasar yaitu Pasar Sukowati, Kabupaten Sragen.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 72. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024 Tahun – Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	5	1	1	5

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang tertinggi adalah Balai POM di Mamuju dan Balai POM Tarakan dengan realisasi 5 pasar yang merupakan akumulasi pasar intervensi tahun 2019—2024. Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Kediri merupakan Balai POM dengan realisasi terendah karena kedua UPT tersebut baru ditingkatkan klasifikasi UPT-nya pada Oktober 2023 serta diberikan target IKU dan program Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2024 dengan target masing-masing 1 pasar.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) merupakan target IKU baru bagi Balai POM di Surakarta di tahun 2024 sebagai UPT Balai POM yang diresmikan pada Oktober 2023. Namun target jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai POM di Surakarta dapat tercapai dengan kategori "BAIK" karena personil Infokom telah mempelajari juknis dan berkonsultasi secara intensif dengan direktorat pengampu yaitu Direktorat PMPUPO yang menyusun kegiatan ini. Sehingga diperoleh perencanaan yang sesuai dengan kapasitas UPT.

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2024 dilakukan di Kabupaten Sragen yang merupakan lokus kegiatan Keterpaduan Keamanan Pangan Tahun 2024 oleh Balai POM di Surakarta. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Balai POM di Surakarta telah melakukan intervensi dan pendampingan kepada

komunitas yang ada di pasar. Komunitas pasar meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, dan pengunjung pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Keberhasilan program didukung oleh koordinasi yang baik antara Balai POM di Surakarta dengan OPD terkait (Dinas Koperasi dan UMK, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan Dinas Kesehatan) di Kabupaten Sragen, sehingga tahapan sehingga tahapan Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar, Penyuluhan Pedagang Pasar, Kampanye Komunitas Pasar, dan Monev Pasar Pangan Aman dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal petunjuk teknis kegiatan BPOM.

Selain itu, keberhasilan juga didukung komunikasi yang efektif dengan Tim Pengelola Pasar dalam melakukan Monitoring Evaluasi Pasar Pangan Aman. Pada tahap akhir program, dilakukan kegiatan Samplin dan Pengujian Tahap II terhadap 100 sampel pada pasar intervensi tahun 2024 dan penelusuran suplier ikan aman. Sampling dan Pengujian Tahap II dilakukan untuk melihat apakah masih beredar pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Diharapkan pasar yang diintervensi dengan program PPABK dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi-inovasi yang dapat dilaksanakan oleh komunitas pasar dan menyebarluaskan ke pasar sekitar yang belum mendapatkan program PPABK. Dengan demikian penerima manfaat dari program PPABK akan semakin luas dan berkembang.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 73. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	62.340.000	62.331.198	99,99	100	0,00	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,00 pada tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Berbagai upaya dilakukan oleh Balai POM di Surakarta untuk mencapai target IKU, yaitu 1 pasar yang diberi seluruh tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Koordinasi menjadi kegiatan kunci dalam keberhasilan pencapaian target tahun 2024. Balai POM di Surakarta sebagai pihak eksternal yang mengintervensi komunitas di daerah tertentu tentunya membutuhkan dukungan dan komitmen dari pemda untuk kelancaran dan keberhasilan program di daerah tersebut. Pada akhir kegiatan juga dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasar untuk memantau apakah masih ada pangan yang mengandung bahan berbahaya, bimbingan kepada pedagang tentang pangan yang mengandung bahan berbahaya serta mendorong pihak pemda agar dapat melakukan replikasi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayahnya.

g. Upaya peningkatan kinerja

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 dilaksanakan di Kabupaten Sragen. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Beberapa upaya atau kegiatan yang dapat direkomendasikan agar kegiatan dapat terlaksana lebih baik dan memenuhi batas waktu sesuai juknis, serta kegiatan dapat terpelihara dengan baik dan menyebar ke pasar lainnya antara lain sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah
- Mengusulkan agar lokus kegiatan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah

- Mendorong agar pemerintah daerah memasukan kegiatan keamanan pangan dalam perencanaan anggaran dan melakukan replikasi kegiatan
- Mendorong Pemda/pengelola pasar/kader membuat peraturan/kebijakan pemasukan bahan/produk pangan ke dalam pasar

SASARAN STRATEGIS 4
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. **Presentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar**
   a. **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Tabel 74. Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50	50	100	Baik

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A+B/2

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat dalam indikator kinerja ini mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel yang sesuai dengan pedoman sampling. Balai POM di Surakarta belum melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel obat sehingga target terhitung sebesar 50%. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa,

kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian sampel dari Balai POM di Surakarta dilakukan di Balai Besar POM di Semarang.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh Balai POM di Surakarta dibandingkan dengan produk yang disampling. Dari 164 produk yang disampling seluruhkan telah dilakukan pengujian. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 75. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	50	50	100%
2022	50	50	100%
2023	50	50	100%
2024	50	50	100%

Dari table tersebut diatas realisasi dan capaian persentase sambel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tetap sama yakni 100%. Hal tersebut menandakan bahwa Balai POM di Surakarta telah berhasil mempertahankan Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dengan kategori baik dari tahun 2021-2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara.

Tabel 76. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji	100%	50%	50%	120%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tertinggi di Balai POM di Tarakan mencapai 120%, kemudian diikuti Balai POM di Mamuju yaitu 100%. Sementara di Balai POM di Kediri dan Balai POM di Surakarta memiliki persentase yang sama yaitu 50%. Balai POM di Kediri dan Balai POM di Surakarta belum melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel obat sehingga target dan capaian sebesar 50%.

d. Analisis penyebab keberhasilan dan/ atau peningkatan pencapaian kinerja

Penyebab keberhasilan indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 ialah sebagai berikut :

1) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan tahun 2024
2) Melakukan monitoring pelaksanaan sampling setiap bulan

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 77. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN 2024	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	29.843.500	29.843.120	100	100	0,00	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,00 pada tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

f. Analisis kegiatan/ program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain dengan melakukan sampling obat sesuai dengan renlak yang telah disusun dan melakukan monitoring pelaksanaan sampling secara rutin setiap bulan.

g. Upaya peningkatan kinerja

Upaya perbaikan/ rekomendasi untuk meningkatkan kinerja adalah dengan menyusun renlak sampling obat, melaksanakan sampling sesuai renlak yang disusun dan melakukan monitoring pelaksanaan sampling setiap bulan.

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 78. Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100%	Baik

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A+B / 2

A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling Balai POM di Surakarta tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel Makanan sehingga target terhitung sebesar 50%. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian sampel dari Balai POM di Surakarta dilakukan oleh Balai Koordinator, yaitu BBPOM di Semarang, dan untuk parameter khusus dilakukan oleh Lab. Regional sesuai parameter uji

Realisasi sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Balai POM di Surakarta tahun 2024 sebanyak 85 sampel. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar mendapatkan hasil sebesar 100% dengan Kategori "**Baik**".

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021 – 2023)

Tabel 79. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024 dibandingkan tahun – tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	50%	50%	100%
2022	50%	50%	100
2023	50%	50%	100%
2024	50%	50%	100%

Tidak terdapat perbedaan realisasi dan capaian pada tahun 2024 dan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 mendapatan capaian sebesar 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara.

Tabel 80. Perbandingan Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji Tahun 2024 dengan UPT Balai POM Setara.

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji	100%	50%	50%	120%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji untuk Balai POM di Surakarta tahun 2024 sebesar 50% artinya Balai POM di Surakarta tidak melakukan pengujian, karena pengujian dilakukan oleh balai Koordinator yaitu Balai Besar POM di Semarang dan Balai Regional lainnya untuk parameter khusus, seperti halnya Balai POM di Kediri. Target IKU BPOM atau capaian Nasional yaitu 100%.

d. Analisis penyebab keberhasilan dan/ atau peningkatan kinerja

Penyebab keberhasilan pada indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain :

1) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
2) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
3) Melakukan monitoring kegiatan

e. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 81. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIEN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20.885.000	20.882.311	99,99	100	0	Efisien

Berdasarkan tabel diatas bahwa pecapaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar terhadap terhadap penggunaan sumber daya adalah efisien. Balai POM di Surakarta telah melakukan kegiatan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara baik dan benar sehingga bisa mencapai nilai Efisien

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pemenuhan capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah adalah melaksanankan sampling sesuai pedoman pada prioritas sampling dan monitoring kegiatan

g. Upaya Peningkatan

Upaya untuk meningkatkan indikator kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah

1) Melakukan monitoring terkadap kegiatan sampling makanan
2) Berkoordinasi dengan laboratorium penguji terkait kesiapan laboratorium dalam menguji sampel
3) Melakukan sampling sesuai perencanaan dan pedoman sampling

SASARAN STRATEGIS 5
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 82. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00	88,00	112,82	Sangat baik

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.

Capaian indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada akhir tahun 2024 adalah 88,00% dengan capaian 112,82% dari target yang direncanakan di tahun 2024. Capaian ini akumulasi nilai progress perkara carry over tahun 2023 yang dilakukan serah tahap II di bulan Februari 2024, perkara I tahun 2024 dengan tahapan sampai dengan serah tahap II, perkara II tahun 2024 dengan tahapan serah tahap II dan perkara III sampai dengan tahap serah tahap I. Capaian di tahun 2024 dibandingkan dengan target masuk ke dalam kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 83. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	65,00	87,50	134,62
2022	67,50	81,25	120,37
2023	70,00	77,33	110,47
2024	78,00	88,00	112,82

Target Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dari tahun 2021 sampai dengan 2024 meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan di renstra dan pada tahun 2024, target yang sesuai renstra yaitu 72,50 diubah menjadi 78,00 sesuai dengan Pedoman

SAKIP tahun 2023 bahwa target N tidak boleh kurang dari capaian N-1. Realisasi indicator fluktuatif untuk tiap tahunnya dan realisasi tertinggi di tahun 2024 yaitu 88,00%. Capaian indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan selalu melebihi 100%.

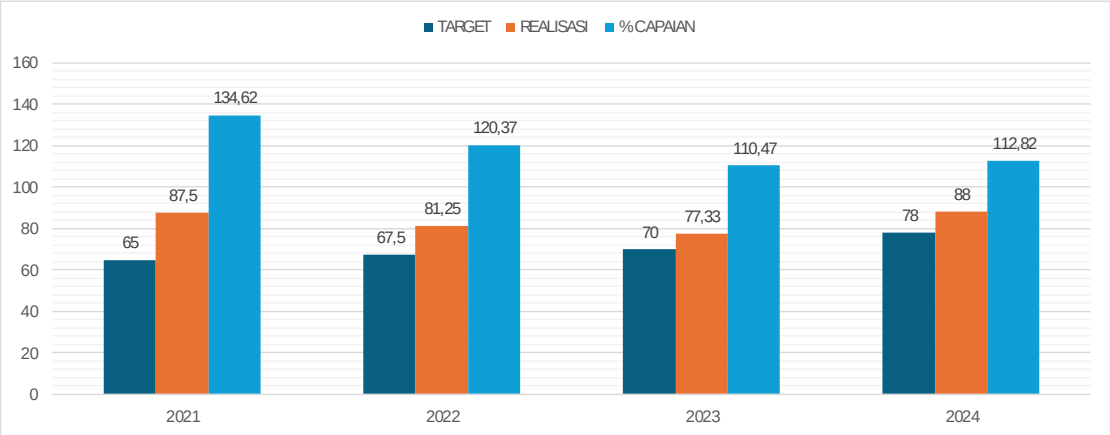

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 84. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	100,00	80,00	88,00	66,25

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi 100,00% kemudian Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 88,00%; Balai POM di Kediri 80,00% dan Balai POM di Tarakan 66,25%.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di tahun 2024 sebesar 88,00% merupakan hasil dari perhitungan:

- Kemajuan perkara carry over sampai dengan serah tahap II di bulan Februari 2024 (putusan)
- Perkara 1 tahun 2024 pada tahapan serah tahap 2 tanggal 7 Agustus 2024 (putusan)
- Perkara 2 tahun 2024 pada tahapan serah tahap 2 tanggal 5 Oktober 2024 (putusan)
- Perkara 3 tahun 2024 pada tahapan serah tahap 1 pada tanggal 13 Desember 2024

Capaian tahun 2024 yang merupakan akhir RPJMN periode 2019-2024 termasuk dalam kategori sangat baik. Keberhasilan dalam pencapaian tersebut merupakan hasil dari upaya yang telah dilaksanakan diantaranya:

1. Perkuatan koordinasi Integrated Criminal Justice System (ICJS) di wilayah kerja.

   Hubungan dan koordinasi ICJS menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan persentase keberhasilan Penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, perkuatan di tahun 2024 tersebut dilakukan melalui:

   - Koordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sragen terkait penanganan barang bukti dan peradilan perkara STU pada tanggal 1 Juli 2024.
   - Koordinasi dengan Kepala Seksi Pidana Umum dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sragen terkait telah dipenuhinya P19 perkara STU dan penyerahan berkas perkara pada tanggal 11 Juli 2024
   - Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sragen dalam rangka P21 perkara STU dan rencana serah tahap 2 pada tanggal 26 Juli 2024
   - Koordinasi dengan Kapolres Wonogiri terkait Kerjasama ICJS, sinergitas penegakan hukum di Bidang Obat dan Makanan serta koordinasi pengawasan pembinaan penyidikan oleh Korwas PPNS pada tanggal 30 Juli 2024.
   - Koordinasi dengan Kepala Seksi Pidana Umum dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sragen terkait serah tahap 2 perkara STU pada 7 Agustus 2024

- Koordinasi dengan Kepala Rupbasan Kelas II Wonogiri dalam rangka penitipan barang rampasan hasil Penindakan di Wonogiri pada tanggal 15 Agustus 2024
- Koordinasi dengan Kepala Unit Tipidter Reskrim Polres Wonogiri dalam rangka pemenuhan pengantar SPDP ke Kejaksaan Negeri Wonogiri pada tanggal 20 Agustus 2024
- Koordinasi dengan Kanit Tipidter Polres Wonogiri dan Jaksa Penuntut Umum terkait perkara STM dan serah berkas perkara STM pada tanggal 11 September 2024.

2. Perkuatan dalam skrining pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan melalui kegiatan Intensifikasi Patroli Siber

   Kegiatan patrol siber merupakan kegiatan patroli peredaran Obat dan Makanan di dunia maya. Dengan perencanaan yang bagus dan intensifikasi kegiatan patrol menjadi pintu masuk dalam skrining pelanggaran peredaran Obat dan Makanan di wilayah kerja. Kerjasama juga dilakukan dengan Direktorat siber dalam hal terdapat kendala profiling terhadap pelanggaran.

3. Perkuatan internal salah satunya terkait dengan sumber daya

   Dalam rangka peningkatan sumber daya yang dimiliki, telah dilakukan berbagai peningkatan kompetensi terhadap personal dan penambahan perlengkapan intelijen. Di tahun 2024 beberapa personal telah ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan, di antaranya:

   - Bimbingan Teknis Fungsi Siber dan Intelijen di UPT BPOM tahun 2024 (Dinar Yoggy Pindarto, 08 - 11 Juli 2024)
   - Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Bukti Badan POM Tahun 2024 (Dinar Yoggy Pindarto, 6 - 9 Agustus 2024)
   - Pendidikan dan Pelatihan Penggalangan Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2024 (Dinar Yoggy Pindarto, 2-12 September 2024)
   - Pelatihan Teknis PPNS Badan POM Tahun 2024 (Rina Rahayu Diningsih, 23-27 September 2024)
   - Pelatihan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Erindra Pramesthi, 14-24 Oktober 2024)

Selain itu juga BPOM di Surakarta telah mendapatkan bantuan berupa peralatan intelijen pada tahun 2023 yang telah dimanfaatkan dalam kegiatan intelijen.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 85. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN 2024	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	348.458.600	347.758.918	99,80	112,82	**0,13**	**Efisien**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,13 pada tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Penanganan perkara kejahatan Obat dan Makanan sangat spesifik untuk setiap perkara di setiap wilayah. Dengan koordinasi secara intensif dengan Korwas dan Kejaksaan, penanganan perkara kedua pada bulan Agustus dan September lancar dan tepat waktu, sehingga capaian persentase keberhasilan Penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada triwulan III ini dapat tercapai. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah:

1. Koordinasi penanganan perkara dengan ICJS secara intensif
2. Kegiatan patroli siber dan peningkatan kompetensi personal dalam pendalaman informasi siber.

g. Upaya peningkatan kinerja

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan ke depannya, dapat dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Perkuatan ICJS melalui koordinasi secara rutin
2. Peningkatan kompetensi personil

SASARAN STRATEGIS 6
MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 86. Realisasi Persentase Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40,00	49,43	123,57	Tidak dapat disimpulkan

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dengan rumus:

% pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP **= ((SRL % + Kompetensi % + Peralatan laboratorium %) / 3)**

Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Tabel xx. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2024

No	KOMPONEN	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Persentase Pemenuhan SRL (%)	-	-	-	17.07
2	Persentase Pemenuhan Kompetensi (%)	-	-	-	68.95
3	Persentase Pemenuhan Peralatan (%)	-	-	-	62.29
Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (%)		-	-	-	49,43

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari hasil penambahan persentase Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium yang dilakukan Balai POM di Surakarta sampai triwulan IV tahun 2024 dengan hasil Standar Ruang Lingkup sebesar 17,07 %, Standar Pemenuhan Peralatan Laboratorium sebesar 62,29 %, dan Standar Kompetensi personel laboratorium sebesar 68,95 %, dan diperoleh realisasi sebesar 49,43 %. Capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2024 yaitu 123,57 % dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 87. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-

2024	40	49,43	123,57	Tidak bisa disimpulkan

Target Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada tahun-tahun sebelumnya belum ada dikarenakan pada tahun 2024 baru dilaksanakan kegiatan pengembangan laboratorium di BPOM di Surakarta. Capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai POM di Surakarta sampai triwulan IV tahun 2024 yaitu sebesar 123,57 % dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 88. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun-tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	71,34 %	48,59 %	49,43 %	43,66 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2024 tertinggi adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 87,09 %, diikuti Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 49,33 %, Balai POM di Kediri dengan realisasi sebesar 48,59 %, dan Balai POM di Tarakan dengan realisasi sebesar 43,66 %.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Balai POM di Surakarta telah mencapai target pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada tahun 2024 dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Beberapa penyebab keberhasilan antara lain:

1) Pemenuhan kompetensi personal laboratorium mencapai nilai yang tinggi karena berasal dari personel yang telah mempunyai kompetensi laboratorium dari Balai Besar POM di Jayapura dan Palu.

2) Pemenuhan alat laboratorium mencapai nilai yang tinggi karena pengadaan peralatan laboratorium telah memenuhi persyaratan laboratorium pengujian Tingkat 1 secara lengkap.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 89. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN III	% REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	3.189.952.000	3.188.212.959	99,95	123,58	0,24	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,24 pada Triwulan IV tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja**

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada tahun 2024 mendapatkan hasil tidak dapat disimpulkan. Penyumbang kegagalan pencapaian target yaitu nilai pemenuhan kompetensi dan peralatan yang tinggi. Hal ini dikarenakan personal laboratorium di BPOM Surakarta telah mempunyai kompetensi setara Balai Besar POM, dan juga pemenuhan peralatan laboratorium setara laboratorium pengujian level 1 secara lengkap.

g. Upaya peningkatan kinerja

Upaya peningkatan kinerja terhadap Target Indikator Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP yaitu dengan :

a. Peningkatan kompetensi petugas laboratorium baik secara magang maupun secara daring yang disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium tier 2 pada tahun 2025.
b. Pemenuhan alat laboratorium sesuai dengan kebutuhan dari tahun ke tahun
c. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup Laboratorium sesuai dengan ruang lingkup pengujian.

2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta yang optimal

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 90. Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Yang Optimal Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Yang Optimal	3	3	100%	Baik

Indeks pengelolaan data dan Informasi UPT yang optimal bertujuan untuk menjamin data dan Informasi yang tersedia selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran, serta untuk menilai implementasi sistem Informasi dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja. Setiap komponen penilaian indeks pengelolaan data dan Informasi UPT yang optimal memiliki ketentuan yang berbeda-beda, tergantung pada aspek yang dinilai.

Perhitungan secara komposit = Dashboard di BCC (50%) + E-mail (50%)

1. *% Capain total =* $\frac{\text{Jumlah \% Capaian per Bulan Berjalan}}{\text{Jumlah Bulan Berjalan}}$

   Ketentuan :

   - *History Login dan Akses yang dihitung hanya History dari akun pimpinan unit*
   - *Jumlah login dihitung dalam 1 (satu) bulan (minimal 4 kali dalam sebulan)*
   - *Jumlah mengakses dashboard dihitung dari aktivitas akses atau melihat dashboard (Klik Tombol Lihat Dashboard)*

2. *Email* = $\frac{\text{Jumlah akun email unit / Jumlah akun balai dan individu yang aktif}}{\text{Jumlah total akun email unit / balai dan individu}}$ X 100%

- *Aspek pemanfaatan sistem BCC dilihat dari dua jenis kegiatan, yaitu Login dan View Dashboard, di mana penilaiannya dilakukan pembobotan, yaitu 40% Login, dan 60% View Dashboard.*

Indeks Email dengan kriteria sebagai berikut :

1) Sangat dimanfaatkan → 86-100% → 3
2) Dimanfaatkan → 70-85% → 2
3) Kurang dimanfaakan → 55-69% → 1
4) Tidak dimanfaatkan → <55% → 0

Ketentuan : Akun email yang aktif minimal melakukan aktifitas login 1x dalam sebulan.

Indeks Email dengan kriteria sebagai berikut :

5) Sangat dimanfaatkan → 86-100% → 3
6) Dimanfaatkan → 70-85% → 2
7) Kurang dimanfaakan → 30-69% → 1
8) Tidak dimanfaatkan → <30% → 0

Komponen pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta mencakup indeks pemanfaatan sistem informasi Badan POM yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup *email corporate* dan *dashboard* BOC. Pada Tahun 2024 Balai POM di Surakarta telah memperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang **memenuhi target yaitu 100%** (kriteria **"Baik"**).

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 91. Perbandingan Realisasi serta Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Yang Optimal Tahun 2024 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	-	-	-
2022	2,25	2	88,89

2023	2,5	3	120
2024	3	3	100

Terdapat penurunan capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Yang Optimal Tahun 2024 dari tahun – tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan target dibanding tahun sebelumnya. Walaupun terjadi penurunan terhadap capaian, tetapi realisasi masih sama dan capaian kinerja tetap tercapai (100%). Penurunan ini disebabkan upaya yang telah dilakukan oleh Balai POM di Surakarta dalam perencanaan kegiatan agar persentase capaian indikator tidak melampaui 120% yang sejalan dengan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Yang Optimal diharapkan realisasi.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 92. Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Yang Optimal Tahun 2024 Tahun – Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Yang Optimal	3	3	3	3,6

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Yang Optimal tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Tarakan dengan realisasi sebesar 3,6 kemudian Balai POM di Surakarta, Balai POM di Kediri, Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 3.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Balai POM di Surakarta berhasil mencapai target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Yang Optimal tahun 2024. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Yang Optimal tahun 2024, antara lain :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya saat rapat progresif;

2. Presensi saat rapat progresif bulan dikirim melalui email kedinasan agar setiap pegawai mau membukan email sebelum mengisi daftar hadir.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 93. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Yang Optimal tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	% REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Yang Optimal	592.750.600	592.482.370	99,95	100	0	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0 pada Triwulan IV tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Yang Optimal.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta atas capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Yang Optimal adalah sebagaimana penetapan target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Surakarta adalah flat selama satu tahun pelaporan sebesar 3 dan telah memperhatikan atas rencana kerja hasil monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan. Dalam menyikapi hal ini, Balai POM di Surakarta secara berkelanjutan melakukan strategi – strategi dalam memepertahankan nilai indeks pengelolaan data dan informasi tercapai secara optimal, sampai dengan Tahun 2024 berakhir dilakukan melalui beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan meliputi:

1. Pemenuhan sarana prasarana penunjang didukung secara penuh dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2024 sehingga melakukan percepatan proses pengadaan sarana prasarana Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada bulan triwulan IV Tahun 2024;
2. Penggunaan media online dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Balai POM di Surakarta;
3. Mengawal pemanfaatan email corporate unit dan individu dilakukan melalui pengumuman/informasi rekap pegawai yang belum aktif memanfaatkan email corporate secara periodik pada bulan berjalan bulan pada Whatsapp Group Balai POM di Surakarta;
4. Konsisten dalam upload berita aktual dan penyampaian berita aktual pada media whatsapp group Balai sebagai salah satu informasi Kilas Kinerja Balai POM di Surakarta;
5. Melakukan share tautan berita aktual ke grup Whatsapp Balai dan media massa atas konten yang sudah terupload di subsite Balai POM di Surakarta sehingga dapat lebih memperluas publikasi ke eksternal yang melibatkan pegawai;
6. Memanfaatan akun email corporate Balai POM di Surakartadan individu yang optimal untuk komunikasi terkait kegiatan maupun kinerja Balai POM di Surakarta. Dalam pelaksanaan pencapaian target masih didapatkan beberapa kendala kendala sebagai berikut:
   - Pada komponen email corporate terdapat beberapa pegawai yang belum melakukan login.
   - Pada bulan September nilai BOC tidak mendapat maksimal karena hanya akses 2 kali yang harusnya untuk mendapat nilai sempurna harus mengakses sebanyak 4 kali dalam satu bulan.

g. Upaya peningkatan kinerja

Pelaksanaan monitoring atas pencapaian komponen yang mendukung pencapaian target indeks pengelolaan data dan informasi, sebagaimana yang telah berkala dilakukan pemantauan yaitu meliputi:

a. Pemanfaatan email corporate untuk sarana kedinasan;
b. Pemanfaatan Dashboard BOC secara rutin;
c. Pemanfaatan sharing folder untuk pengawasan Obat dan Makanan secara optimal;

d. Publikasi berita aktual terkait kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

SASARAN STRATEGIS 7
MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

Indeks kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 94. Realisasi Persentase Indeks Kesadaran Masyarakat *(Awareness Index)* terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Kesadaran Masyarakat *(Awareness Index)* terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	72,56%	82,77%	114,07	Sangat Baik

Indeks Kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling.* Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang *(weighted mean score)* indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran. Persentase Indeks Kesadaran Masyarakat *(Awareness Index)* terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu diperoleh dengan rumus:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum[\sum(\bar{R}_a \times b) \times c]$$

Keterangan:

$\bar{R}_a$ adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kriteria inklusi responden adalah anggota rumah tangga berusia 17 - 65 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta menggunakan Obat dan Makanan.

Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk kesadaran yaitu Pengetahuan, Sikap dan Perilaku. Pengetahuan (*Knowledege*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu membeli produk dengan kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Indeks Kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *service quality* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, yaitu jaminan keamanan, upaya pengawasan, upaya perlindungan dan pemberian informasi, serta tindakan BPOM.

Pada akhir tahun 2024 telah diperoleh hasil pengukuran Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

yaitu 82,77 terhadap target 72,56 atau dengan capaian 114,07% dan kategori Sangat Baik.

Indeks kesadaran Masyarakat terdiri dari tiga komponen pendukung yaitu nilai pengetahuan, sikap dan perilaku. Capaian nasional untuk tiga nilai tersebut adalah: nilai pengetahuan 92,85; nilai sikap 90,46 dan nilai perilaku 80,37. Dari data tersebut nampak bahwa nilai perilaku adalah yang paling rendah, artinya meskipun masyarakat telah mengetahui dan memahami tentang keamanan dan mutu obat dan makanan namun belum tentu merubah perilakunya. Survey pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM bekerjasama dengan BPS.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 95. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase Indeks Kesadaran Masyarakat *(Awareness Index)* terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2024 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	72,56	82,77	114,07	Sangat Baik

Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu merupakan IKU baru bagi Balai POM di Surakarta tahun 2024 ini sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2021-2023). Realisasi indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu wilayah Balai POM di Surakarta tahun 2024 yaitu sebesar 82,77 dengan capaian persentase tertinggi dibanding dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis) BPOM lainnya yaitu sebesar 114,07%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 96. Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat *(Awareness Index)* terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2024 Tahun – Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Indeks Kesadaran Masyarakat *(Awareness Index)* terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	80,67	84,97	82,77	91,11

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Tarakan dengan realisasi sebesar 91,11 kemudian Balai POM di Kediri dengan realisasi sebesar 84,97. Dan yang terendah adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 80,67. Sedangkan untuk persentase capaian terhadap target dengan realisasi tertinggi yaitu Balai POM di Surakarta sebesar 114,07% dengan perbandingan Balai POM di Mamuju sebesar 103,43%, Balai POM di Kediri sebesar 103,09%, dan Balai POM di Tarakan sebesar 101,80%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Balai POM di Surakarta telah berhasil mencapai target indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu pada tahun 2024. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu, antara lain :

1. Melakukan layanan informasi dan pengaduan secara tatap muka dan online. Layanan tatap muka Balai POM di Surakarta meliputi layananan di kantor, Mal Pelayanan Publik Jenderal Sudirman, Mal Pelayanan Publik Sevaka Bhakti Wijaya dan Mal Pelayanan Publik Askara Bumi Sukowati. Sedangkan untuk layanan online Balai POM di Surakarta meliputi layanan *whatsapp,* telepon dan media sosial yaitu instagram. Pada tahun 2024, Balai POM di Surakarta memberikan 748 layanan informasi dan 5 layanan pengaduan.
2. Balai POM di Surakarta melakukan penyebaran informasi melalui media sosial antara lain instagram, facebook dan twitter (X). Pada tahun 2024

terdapat 494 konten yang disebarkan. Perolehan followers pada masing-masing media sosial pun juga menjadi faktor pendukung. Pada instagram Balai POM di Surakarta memiliki 3688 pengikut, facebook memiliki 440 pengikut, twitter (X) memiliki 247 pengikut, tiktok memiliki 242 pengikut, dan youtube memiliki 263 pengikut.

3. Balai POM di Surakarta melakukan penyebaran informasi melalui media cetak yaitu banner dan leaflet yang disebarkan pada setiap kegiatan Balai POM di Surakarta. Materi yang disebarkan antara lain tolak gratifikasi, kenali penyalahgunaan bahan kimia berbahaya pada pangan, BPOM Mobile, dan alur izin edar pangan olahan BPOM.
4. Balai POM di Surakarta melakukan penyebaran informasi obat dan makanan aman melalui media elektronik yaitu Solo Radio 92,9 FM karena memiliki catchment area yang luas (Kota Surakarta, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri dan Sragen). Penyebaran informasi dilaksanakan pada 23 Agustus--21 September 2024 dengan menyebarkan 3 jenis materi antara lain pemilihan dan penggunaan *sunscreen* yang aman, *skincare* beretiket biru, dan *tagline* Cek KLIK.
5. Melakukan penyebaran informasi obat dan makanan aman melalui media luar ruang yaitu baliho. Baliho yang digunakan adalah baliho yang beada di titik Loji Wetan. Pemasangan baliho dilakukan pada bulan Juni dan Oktober 2024. Materi yang disampaikan adalah 5 Kunci Keamanan Pangan dan *Say No to* OT BKO.
6. Melakukan penyebaran informasi obat dan makanan aman melalui media digital yaitu SMS blast. SMS blast berjumlah 9.040 SMS dilaksanakan dengan 2 kali penayangan yaitu awal puasa ramadhan 1445 H (25 Maret 2024) dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H (10 April 2024). Area penyebaran SMS blast meliputi Surakarta, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, dan Karanganyar. Materi yang disebarkan adalah hindari pangan dengan kemasan kaleng penyok dan lakukan Cek KLIK sebelum membeli produk.
7.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 97. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Indeks Kesadaran Masyarakat *(Awareness Index)* terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	36.977.600	36.975.575	99,99	114,07	0,14	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,14 pada tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan nilai indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu yang mencapai target.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu antara lain:

- Melakukan layanan informasi dan pengaduan secara tatap muka dan online berupa telepon, *whatsapp* dan media sosial;
- Melakukan penyebaran informasi melalui media sosial antara lain instagram, facebook dan twitter (X);
- Penyebaran informasi melalui media cetak yaitu banner dan leaflet yang disebarkan pada setiap kegiatan Balai POM di Surakarta;
- Penyebaran informasi obat dan makanan aman melalui media elektronik yaitu Solo Radio 92,9 FM karena memiliki catchment area yang luas (Kota Surakarta, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri dan Sragen);
- Melakukan penyebaran informasi obat dan makanan aman melalui media luar ruang yaitu baliho;
- Melakukan penyebaran informasi obat dan makanan aman melalui media digital yaitu SMS blast.

g. Upaya peningkatan kinerja

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Surakarta tersebut membuahkan hasil yaitu dengan tercapainya target indeks kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan, dari target 72,56 dapat dicapai 82,77 atau dengan nilai capaian 114,07%. Upaya perbaikan/ rekomendasi Balai POM di Surakarta untuk meningkatkan kinerja yaitu terus menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Media dan berbagai komunitas masyarakat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang memilih produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu bagi mereka. Setiap sumber daya yang ada akan dimanfaatkan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selama ini Kerjasama Balai POM di Surakarta dengan berbagai lintas sektor telah berjalan dengan harmonis dan dinamis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing.

SASARAN STRATEGIS 8
MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Pencapaian tersebut didukung oleh 3 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

1. **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**

   a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 98. Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.4%	97.34%	107.68%	Sangat baik

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 berhasil melampaui target yang ditetapkan

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 99. Persentase realisasi dan capaian tahun 2024 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023)

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	90.4%	97.34%	107.68%

Realisasi dan capaian Tahun 2024 dapat memenuhi target, namun tidak dapat dibandingkan dengan tahun -tahun sebelumnya. Balai POM di Surakarta baru menjadi Balai sejak Oktober 2023 sehingga tahun 2021 – 2023 tidak memiliki indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara.

Tabel 100. Perbandingan Realisasi Persentase indeks Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	99.18%	94.14%	97.34%	97.8%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 tidak berbeda

signifikan dengan UPT Balai POM setara yaitu berhasil mencapai target dengan kriteria sangat baik

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 berhasil melampaui target didukung oleh perencanaan yang tanggal 1 Juli 2024 dimana Balai POM di Surakarta telah mengikuti sosialisasi dari Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM terkait Pengukuran Indikator Kinerja Utama BPOM, maka intens melakukan entri kegiatan pendampingan pelaku usaha pada subsite ikepu.pom.go.id sehingga tetap terhitung dan teranalisa oleh BPOM.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 101. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET Anggaran 2024	REALISASI Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran 2024	% capaian indikator	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	23.630.500	23.574.043	99.76%	107.68%	0.08	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran "Efisien" dimana selaras antara capaian kinerja dan anggaran. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan terencana dan terlaksana dengan baik sesuai dengan anggaran yang tersedia.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 berhasil melampaui target didukung oleh program sebagai berikut :

1. Melakukan entri kegiatan pemberian bimbingan dan pembinaan ke dalam Aplikasi Survei pada kegiatan desk CAPA, desk UMKM, sosialisasi dan desk layanan sertifikasi
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan beserta daftar pelaku usaha yang harus didampingi pada rapat progresif tiap bulan atau laporan prrogresif bulanan.

g. Upaya perbaikan kinerja

Upaya perbaikan kinerja dilakukan pada tahun 2024 untuk mencapai target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan melakukan inventarisasi kegiatan desk dengan pelaku usaha tiap triwulan agar dapat dientri pada aplikasi survei sehingga pelaku usaha dapat segera mengisi survey setelah pelaksanaan kegiatan sehinga Tahun 2024 berhasil menjaring 13 KBP dan 141 responden

2. **Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan**

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 102. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74,41	80,58	108,29	Sangat Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17- 65 tahun.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan merupakan indikator utama BPOM level 0 yang dicascading di level I (kedeputian) dan level II (UPT) dengan pengukuran melalui metodologi dan desain sampel SKKM.

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama tanggal 16 Desember 2024 Nomor B-RK.02.2.12.24.940 Perihal Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha, Indeks Kesadaran Masyarakat, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha, dan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 diperoleh hasil Pengukuran IKU Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Surakarta yang dilakukan oleh PUSAKOM sebesar 80,58% dengan % capaian sebesar 108,29.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 103. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	74,41	80,58	108,29

Balai POM di Surakarta baru ditingkatkan klasifikasi UPT-nya menjadi Balai POM pada Oktober 2023 serta baru mendapatkan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2024 dengan target 74,41 dan diperoleh realisasi 80,58.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 104. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Surakarta Tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Surakarta	81,98	80,74	80,58	82,66

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Tarakan dengan realisasi sebesar 82,66% sedangkan yang terendah adalah Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 80,58%.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan Balai POM di Surakarta tahun 2024 berhasil memenuhi target dengan capaian 108,29%.

Peran UPT untuk pencapaian indikator ini antara lain :

1. Pelaksanaan dan publikasi program pemberdayaan Masyarakat.
2. Pelaksanaan publikasi program pengawasan obat dan makanan.
3. Melakukan pelaporan hasil pengukuran indeks di dalam laporan kinerja unit kerja
4. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil pengukuran hasil pengukuran indeks.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 105. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Surakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	%REALISASI ANGGARAN 2024	%CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Surakarta	64.101.300	63.916.593	99,71	108,29	0,09	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,09 pada Tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian IKU dan perwujudan upaya peningkatan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan Balai POM di Surakarta.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kebijakan BPOM untuk mencapai kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan adalah dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket obat dan makanan.

Sehingga diperlukan strategi penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Surakarta yang dilakukan oleh PUSAKOM sebesar 80,58% dengan % capaian sebesar 108,29.

Upaya peningkatan kinerja yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskankan informasi keamanan Obat dan Makanan.

3. Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 106. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Surakarta Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Surakarta	95,75	96,2	100,47	Sangat Baik

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

SKM terhadap layanan publik dilakukan oleh Balai POM di Surakarta terhadap penerima layanan informasi dan pengaduan serta layanan sertifikasi. Berdasarkan surat Sekretaris Utama BPOM No. B-OT.03.04.2.22.03.24.244 tanggal 22 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPOM Tahun 2024, pelaksanaan SKM 2024 akan berlangsung pada periode April-Juni 2024 atau triwulan II tahun 2024. Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2024, sejumlah 112 responden telah mengisi SKM Balai POM di Surakarta. Jumlah tersebut telah sesuai target yang ditetapkan meliputi 4 responden penerima layanan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), 5 responden penerima layanan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), 3 responden penerima layanan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), 1 responden penerima layanan Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika, 15 responden penerima layanan Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dan 82 responden penerima layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil SKM yang tercantum dalam aplikasi SAPAAPIP, diperoleh informasi indeks SKM Balai POM di Surakarta tahun 2024 sebesar 96,20 dan meningkat dibandingkan tahun 2023. Nilai menjadi realisasi dan capaiannya pada akhir tahun 2024.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 107. Perbandingan Realisasi serta Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Surakarta Tahun 2024 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	-	-	-

2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	95,75	96,2	100,47

Balai POM di Surakarta baru ditingkatkan klasifikasi UPT-nya menjadi Balai POM pada Oktober 2023 serta baru mendapatkan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik pada tahun 2024 dengan target 95,75 dan diperoleh realisasi 96,2. Meskipun demikian, Balai POM di Surakarta telah melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) secara periodik dengan hasil sebagai berikut:

1) Tahun 2021: 85,74
2) Tahun 2022: 89,57
3) Tahun 2023: 95,18

Secara tidak langsung dapat disimpulkan adanya kenaikkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Balai POM di Surakarta dari tahun ke tahun.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 108. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Surakarta Tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Surakarta	98,42	90,86	96,2	91,5

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 98,42% sedangkan yang terendah adalah Balai POM di Kediri dengan realisasi sebesar 90,86%.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik Balai POM di Surakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Terdapat 9 (Sembilan) unsur penilaian (sesuai pedoman PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017) yang diukur pada SKM. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Surakarta, antara lain:

1. Melakukan reviu secara berkala Standar Pelayanan Balai POM di Surakarta yang memuat unsur-unsur pelayanan publik, yang mana dalam penyusunannya dilakukan melalui tahapan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari pengguna layanan.
2. Menindaklanjuti hasil SKM yang telah dilakukan secara berkala dengan menyusun rencana tindak lanjut yang dititikberatkan terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah.
3. Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penanganan pengaduan yang lebih baik.
4. Meningkatkan kompetensi, memberikan *reward* dan *punishment*, untuk petugas layanan, serta penerapan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.
5. Mengoptimalkan dan mendekatkan pelayanan dengan membuka gerai/loket layanan di 3 (tiga) Mal Pelayanan Publik (MPP) yaitu MPP Surakarta, MPP Sragen, dan MPP Sukoharjo.
6. Memberikan pelayanan secara daring melalui whatsapp secara responsif.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 109. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Surakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	%REALISASI ANGGARAN 2024	%CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Surakarta	19.350.000	19.342.810	99,96	100,47	0,01	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,01 pada Tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian IKU dan perwujudan upaya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Surakarta.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Balai POM di Surakarta untuk meningkatkan pelayanan publik. Standar Pelayanan yang ditetapkan di lingkungan Balai POM di Surakarta untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh Balai POM di Surakarta. Agar target SKM 2024 tercapai, Balai POM di Surakarta telah rutin melakukan pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan yaitu pada:

1) Kantor Balai POM di Surakarta (Jl. Siwalan No. 59d, Kerten, Laweyan, Surakarta 57144): setiap hari Senin—Kamis (08.30--16.00 WIB) dan Jumat (08.30--15.30 WIB).
2) Layanan *Whatsapp*: setiap hari Senin—Kamis (08.00--15.30 WIB) dan Jumat (08.00--15.00 WIB).
3) Mal Pelayanan Publik Jenderal Sudirman Kota Surakarta: setiap hari Senin—Kamis (08.00--15.00 WIB) dan Jumat (08.00--11.00 WIB).
4) Mal Pelayanan Publik Sevaka Bhakti Wijaya Kabupaten Sukoharjo: setiap hari Selasa (08.30--14.30 WIB).
5) Mal Pelayanan Publik Askara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen: setiap hari Senin (08.30--14.30 WIB).

Selain itu, Balai POM di Surakarta juga melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik agar dapat memberikan pelayanan prima dan kepuasan atau memenuhi ekspektasi konsumen.

g. Upaya peningkatan kinerja

Sebagian besar layanan yang dilakukan Balai POM di Surakarta merupakan bagian dari proses untuk mendapatkan izin edar produk, yang mana proses separuhnya lagi ada di pusat. Prosedur, persyaratan, dan kelengkapan lainnya untuk setiap jenis layanan juga berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan dari pusat. Selain itu, layanan Balai POM di Surakarta mayoritas menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh pusat. Untuk itu, Balai POM di Surakarta agar beradaptasi dengan regulasi terkini dengan konsisten dan kontinu meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, menambah personil yang berperan sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah (fasilitator) untuk mengatasi kendala pemenuhan persyaratan dan penggunaan aplikasi, serta menambah kapasitas pendampingan kepada pelaku usaha.

SASARAN STRATEGIS 9
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI POM DI SURAKARTA YANG OPTIMAL

Pencapaian tersebut didukung oleh 3 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 110. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai POM di Surakarta Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks RB BPOM di Surakarta	75	74,39	99,19	Cukup

Perhitungan Indeks RB diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil penilaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 pada LKE (Lembar Kerja Evaluasi) oleh Inspektorat Utama.

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, Permenpan RB No. 26 Tahun 2020 tentang pedoman Evaluasi Pelaksnaan Reformasi Birokrasi, PermenPAN No 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Kepka No. 163 Tahun 2022 tentangPedoman Pembangunan ZI Menuju WBK,WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan BADAN POM , Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Sesuai surat dari Inspektorat Utama Nomor B-PI.06.06.7.11.24.676 tanggal 28 Januari 2024 tentang hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menunjukkan nilai total pada Balai POM di Surakarta sebesar 74,39 dengan rincian komponen pengungkit 36,42 dan Komponen Hasil 37,96

b. Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target tahun sebelumnya

Tabel 111. Realisasi Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dibandingkan target sebelum tahun 2024 (2021- 2023)

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	100	100	100
2022	100	100	100
2023	100	100	100
2024	75	74,39	99,19

Pada Tahun 2021 – 2024 belum dilakukan penilaian secara kuantitatif oleh Inspektorat namun demikian telah mulai dilaksanakan implementasi Reformasi Birokrasi berupa penyusunan Tim RB mulai Tahun 2021 dan Internalisasi kepada pegawai. Mulai tahun 2024 target penilaian Indeks RB BPOM di BPOM Surakarta telah ditetapkan berupa target Tahunan sebesar 75 dengan hasil penilaian 74,39 dengan persentase capaian 99, 19. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai Indeks RB di BPOM Surakarta.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 112. Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dengan kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Persentase Indeks Reformasi Birokrasi	85,92	63,5	74,39	81,61

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Reformasi Birokrasi yang tertinggi adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 85,92 kemudian Balai Pom di Tarakan dengan realisasi sebesar 81,61 , kemudian capaian Balai POM Surakarta sebesar 74,39 dan yang terendah adalah Balai POM Kediri sebesar 63,5.

d. Analisis penyebab kegagalan pencapaian kinerja

Pada Tahun 2024 Balai POM di Surakarta belum mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian sebesar 99,19 %. Analisis penyebab belum tercapaianya Indikator ini antara lain adalah :

1. Penilaian hasil pelaksanaan adalah tahun pertama sehingga perlu dilakukan peningkatan pemahaman oleh setiap Pokja Area Perubahan dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi serta melengkapi data dukung.
2. Implementasi Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan di Lingkungan Balai POM di Surakarta melalui kegiatan inovasi namun belum dapat berjalan optimal dan belum semua kegiatan di dokumentasikan dengan baik.
3. Belum terdapat rencana kerja pembangunan ZI yang disertai dengan target prioritas pada setiap area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 113. Analisis Efisiensi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	% REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Indeks Reformasi Birokrasi	852.057.900	851.734.223	99,96	99,19	-0.01	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai -0,01 pada tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini disebabkan karena pada penilaian hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WKB/ WBBM di Surakarta menunjukkan bahwa perlu peningkatan pemahaman dan komitemen oleh pimpinan dan didukung oleh seluruh pegawai di lingkungan Balai POM di Surakarta.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

Program yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 antara lain :

1. Belum terdapat prosedur/mekanisme yang jelas dalam penentuan pemilihan ketua maupun anggota tim pembangunan ZI sehingga untuk mendukung program Pokja Area Perubahan dapat dilaksanakan secara optimal
2. Program inovasi telah berjalan dengan baik, namun Sebagian besar masih bersifat internal dan belum berdampak secara luas kepada masyarakat.
3. Pemahaman internal oleh karyawan dan komitmen belum sepenuhnya sama, sehingga perlu ditingkatkan terus menerus agar implementasi Reformasi Birokrasi dapat berjalan optimal

g. Upaya Peningkatan

Upaya untuk meningkatkan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi adalah :

1. Internalisasi RB untuk meningkatkan komitmen dan *employee engagement* sehingga tata Kelola pemerintah dan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat dan professional.
2. Penyusunan Mekanisme pemilihan anggota tim RB untuk mendukung kerja Pokja area perubahan secara optimal
3. Penyusuanan rencana kerja pembangunan ZI yang disertai dengan target prioritas pada setiap area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.
4. Menyusun program inovasi oleh Tim AoC dengan memperhitungkan secara luas dampak positif kepada masyarakat
5. Dukungan pimpinan dan manajemen serta ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan RB.
6. Telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM pada Triwulan IV Tahun 2024

2. Nilai AKIP Balai POM di Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 114. Realisasi Nilai AKIP Balai POM di Surakarta Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai AKIP	78,66	74,39	94,57	Cukup

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai POM di Surakarta adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 115. Penilaian dan Kategori SAKIP

No	Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	>90	AA	Sangat Memuaskan
2.	>80 s.d 90	A	Memuaskan
3.	>70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4.	>60 s.d 70	B	Baik
5.	>50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6.	>30 s.d 50	C	Agak Kurang
7.	<30	D	Kurang

Capaian Tahun 2024 Nilai AKIP Balai POM di Surakarta adalah 74,39 dengan capaian Nilai AKIP 94,57 dengan kategori Cukup.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 116. Perbandingan Realisasi serta Capaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	-	-	-
2022	80,6	74,65	92,62

2023	82,20	71,15	86,56
2024	78,66	74,39	94,57

Capaian Nilai AKIP Balai POM di Surakarta tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, namun capaian AKIP Balai POM di Surakarta tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan penilaian terhadap AKIP mengalami peningkatan dengan hasil capaian sebesar 94,57% dengan kategori cukup.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 117. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Balai POM di Surakarta Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Nilai AKIP	80,83	77,8	74,39	78,84

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi **Nilai AKIP UPT** tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Mamuju Balai POM di Tarakan dan Balai POM di Kediri dengan realisasi sebesar 80,83 Dan yang terendah adalah Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 74,39.

d. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja

Balai POM di Surakarta belum mencapai target Nilai AKIP pada tahun 2024. Beberapa kegiatan yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian Nilai AKIP antara lain :

1. Belum terdapat kertas kerja penetapan target indikator sasaran kinerja yang disusun berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten termasuk belum mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta pemanfaatan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya;

2. SOP pengumpulan data kinerja yang telah disusun belum diformalkan dan disahkan
3. Data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance) belum selaras
4. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan Permasalahan/kendala/hambatan yang dapat menjelaskan akar penyebab kegagalan pencapaian kinerja

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 118. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai AKIP

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN 2024	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Nilai AKIP	852.057.900	851.734.223	99,96	94,57	-0,05	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien dengan tingkat efisiensi mencapai -0,05 pada tahun 2024. Kriteria tidak efisien dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian indikator nilai AKIP.

f. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan ataupun penurunan pencapaian kinerja

Indikator Nilai Nilai AKIP pada tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. kegiatan yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam pencapaian Nilai AKIP pada tahun 2024 yaitu :

1. Belum terdapat kertas kerja penetapan target indikator sasaran kinerja yang disusun berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten termasuk belum mempertimbangkan realisasi kinerja tahun

sebelumnya serta pemanfaatan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya;

2. SOP pengumpulan data kinerja yang telah disusun belum diformalkan dan disahkan
3. Data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance) belum selaras

g. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Nilai AKIP antara lain:

1. Pemantauan Nilai Indikator Perencanaan Kinerja
2. Pemantauan Nilai Indikator Pengukuran Kinerja
3. Pemantauan Nilai Indikator Pelaporan Kinerja
4. Pemantauan Nilai Indikator Evaluasi Internal
5. Pemantauan Nilai Indikator Capaian Kinerja

3. Nilai Pengelolaan Kearsipan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 119. Realisasi Persentase Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Pengelolaan Kearsipan	76,64	85,66	111,77	Sangat baik

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan :

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;

5. Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/Anggaran.

Cara perhitungan dan formula perhitungan nilai pengelolaan kearsipan secara rinci dijelaskan dalam *self assessment* pengawasan kearsipan dengan periode pelaporan yaitu tahunan. Capaian tahun 2024 Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai POM di Surakarta 85,66 dengan nilai capaian 111,77 kategori Sangat Baik

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 120. Perbandingan Realisasi serta Capaian Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	76,64	85,66	111,77

Capaian Nilai Pengelolaan Kearsipan wilayah Balai POM di Surakarta tahun 2024 yaitu sebesar 85.66% dengan kategori sangat baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 121. Perbandingan Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024 Tahun – Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Nilai Pengelolaan Kearsipan	95,87	91,33	85,66	92,33

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 95,87% kemudian Balai Pom di Tarakan dengan realisasi sebesar 92,33%. Dan yang terendah adalah Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 85,66%.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian target nilai pengelolaan kearsipan diantaranya :

1. Penciptaan Naskah Dinas harus mengacu dengan Tata Naskah di Lingkungan BPOM, Memperhatikan setiap aspek seperti Penomoran Naskah Dinas, Struktur Naskah Dinas, dan Format Naskah Dinas.
2. Unit Pengolah harus menyediakan Daftar Informasi Arsip Aktif dari Arsip Aktif yang tersedia di Unit Pengolah.
3. Daftar arsip aktif harus memuat seluruh informasi pada daftar arsip aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Unit Pengolah harus menyampaikan daftar arsip aktifnya kepada Unit Kearsipan paling ama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
5. Daftar Arsip Inaktif yang Dipindahkan harus memuat informasi sesuai dengan ketentuan berupa Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas.
6. Agar dibuat perencanaan terhadap pengembangan kompetensi pengelola arsip dengan mengikuti dan lulus diklat teknis kearsipan.
7. Penggunaan Prasarana dan Sarana agar menggunakan folder, sekat guide, dan filing cabinet terhadap seluruh arsip aktif

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 122. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan	586.950.600	586.717.637	99,96	111,77	0,12	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,12 pada tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian indikator nilai pengelolaan kearsipan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan. kegiatan yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024 yaitu :

1. Melakukan verifikasi naskah dinas oleh pengelola kearsipan sebelum dilakukan penandatanganan;
2. Menyediakan anggaran untuk meningkatkan prasarana dan sarana kearsipan;
3. Dilakukan pengembangan kompetensi kearsipan kepada pengelola kearsipan;

g. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan antara lain:

1. Pemantauan Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi Penciptaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Penyusutan arsip dinamis
2. Pemenuhan Sumber Daya Kearsipan yang meliputi Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sarana dan Prasarana Kearsipan

SASARAN STRATEGIS 10
TERWUJUDNYA SDM BALAI POM DI SURAKARTA YANG BERKINERJA OPTIMAL

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 123. Realisasi Persentase Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta	90,64	87,27	96,28	Cukup

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah Ukuran Statistik yang menggambarkan Kualitas ASN berdasarkan Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja dan Kedisiplinan Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara kepada seluruh pegawai (ASN) di Balai POM di Surakarta. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas: kualifikasi memiliki bobot 25%; kompetensi memiliki bobot 40%; kinerja memiliki bobot 30%; dan disiplin memiliki bobot 5%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

1) Nilai 91 - 100 (sembilan puluh satu - seratus) berkategori Sangat Tinggi;
2) Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu - sembilan puluh) berkategori Tinggi;
3) Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu - delapan puluh) berkategori Sedang;
4) Nilai 61 - 70 (enam puluh satu - tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
5) Nilai 0 - 60 (nol - enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Capaian Tahun 2024 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta adalah 87,27 dengan nilai IP ASN 96,28 dengan kategori Cukup.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 124. Perbandingan Realisasi serta Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	85,70	85,45	99,71
2022	85,80	85,45	99,59
2023	86,90	90,57	105,31
2024	90,64	87,27	96,28

Target Indeks Profesionalitas ASN tahunan adalah 90,64 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta sampai triwulan IV tahun 2024 yaitu sebesar 87.27% dengan kategori cukup.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 125. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta Tahun 2024 Tahun – Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta	87,09	86,07	87,27	85,86

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi **Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta** tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 87,27% kemudian Balai Pom di Mamuju dengan realisasi sebesar 87,09%. Dan yang terendag adalah Balai POM di Kediri dengan realisasi sebesar 86,07%.

d. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja

Balai POM di Surakarta belum berhasil mencapai target Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2024. Beberapa kegiatan yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian Indeks Profesionalitas ASN , antara lain :

1. Perubahan Dimensi Penilaian Pegawai yang dinilai untuk IP ASN 2024 adalah PNS dan PPPK. Pegawai PNS belum melaksanakan diklat fungsional
2. Perubahan Dimensi Nilai kinerja ditambahkan sebagai komponen pada dimensi Kompetensi dengan bobot 25 dari nilai 40. Salahsatu penurunan

nilai IP ASN BPOM pada tahun 2024 dikarenakan rata -rata nilai kinerja Pegawai BPOM adalah Baik (20), sehingga nilai maksimal pegawai pada dimensi kinerja adalah 35

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 126. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN 2024	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	855.007.900	854.662.488	99,96 %	96,28	0.04	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 75% pada tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat ketidakkesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai **Indikator** Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. kegiatan yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian Indeks Profesionalitas ASN yaitu adanya perubahan dimensi Penilaian Pegawai yang dinilai untuk IP ASN 2024 adalah PNS dan PPPK. Pegawai PNS belum melaksanakan diklat fungsional

g. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja nilai Indeks Profesionalitas ASN antara lain:

1. Pemantauan Nilai Kualifikasi Pendidikan melalui apliakasi SIASN;
2. Pemantauan terhadap kompetensi pegawai melalui aplikasi SIASN;
3. Memonitoring Nilai Kinerja Pegawai melalui aplikasi SIASN
4. Memonitoring Kedisiplinan Pegawai melalui aplikasi SIASN

SASARAN STRATEGIS 11
TERKELOLANYA KEUANGAN UPT SECARA AKUNTABEL

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 127. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran	90,51	91,23	100,80%	Sangat Baik

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta diperoleh dengan rumus : **(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) di bulan Desember.**

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. delapan indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan,

Pengelolaan UP dan TUP , dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga.

Capaian tahun 2024 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta 91,23 dengan nilai capaian 100,80 kategori Sangat Baik

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 128. Perbandingan Realisasi serta Capaian Nilai Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	90	91,19	101,32
2022	90,60	91,02	100,46
2023	91,80	90,73	98,83
2024	90,51	91,23	100,80

Capaian Nilai Kinerja Anggaran wilayah Balai POM di Surakarta tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT mengalami peningkatan dengan hasil capaian sebesar 100,80% dengan kategori sangat baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 129. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 Tahun – Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Nilai Kinerja Anggaran	92,45	89,79	91,23	89,04

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 92,45% kemudian Balai Pom di Surakarta dengan realisasi

sebesar 91,23%. Dan yang terendah adalah Balai POM di Tarakan dengan realisasi sebesar 89,04%.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian target nilai kinerja anggaran adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 130. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai Kinerja Anggaran

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran	618.218.600	617.942.237	99,96	100,80	0,01	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,01 pada tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian indikator nilai pengelolaan kearsipan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Indikator Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan. kegiatan yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

g. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran antara lain:

1. Pemantauan Nilai Indikator Kualitas Perencanaan Anggaran
2. Pemantauan Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran
3. Pemantauan Nilai Indikator Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 131. Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai POM di Surakarta Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	80	95	118,75	Sangat Baik

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa diperoleh perhitungan sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%) a) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) [90% < nilai RUP < 100%], diberi nilai 100 (seratus); b) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) [70% < nilai RUP < 90%], diberi nilai 75 (tujuh puluh lima); c) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) [50% < nilai RUP < 70%], diberi nilai 50 (lima puluh); d) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) [nilai RUP < 50%], diberi nilai 0 (nol) (untuk Satuan Kerja yang persentase >100% dilakukan klarifikasi) .
2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%) a) Satuan Kerja sudah menerapkan 100% proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP; diberi Nilai 100 (seratus). b) Satuan Kerja belum menerapkan proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi Nilai 0 (nol).

3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%) a) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 100 (seratus); b) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai ≥ 80% s.d 99% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima); c) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai ≥ 60% s.d 79% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 50 (lima puluh); dan d) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 60% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 0.
4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%) a) Satuan Kerja sudah menerapkan >60% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 100 (seratus); b) Satuan Kerja sudah menerapkan > 40 s.d 60% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima); c) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20 s.d 40% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 50 (lima puluh); dan d) Satuan Kerja belum menerapkan atau Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0.
5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%) a) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 100 (seratus). b) Satuan Kerja sudah menerapkan < 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 0 (nol).

Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian. Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari :

1. Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <= 100 (kurang dari sama dengan seratus).
2. Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
3. Cukup Rentang nilai ≥ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan 4. Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).

Capaian Tahun 2024 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai POM di Surakarta adalah 95 dengan capaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa 118,75 dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 132. Perbandingan Realisasi serta Capaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	80	95	118,75

Balai POM di Surakarta baru mendapatkan IKU Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa pada tahun 2024 dengan Target Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa sebesar 80 dan realisasi sebesar 95 serta capaian sebesar 118,75 % dengan kategori Sangat Baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 133. Perbandingan Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai POM di Surakarta Tahun 2024.

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	95,00	90	95	95

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi **Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai POM di Surakarta** tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta, Balai POM di Mamuju dan Balai POM di Kediri

dengan realisasi sebesar 95% Dan yang terendah adalah Balai POM di Kediri dengan realisasi sebesar 90%.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Balai POM di Surakarta berhasil mencapai target Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa pada tahun 2024. Beberapa kegiatan yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian Indeks Profesionalitas ASN , antara lain :

1. Satker (KPA / PPK) memastikan RUP terumumkan 100% sebelum 31 Maret
2. PPK setiap triwulan melakukan monitoring terkait progress penyelesaian e-purchasing
3. Proses penyelesaian status Paket Selesai e-purchasing tidak seluruhnya diakhir tahun untuk menghindari kendala dokumen dengan penyedia
4. PPK dan pendukungnya berkomitmen kuat untuk melakukan pencatatan untuk PBj non E-Tendering dan non e-Purchasing
5. PPK berkomitmen dan monitoring terhadap perekaman e-kontrak secara berkala

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 134. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN 2024	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	601.400.600	601.083.570	99,95	118,75	0,19	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,19 pada tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian indikator nilai pengelolaan kearsipan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun peningkatan pencapaian kinerja

Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa pada tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan. kegiatan yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa pada tahun 2024 yaitu :

1. PPK setiap triwulan melakukan monitoring terkait progress penyelesaian e-purchasing
2. PPK dan pendukungnya berkomitmen kuat untuk melakukan pencatatan untuk PBj non E-Tendering dan non e-Purchasing
3. PPK berkomitmen dan monitoring terhadap perekaman e-kontrak secara berkala

g. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa antara lain:

1. Pemantauan Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi SiRUP
2. Pemantauan Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa dalam aplikasi SiRUP
3. Pemantauan Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing)
4. Pemantauan Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE
5. Pemantauan Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE

3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 135. Realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	88	93,73	106,51%	Sangat Baik

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu: Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan,

Penatausahaan, serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan, dan Pemusnahan.

1. **Penatausahaan BMN (Bobot 30%)**

   Kualitas Pelaporan (Bobot 75%)

   Pelaporan Tepat Waktu (Bobot 25%)

   Tanggal penerimaan > H+3: Sangat Tidak Tepat Waktu (Skor 0)

   H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3: Tidak Tepat Waktu (Skor 25)

   H-3 < Tanggal penerimaan ≤ H-0: Tepat Waktu (Skor 75)

   Tanggal penerimaan ≤ H-3: Sangat Tepat Waktu (Skor 100)

2. **Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (Bobot 10%)**

   Tanggal penerimaan > H+3: Sangat Tidak Tepat Waktu (Skor 0)

   H-0 < Tanggal penerimaan H+3: Tidak Tepat ≤ Waktu (Skor 25)

   H-3 < Tanggal penerimaan H-0: Tepat Waktu ≤ (Skor 75)

   Tanggal penerimaan H-3: Sangat Tepat Waktu ≤ (Skor 100)

   Penggunaan (Bobot 20%)

   Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: (Total Nilai Aset yang telah diPSP (SIMAN) / Total Aset) x 100%

3. **Penghapusan (Bobot 20%)**

   Persentase penghapusan adalah: (Nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui / Total barang rusak berat) x 100%

4. **Pemusnahan (Bobot 20%)**

   Satker yg tidak mengajukan pemusnahan selama thn berjalan (Skor 80)

   Satker yg melakukan rusak/using (Skor 60)

   Satker yg menindaklanjuti rusak/using pada tahap pengajuan persetujuan (Skor 80)

   Satker yg telah menyelesaikan proses penghapusan dengan cara pemusnahan rusak/using (Skor 100).

Komponen Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara pada Tahun 2024 Balai POM di Surakarta telah memperoleh nilai yang **memenuhi target yaitu 106,51%** (kriteria **"Sangat Baik"**).

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 136. Perbandingan Realisasi serta Capaian Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	88	93,73	106,51

Belum dapat dikatakan adanya kenaikan atau penurunan capaian Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dari tahun – tahun sebelumnya dikarenakan Indikator ini berlaku mulai tahun 2024, tetapi realisasi (93,73) sudah berhasil melampuai target (88) dan capaian kinerja tetap tercapai (106,51%).

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 137. Perbandingan Realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Tahun – Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	98,13	83,93	93,73	95,88

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 98,13 dan terendah Balai POM di Kediri dengan realisasi sebesar 83,93.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Kegiatan yang mendukung capaian Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2024, antara lain :

1) Seluruh aset sudah dilakukan PSP;
2) Tanah hibah dari Pemkot Surakarta sudah dilakukan penilaian ulang.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 138. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	% REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	339.243.300	338.995.249	99,93	106,51%	0,07	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,07 pada Triwulan IV tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta atas capaian Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara adalah sebagaimana penetapan target Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Balai POM di Surakarta adalah flat selama satu tahun pelaporan sebesar 88 dan telah memperhatikan atas rencana kerja hasil monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan. Dalam menyikapi hal ini, Balai POM di Surakarta secara berkelanjutan melakukan strategi – strategi dalam memepertahankan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, sampai dengan Tahun 2024 berakhir dilakukan melalui beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan meliputi:

1. Melakukan pengiriman untuk Laporan Barang Milik Negara H-3 untuk mendapatkan nilai 100;
2. Melakukan pengiriman untuk Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara H-3 untuk mendapatkan nilai 100;
3. Melakukan Penetapan Status Penggunaan BMN paling lambat 6 bulan setelah BMN diterima oleh satuan kerja, oleh karenanya sesegera mungkin dilakukan pengajuan PSP BMN;

4. Berkoordinasi dengan KPKNL untuk melakukan penilaian kembali atas tanah dan bangunan hasil hibah;
5. Melakukan penghapusan dan pemusnahan atas aset yang sudah rusak berat dan persediaang yang sudah usang atau rusak.

g. Upaya peningkatan kinerja

Pelaksanaan monitoring atas pencapaian komponen yang mendukung pencapaian target nilai pengelolaan barang milik negara, sebagaimana yang telah berkala dilakukan pemantauan yaitu meliputi:

1. Pemantauan Penatausahaan BMN melalui apliakasi SIMAK V3;
2. Selalu tepat dalam melakukan pengiriman CRBMN dan RKBMN;
3. Memonitoring dan Evaluasi permohonan PSP;
4. Memonitoring dan Evaluasi permohonan Penghapusan dan Pemusnahan;

4. Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 139. Realisasi Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Balai POM di Surakarta Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	97,80	163,00	Tidak dapat disimpulkan

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).

Capaian Tahun 2024 Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri yaitu 163,00% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2023)

Tabel 140. Perbandingan Realisasi serta Capaian Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Tahun 2024 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	60	97,80	163,00

Balai POM di Surakarta baru mendapatkan IKU Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri pada tahun 2024 dengan Target sebesar 60 dan realisasi sebesar 97,80 sehingga Capaian Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Balai POM di Surakarta tahun 2024 yaitu sebesar 163,00% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 141. Perbandingan Realisasi Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Balai POM di Surakarta Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM KEDIRI	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM TARAKAN
Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	75,10	73,79	97,80	92,71

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam negeri tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta, Balai POM di Tarakan Dan yang terendah adalah Balai POM di Kediri dengan realisasi sebesar 73,79%.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Balai POM di Surakarta berhasil mencapai target Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri pada tahun 2024 dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Beberapa kegiatan yang menyebabkan peningkatan kinerja yaitu Target tahun 2024 yang rendah karena menggunakan baseline realisasi tahun sebelumnya sedangkan satker dituntut untuk mengimplementasikan instruksi presiden terkait dengan penggunaan produk dalam negeri.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 142. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN 2024	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Neger	629.818.600	629.471.702	99,94	163,00	0,63	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,63 pada tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri.

f. Analisis program/kegiatan penyebab pencapaian kinerja

Indikator Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri pada tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Kegiatan yang menyebabkan pencapaian Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeripada tahun 2024 yaitu Target tahun 2024 yang terlalu rendah karena menggunakan baseline realisasi tahun sebelumnya sedangkan satker dituntut untuk mengimplementasikan instruksi presiden terkait dengan penggunaan produk dalam negeri

g. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri antara lain:

1. Pemantauan Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP (Rencana Umum Pengadaan)
2. Monitoring Realisasi Pemilihan Belanja PDN
3. Melaksanakan intruksi presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3.2. EVALUASI AKHIR PERIODE RENSTRA (TAHUN KE-5)

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM, Balai POM di Surakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang merupakan satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Diresmikan oleh Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito, pada tanggal 20 September 2018 berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagai Loka POM di Kota Surakarta yang kemudian mengalami peningkatan klasifikasi UPT menjadi Balai POM di Surakarta sejak tanggal 24 Oktober 2023.

1) Analisis Tren Kinerja

Berdasarkan data tren kinerja dari tahun 2021 hingga 2024, beberapa indikator menunjukkan peningkatan capaian yang signifikan, namun terdapat beberapa indicator yang mengalami penurunan. Salah satu indikator yang menunjukkan tren positif adalah persentase obat yang memenuhi syarat, di mana realisasinya terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun terdapat sedikit penurunan pada beberapa periode tertentu. Sebaliknya, persentase makanan yang memenuhi syarat mengalami fluktuasi, dengan beberapa tahun menunjukkan pencapaian di bawah target yang telah ditetapkan. Untuk mengevaluasi arah pencapaian target tahun 2024, dilakukan perhitungan rata-rata pertumbuhan tahunan guna memastikan tren kinerja tetap berada di jalur yang benar. Secara keseluruhan, sebagian besar indikator berada dalam kategori "Meningkat (On The Track)", namun terdapat pula beberapa indikator yang mengalami penurunan, sehingga memerlukan perhatian khusus untuk perbaikan lebih lanjut.

- **Indikator yang Mengalami Kenaikan yaitu :**

1. **Persentase Obat yang memenuhi syarat**

   Capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat, terlihat pola tren yang awalnya positif pada tahun 2021 (93,28% melampaui target 90,50%), kemudian mengalami penurunan signifikan di tahun 2022 (83,76%, di bawah target 91,00%). Setelah itu, kinerja meningkat tajam pada tahun 2023 (97,37%, melampaui target 91,50%) dan diproyeksikan semakin naik hingga 99,17% di tahun 2024 (juga melampaui target 97,40%). Meskipun terjadi penurunan pada 2022 yang menjadi titik terendah, namun diikuti perbaikan yang signifikan dalam pengawasan dan standar kualitas tren peningkatan yang kuat pada 2023 dan proyeksi 2024 menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam pencapaian kinerja. Tren peningkatan pada angka-angka terakhir mengindikasikan perbaikan dalam proses dan pengawasan, sehingga menghasilkan persentase yang jauh lebih tinggi dibandingkan pencapaian sebelumnya.

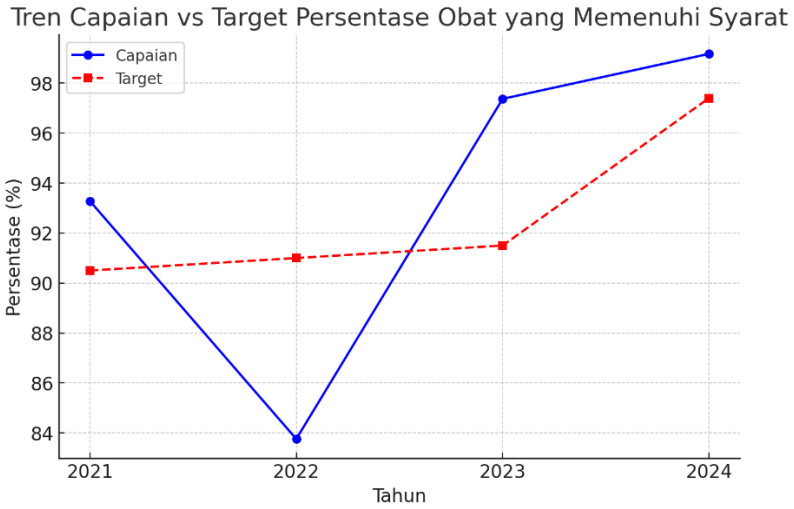

2. **Persentase Makanan yang memenuhi syarat**

   Persentase Makanan yang memenuhi syarat menunjukkan tren yang umumnya meningkat dari tahun ke tahun meskipun sempat tahun 2021 dan 2022 berada di bawah target. Pada tahun 2023 realisasi mencapai 95,35% sehingga terjadi kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2024 target 95,40% dengan realisasi 95,65%, yang mengindikasikan terjadinya pencapaian melebihi target. Hal ini menunjukkan optimisme bahwa kinerja akan terus membaik, tren positif ini mengindikasikan peningkatan efektivitas pengawasan dan kepatuhan terhadap standar mutu makanan.

3. **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan**

   Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 target 89,20% dengan realisasi 78,85% (belum memenuhi target), tahun 2022 target 89,40% dengan realisasi 68,63% menunjukkan adanya tantangan dalam pemenuhan standar mutu dan keamanan obat. Tahun 2023 target 89,60% dengan realisasi 88,24% sedangkan tahun 2024 target 90,00% dan terealisasi 100% menandakan peningkatan kualitas pengawasan dan kepatuhan industri farmasi, kebijakan dan praktik pengawasan akan terus ditingkatkan, sehingga standar keamanan dan mutu obat dapat terjaga. Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan proses perbaikan berkelanjutan dalam memastikan obat yang beredar di masyarakat semakin aman dan bermutu.

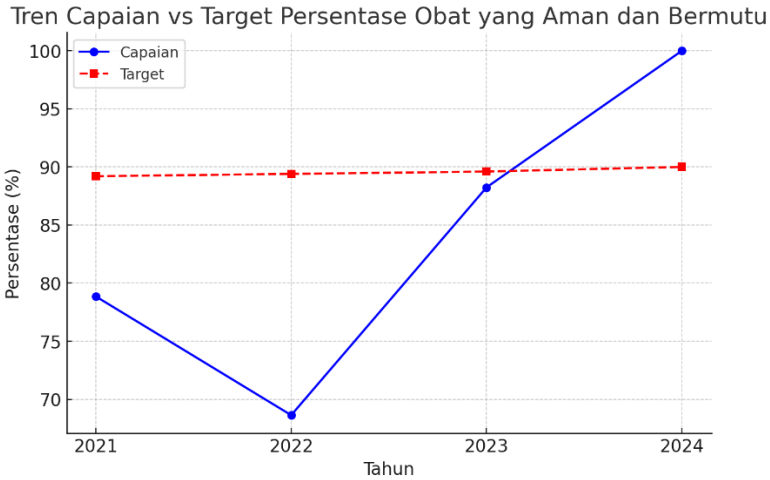

4. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

   Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, terlihat tren kinerja yang positif dan konsisten meningkat. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 91,07%, melampaui target

87%. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 99,13% dibandingkan target 89%, serta pada 2023 yang mencapai 99,25% melebihi target 91%. Pencapaian untuk tahun 2024 juga menunjukkan pertumbuhan dengan target 99,30% dan realisasi yang diproyeksikan mencapai 100%.

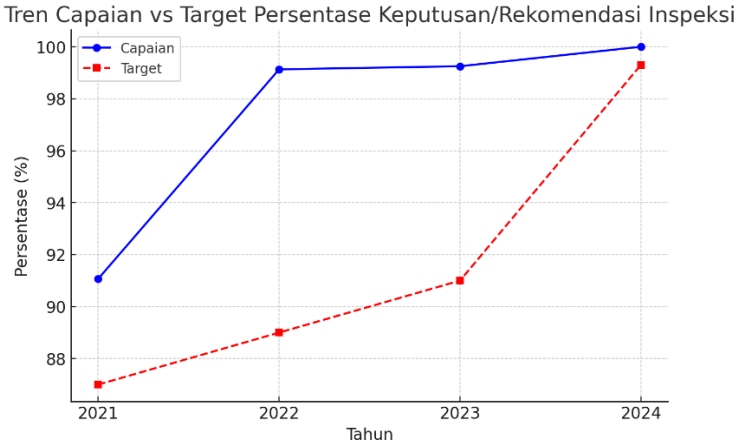

Analisis kinerja menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan indikator ini terus membaik, dengan nilai perkembangan kinerja yang dikategorikan Meningkat. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam implementasi inspeksi dan tindak lanjut keputusan/rekomendasi terhadap sarana produksi dan distribusi, sehingga strategi yang diterapkan saat ini perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan untuk memastikan pencapaian target yang optimal di masa mendatang.

5. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

   Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terlihat adanya tren peningkatan kinerja yang signifikan. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 78,95%, sedikit melebihi target 78%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan realisasi 90,78% melampaui target 80%, serta pada tahun 2023 di mana realisasi mencapai 92,86%, lebih tinggi dari target 83%. Hasil pencapaian untuk tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut dengan target 92,90% dan realisasi yang diproyeksikan mencapai 96,90%.

Analisis kinerja menunjukkan perkembangan yang stabil dan dikategorikan sebagai "Meningkat (On The Track)." Tren ini mencerminkan efektivitas sistem tindak lanjut rekomendasi inspeksi oleh pemangku kepentingan, sehingga strategi yang telah diterapkan perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan pencapaian target yang optimal.

6. **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, menunjukkan kinerja secara konsisten meningkat setiap tahun. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 81,32% melebihi target 72%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, di mana realisasi masing-masing tercatat 85,96% dan 89,60%, lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan. Pencapaian untuk 2024 adalah 98,13%, melampaui target 95%.

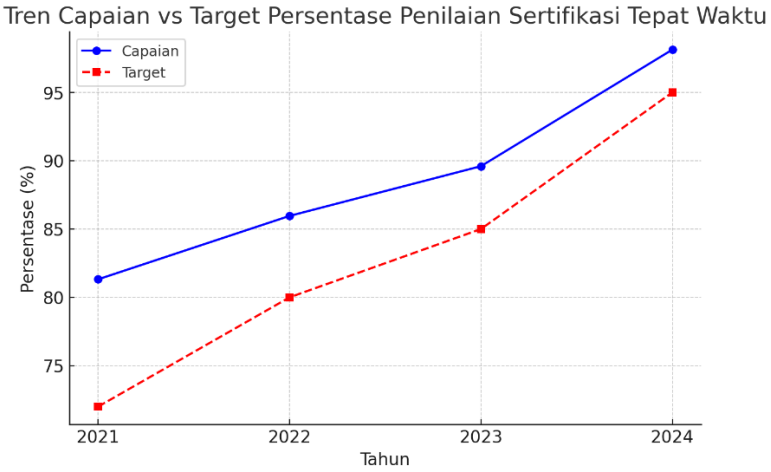

Dari analisis kinerja, nilai perkembangan sebesar 93,39 dikategorikan sebagai “Meningkat (Moderat),” menandakan bahwa meski trennya positif, peningkatan tersebut belum mencapai level yang sangat signifikan. Namun demikian, keberhasilan ini menunjukkan efektivitas proses sertifikasi,

sehingga upaya pemeliharaan dan penguatan strategi tetap diperlukan agar target tahun berikutnya dapat tercapai dengan optimal.

7. **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

   Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, untuk indikator kinerja tersebut sempat menurun pada awal periode namun kemudian menunjukkan perbaikan secara bertahap. Pada 2021, realisasi (47,83%) masih di bawah target (59,00%), dan situasi serupa berlanjut di 2022 dengan realisasi 35,71%—jauh di bawah target 63,00%. Meski demikian, mulai 2023 terjadi perbaikan kinerja (52,73%) mendekati target 66,00%, dan pada 2024 realisasi 62,71% bahkan melampaui target 60,00%. Dengan baseline tahun 2021 di angka 47,83% dan capaian terkini tahun 2023 sebesar 52,73%, laju pertumbuhan indikator dikategorikan "Meningkat (Moderat)" dengan nilai perkembangan kinerja 63,67.

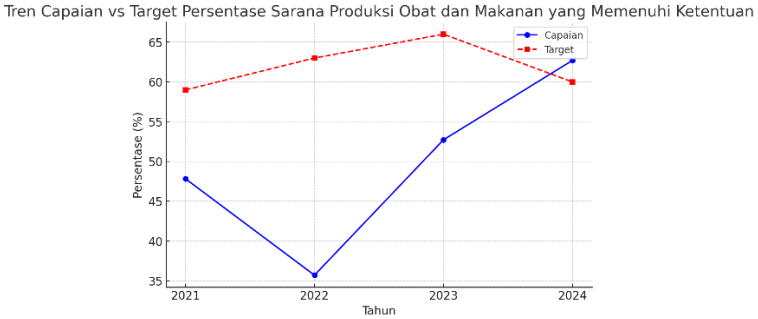

   Hasil ini mencerminkan bahwa strategi peningkatan mutu sarana produksi mulai efektif, namun perlu terus diperkuat agar target 2024 sebesar 60,00% dapat dicapai dan dipertahankan.

8. **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

   Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan memiliki pola kinerja yang sempat berfluktuasi namun secara keseluruhan menunjukkan tren positif. Pada tahun 2021 realisasi mencapai 65,94% dan berhasil melampaui target 60,00%. Meskipun pada tahun 2022 realisasi turun menjadi 57,14% (di bawah target 63,00%), kinerja kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024 dengan realisasi masing-masing 70,98% serta 76,36%, keduanya melampaui target yang ditetapkan (66,00% dan 71,00%). Jika dibandingkan baseline tahun 2021 (65,94%) dan capaian terkini tahun 2023 (70,98%), perhitungan laju pertumbuhan menghasilkan nilai perkembangan kinerja meningkat.

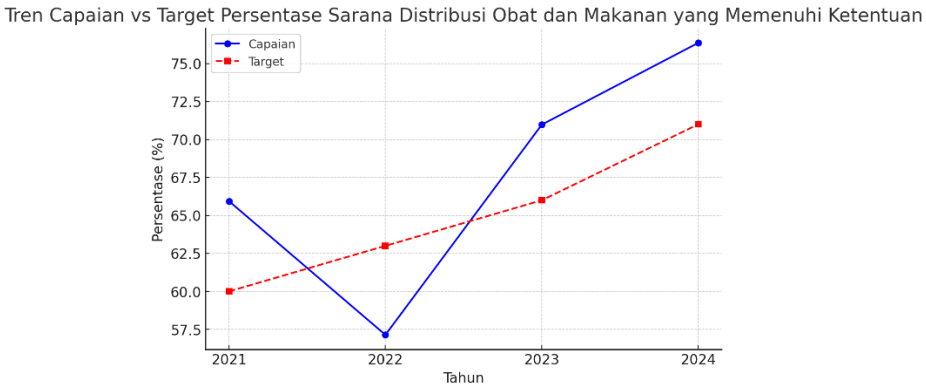

Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi pengawasan dan penjaminan mutu sarana distribusi Obat dan Makanan berjalan efektif, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan agar target 2024 dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya.

9. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Data menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan memiliki tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, realisasi sebesar 90,24% melampaui target 89,00%, kemudian terus meningkat hingga 95,14% pada tahun 2023, melebihi target 92,60%. Prognosis untuk tahun 2024 juga positif, diperkirakan mencapai 96,60% di atas target 96,00%. Dengan baseline 2021 di angka 90,24% dan capaian terkini tahun 2023 sebesar 95,14%, laju pertumbuhan menghasilkan nilai perkembangan kinerja yang meningkat.

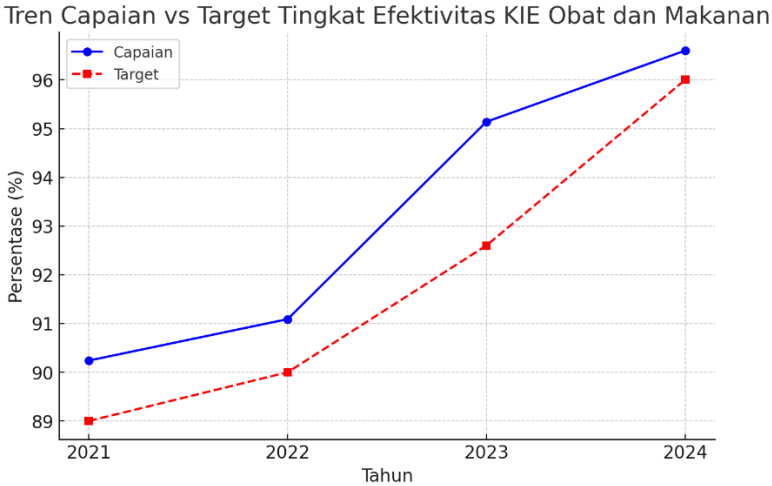

Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan berjalan efektif dan perlu terus diperkuat salah satunya dengan cara memanfaatkan media cetak (brosur, poster,

leaflet), media elektronik (radio, televisi), serta platform digital (website, media sosial, aplikasi seluler) untuk menjangkau lebih banyak orang untuk mencapai serta mempertahankan target di masa mendatang.

10. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan terlihat bahwa kinerja penindakan umumnya melampaui target yang ditetapkan setiap tahun, meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Misalnya, realisasi pada tahun 2021 mencapai 87,50% (di atas target 65,00%), kemudian pada tahun 2022 dan tahun 2023 realisasi masih berada di atas target walaupun angkanya sedikit menurun. Namun, capaian tahun 2024 kembali meningkat hingga 88,00% dan melampaui target 78,00%.

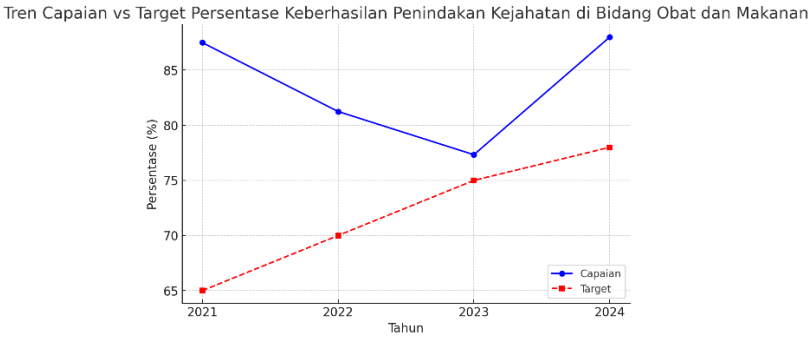

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan menunjukkan penurunan tipis jika dibandingkan baseline, tetapi indeks perkembangan kinerja berada di kategori meningkat. Artinya, meskipun ada dinamika tahunan, tren jangka panjang masih menunjukkan kemajuan dalam hal keberhasilan penindakan. Dengan menerapkan strategi-strategi seperti meningkatkan kompetensi berkala bagi petugas, memanfaatkan data analytics dan big data untuk mengidentifikasi pola distribusi ilegal, memetakan jaringan pelaku, serta mendukung proses investigasi secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat terus meningkat, sehingga perlindungan masyarakat terhadap risiko kesehatan dapat terjamin.

11. Indeks Profesionalitas ASN UPT

Dalam Indeks Profesionalitas ASN UPT terlihat bahwa capaian indeks mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan baseline (tahun 2021) yang berada di angka 85,45. Pada tahun 2022 juga tetap di angka 85,45, sedangkan tahun 2023 realisasi mencapai 90,57 melewati target 86,00 dan menandakan lonjakan signifikan. Meski pada tahun 2024 realisasi (87,27) tampak sedikit lebih rendah dibanding capaian tahun 2023, secara keseluruhan tren sejak baseline masih menunjukkan kenaikan.

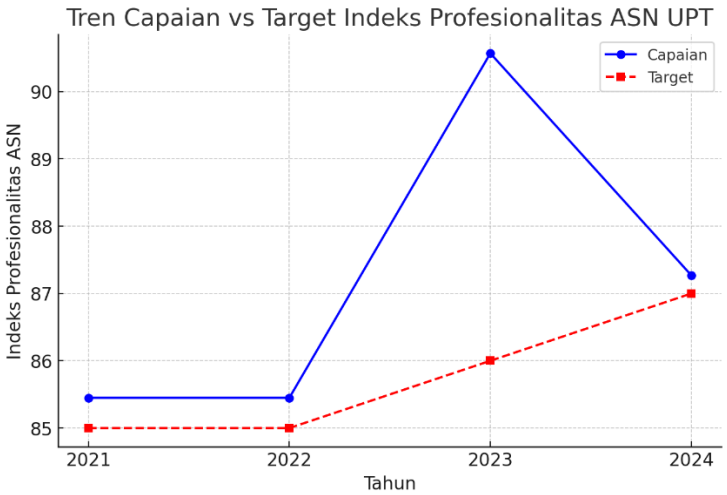

Hal ini tercermin dari nilai perkembangan kinerja yang dikategorikan Meningkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan profesionalitas ASN di UPT telah berjalan cukup efektif, namun perlu perhatian untuk menjaga konsistensi kinerja agar target tahun berikutnya dapat tercapai. Untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN UPT, sejumlah strategi dapat dilakukan secara terpadu. Pertama, penguatan budaya kinerja dan etika profesi perlu diwujudkan melalui sosialisasi kode etik, penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang adil, serta penanaman tanggung jawab dan integritas di setiap lini. Kedua, peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM harus terus didorong melalui pelatihan teknis, program pengembangan karier, serta pola pembinaan seperti coaching dan mentoring. Ketiga, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sangat penting guna memudahkan proses administrasi, mengoptimalkan penerapan e-kinerja, serta mempercepat pemantauan dan evaluasi kinerja. Keempat, penguatan kepemimpinan dan manajemen perubahan dapat dilakukan dengan mempersiapkan pimpinan sebagai teladan (role model) yang konsisten, disertai komunikasi internal yang terbuka dan efektif. Kelima, monitoring serta evaluasi berkelanjutan menjadi kunci untuk menilai efektivitas kebijakan, mengidentifikasi tantangan, dan menindaklanjuti masukan dengan langkah perbaikan konkret. Terakhir, kolaborasi dan benchmarking dengan instansi lain yang telah menerapkan praktik terbaik akan memperkaya inovasi serta menjaga tren peningkatan kinerja agar senantiasa berada pada jalur yang tepat.

12. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta, terlihat bahwa capaian kinerja anggaran cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi dalam rentang 90.51 hingga 91.23. Meskipun terjadi sedikit penurunan dari capaian tahun 2021 (91.19) ke tahun 2023 (90.73) dan tahun 2024 memiliki capaian 91,23, nilai ini masih berada dalam kategori "Meningkat (On The Track)", menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tetap terkendali dengan baik.

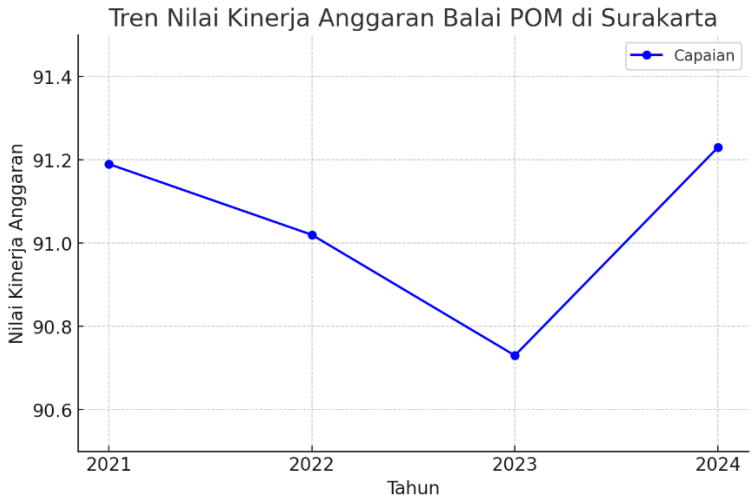

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, strategi yang dapat diterapkan meliputi penguatan perencanaan anggaran berbasis kinerja agar lebih efektif dan efisien, optimalisasi realisasi anggaran sesuai dengan target per triwulan, serta peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala. Selain itu, penggunaan sistem digitalisasi dalam manajemen keuangan dapat membantu meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Kolaborasi antar unit kerja dalam perencanaan dan eksekusi anggaran juga penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan prioritas organisasi. Dengan strategi ini, diharapkan nilai kinerja anggaran dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam jangka panjang.

Semua indikator di atas memiliki status "Meningkat", baik dalam kategori "On The Track" maupun "Moderat".

- **Indikator yang Mengalami Penurunan**

1. **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan**
   Berdasarkan data untuk Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu, terlihat bahwa pada awalnya realisasi kinerja berada di atas target (misalnya pada tahun 2021, realisasi 96,67% melebihi target 74%). Kondisi serupa terjadi di tahun-tahun berikutnya, di mana realisasi umumnya tetap lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan. Namun, jika diamati lebih jauh, tren capaian menunjukkan penurunan dari 96,67% pada tahun 2022 menjadi 84,21% pada tahun 2023, dan meskipun target tahun 2024 dinaikkan hingga 97,60%, realisasinya hanya mencapai 89,47%.

Penurunan ini tercermin dalam analisis kinerja yang menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, indikator tersebut menunjukkan tren cenderung menurun, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian strategi pengawasan agar target pada tahun selanjutnya dapat tercapai.

1) Analisis Gap Kinerja

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan (gap analysis), ditemukan bahwa beberapa indikator memiliki perbedaan signifikan antara target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai. Indikator dengan pencapaian yang sesuai atau melampaui target dikategorikan sebagai "**Sangat Baik**" atau "**Baik**", menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan serta kinerja yang stabil. Namun, terdapat pula indikator yang belum mencapai target dan dikategorikan sebagai "**Cukup**" atau "**Kurang**". Beberapa faktor yang mempengaruhi kesenjangan ini antara lain efektivitas implementasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta faktor eksternal yang dapat mempengaruhi capaian kinerja. Terdapat beberapa indicator yang tidak dapat dilakukan analisis gap pertahun, yaitu:

Tabel 143. Indikator Kinerja

No.	Indikator	Tahun Pelaksanaan
1	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	2022
2	Nilai AKIP BPOM di Surakarta	2022
3	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2022
4	Presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	2023

5	Nilai Pengelolaan Kearsipan	2024
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	2024
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	2024
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	2024
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	2024
10	Indeks Pelayanan Publik	2024
11	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan	2024
12	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	2024
13	Jumlah desa pangan aman	2024
14	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2024
15	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	2024
16	Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan barangdan Jasa	2024
17	Nilai Pengelolaan BMN	2024
18	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	2024

Indikator Kinerja Direktif

Tabel 144. Indikator Kinerja Direktif

No.	Indikator	Tahun Mulai Pelaksanaan	Nilai	
			2023	2024
1	Nilai Pengelolaan Kearsipan	2023	50,43	85,66

2	Nilai Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2023	83.33	95
3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	2023	57.46	93,73
4	Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Kabupaten/Kota	2023	89.05	104,84
5	Persentasi keterlibatan SAKA POM di Kabupaten Kota	2023	40	-
6	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	2024	-	97,80

Selain indikator kinerja utama, terdapat indicator kinerja direktif yang diturunkan ke UPT BPOM Surakarta sejak tahun 2023. Tidak semua indicator kinerja direktif dimasukkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK), contohnya adalah indicator kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan dan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang di tahun 2023 tidak masuk ke dalam dokumen PK namun di tahun berikutnya (2024) masuk ke dalam dokumen PK.

Dari Indikator direktif yang ditetapkan, terdapat indicator kinerja direktif yang hanya diturunkan Tahun 2023 maupun 2024 saja, namun adapula yang berkelanjutan ke tahun 2024. Nilai kinerja direktif yang berkelanjutan mengalami kenaikan yang signifikan untuk indikator-indikator sbb:

1. Nilai Pengelolaan kearsipan
2. Nilai Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
4. Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Kabupaten/Kota.

Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2019)	Tahun 2020 Target	Tahun 2020 Realisasi	Tahun 2021 Target	Tahun 2021 Realisasi	Tahun 2022 Target	Tahun 2022 Realisasi	Tahun 2023 Target	Tahun 2023 Realisasi	Tahun 2024 Target	Tahun 2024 Realisasi (Prognosa)	Keterangan	Baseline Tahun (t0)	Baseline Realisasi (at0)	Capaian Terkini Tahun (t)	Capaian Terkini Realisasi (at)	Target 2024 (a*)	N1 (2024-t0)	N2 (t-t0)	F1 ((at/at0)^(1/N1)) -1	F2 ((at/at0)^(1/N2)) -1	PERKEMBANGAN KINERJA Perkembangan Kinerja	PERKEMBANGAN KINERJA Kategori
														1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat				90,50	93,28	91,00	93,76	91,50	97,37	97,40	99,17		2021	93,28	2023	97,37	97,40	3	2	0,08	0,02	149,46	Meningkat (On The Track)
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat				97,00	94,29	97,2	90,91	97,40	95,35	95,40	95,65		2021	94,29	2023	95,35	95,40	3	2	0,00	0,01	143,40	Meningkat (On The Track)
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan				89,20	78,85	89,40	68,63	89,60	88,24	90,00	100,00		2021	78,85	2023	88,24	90,00	3	2	0,05	0,06	128,28	Meningkat (On The Track)
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan				74,00	96,67	73,00	96,30	76,00	84,21	97,60	89,47		2021	96,67	2023	84,21	97,60	3	2	0,00	-0,07	-2.085,63	Menurun
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat								90,00	80,00	85,00	75,00		2021		2023	80,00	85,00	3	2				
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT										72,56	62,77		2021		2023	66,56	72,56						
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan										90,40	97,34		2021		2023		90,40	3	2				
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan										74,41	80,50		2021		2023		74,41	3	2				
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM										95,75	96,20		2021		2023		95,75	3	2				
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan				87,00	91,07	89,00	99,13	91,00	99,25	99,30	100,00		2021	91,07	2023	99,25	99,30	3	2	0,03	0,04	150,30	Meningkat (On The Track)
	Persentase keputusan rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan				78,00	78,95	80,00	90,78	83,00	92,86	92,90	96,90		2021	78,95	2023	92,86	92,90	3	2	0,06	0,08	195,65	Meningkat (On The Track)
	Persentase keputusan penilaian certifikasi yang diselesaikan tepat waktu				72,00	81,32	75,00	85,96	80,00	89,60	95,00	98,13		2021	81,32	2023	89,60	95,00	3	2	0,05	0,05	93,39	Meningkat
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan				59,00	47,83	61,00	35,71	66,00	52,73	68,00	62,71		2021	47,83	2023	52,73	68,00	3	2	0,08	0,05	63,67	Meningkat (Moderat)
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan				60,00	65,94	63,00	57,14	66,00	70,90	71,00	76,36		2021	65,94	2023	70,90	71,00	3	2	0,02	0,04	150,35	Meningkat (On The Track)
	Indeks Pelayanan Publik										3,55	3,80		2021		2023		3,55	3	2				
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik						77,00	100,00	79,00	93,33	94,00	100,00		2021		2023	93,33	94,00	3	2				
	Persentase Ketersediaan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan										95,00	104,80		2021										
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan				89,00	90,24	90,00	91,09	92,60	95,14	96,00	96,60		2021	90,24	2023	95,14	96,00	3	2	0,02	0,03	120,56	Meningkat (On The Track)
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman										0,00	0,00		2021		2023		0,00	3	2				
	Jumlah desa pangan aman										1,00	1,00		2021		2023		1,00	3	2				
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya										1,00	1,00		2021		2023		1,00	3	2				
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		2021	50,00	2023	50,00	50,00	3	2	0,00	0,00		
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		2021	50,00	2023	50,00	50,00	3	2	0,00	0,00		
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing daerah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan				65,00	87,50	67,50	81,25	70,00	77,33	78,00	88,00		2021	87,50	2023	78,00	78,00	3	2	-0,04	-0,06	148,58	Meningkat (On The Track)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi RB (Tahun 2024 menjadi Indeks RB)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	74,39		2021	100,00	2023	75,00	75,00	3	2	-0,09	-0,13	146,52	Meningkat (On The Track)
	Persentase dokumen ketatausahaan yang disiporkan tepat waktu				100,00	100,00								2021	100,00	2023	100,00		3	2	-1,00	0,00	0,00	Stagnan
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu				100,00	100,00								2021	100,00	2023	100,00		3	2	-1,00	0,00	0,00	Stagnan
	Nilai AKIP BPOM di Surakarta						80,60	74,65	82,20	71,15	78,66	74,39		2021		2023	71,15	78,66	3	2				
	Nilai Pengelolaan Keuangan										76,64	85,66		2021										
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT				85,70	85,45	85,80	85,45	86,00	90,57	90,64	87,27		2021	85,45	2023	90,57	90,64	3	2	0,02	0,03	148,74	Meningkat (On The Track)
Meguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP										40,00	43,98		2021		2023		40,00	3	2				
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal						2,25	2,00	2,50	3,00	3,00	3,00		2021		2023	3,00	3,00	3	2				
Terkelolanya keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta				90,00	91,19	90,60	91,02	91,00	90,73	90,51	91,23		2021	91,19	2023	90,73	90,51	3	2	0,00	0,00	101,35	Meningkat (On The Track)
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Surakarta				98,00	100								2021	100	2023	91,19		3	2	-1,00	-0,05	4,50	Stagnan
	Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa										80	96		2021										
	Nilai Pengelolaan BMN										80	93,73		2021										
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri										60	97,45		2021										

3.3. EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan analisis data, terlihat bahwa beberapa indikator kinerja mengalami tren positif, sementara yang lain menunjukkan fluktuasi. Indikator Persentase obat yang memenuhi syarat mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, mencapai pertumbuhan yang signifikan pada tahun terakhir. Sebaliknya, indicator persentase makanan yang memenuhi syarat menunjukkan pola fluktuatif, dengan beberapa periode di bawah target yang ditetapkan. Indikator lain, seperti tingkat kepuasan masyarakat dan efektivitas inspeksi, juga mengalami pertumbuhan yang bervariasi. Secara keseluruhan, tren kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator berada dalam jalur pencapaian target, meskipun beberapa aspek memerlukan perhatian lebih lanjut untuk perbaikan berkelanjutan. Balai POM di Surakarta telah melaksanakan pemantauan secara berkala atas rencana tindak lanjut atas evaluasi hasil kinerja baik yang tercapai maupun kinerja yang masih terdapat kendala dalam pencapaiannya.

Berdasarkan rencana strategis BPOM di Surakarta pada RPJMN tahun 2020-2024, terdapat 9 (Sembilan) sasaran strategis dengan 22 indikator yang pada akhir periode renstra di tahun 2024 berkembang menjadi 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 37 indikator kinerja. Terdapat penambahan strategis pada stakeholder perspektif yaitu:

a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan dengan indikator kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
b. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan dengan 3 indikator yaitu :
   1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
   2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Pengukuran indikator kinerja kedua sasaran strategis baru tersebut diukur melalui survey yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Evaluasi ketercapaian sasaran strategis BPOM di Surakarta tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 145. Evaluasi ketercapaian sasaran strategis BPOM di Surakarta Tahun 2021-2024

Tujuan	Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	100,84	99,31	belum tercapai
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,22		
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,69		
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	116,26		
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88,56		
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	114,07	114,07	tercapai
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	107,68	105,48	tercapai
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja	108,29		

obat dan makanan	Pengawasan Obat dan Makanan			
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	100,47		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	106,46	105,89	tercapai
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	107,72		
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	110,71		
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80,54		
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	103,92		
	Indeks Pelayanan Publik	109,30		
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	118,13		
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan	110,32		
Meningktanya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	101,27	100,32	tercapai
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100,00		
	Jumlah desa pangan aman	100,00		
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100,00		

Mneingkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	tercapai
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00		
Meningktanya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	119,57	119,57	tercapai
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi RB (Tahun 2024 menjadi Indeks RB)	99,80	100,56	tercapai
	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00		
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00		
	Nilai AKIP BPOM di Surakarta	91,25		
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	111,77		
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	100,22	100,22	tercapai
Meguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	109,95	106,46	tercapai
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	102,96		

Terkelolanya keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta	100,35	109,18	tercapai
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Surakarta	111,11		
	Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan barangdan Jasa	118,75		
	Nilai Pengelolaan BMN	106,51		
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	162,42		

Dari 11 sasaran strategis BPOM di Surakarta, 10 di antaranya tercapai di akhir RPJMN tahun 2020-2024. Sasaran strategis yang tidak tercapai adalah Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT dengan nilai 99,31%. Penyumbang ketidaktercapaian sasaran adalah pada indicator:

1. **Persentase Makanan yang memenuhi syarat**
   Nilai rata-rata pencapaian indicator persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2021 sampai dengan 2024 adalah 97,22%. Indikator ini menunjukan rata-rata profil peredaran pangan olahan memenuhi syarat yang beredar di wilayah kerja BPOM di Surakarta belum mencapai target yang ditetapkan selama 4 tahun yaitu di tahun 2021 sampai dengan 2024.
2. **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**
   Nilai rata-rata pencapaian indicator persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 sampai 2024 adalah 93,69%. Indikator ini menunjukkan peredaran Obat (obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen Kesehatan) beresiko tinggi (berdasarkan analisis risiko yang dilakukan) yang beredar di wilayah kerja belum mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2021 sampai 2024. Penyebab ketidaktercapaian target adalah pada pemenuhan produk kosmetik dan obat bahan alam, diantaranya terkait dengan penandaan dan kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan Higiene dan Sanitasi produk tersebut.
3. **Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat**
   Nilai rata-rata pencapaian indicator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2023 dan 2024 adalah 88,56%. Dalam rangka pemenuhan gizi Masyarakat, pemerintah mewajibkan penambahan fortifikan tertentu pada jenis-jenis pangan tertentu, di antaranya garam konsumsi beryodium, tepung terigu yang ditambahkan zat besi, vitamin B1 dan B2 serta minyak goreng yang ditambahkan vitamin A. Indikator kinerja ini mulai dimasukkan ke dalam sasaran strategis di tahun 2023, sehingga hasil ini menggambarkan peredaran pangan fortifikasi di wilayah BPOM di Surakarta di dua tahun terakhir yang hasilnya belum memenuhi target yaitu 85% di 2024.

Nilai rata-rata realisasi persentase pangan fortifikasi memenuhi syarat di 2 tahun terakhir adalah 77,5.

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-5 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rata-rata				90,50	93,28	103,072	91,00	83,76	92,044	91,50	97,37	106,415	97,40	99,17	101,817	100,837	99,3136	belum tercapai
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Kumulatif				97,00	94,29	97,2062	97,2	90,91	93,5288	97,40	95,35	97,8953	95,40	95,65	100,262	97,2231		
	Persentase Obat yang aman dan bermutu	Rata-rata				89,20	78,85	88,3969	89,40	68,63	76,7673	89,60	88,24	98,4821	90,00	100,00	111,111	93,6894		
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu	Rata-rata				74,00	96,67	130,635	73,00	96,30	131,918	76,00	84,21	110,803	97,60	89,47	91,6701	116,256		
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rata-rata										90,00	80,00	88,8889	85,00	75,00	88,2353	88,5621		
Meningkatnya kesadaran	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index)	Tahun ke-5													72,56	82,77	114,071	114,071	114,071	tercapai
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian														90,40	97,34	107,677	107,677	105,48	tercapai
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja														74,41	80,58	108,292	108,292		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan														95,75	96,20	100,47	100,47		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi					87,00	91,07	104,678	89,00	99,13	111,382	91,00	99,25	109,066	99,30	100,00	100,705	106,458		
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi					78,00	78,95	101,218	80,00	90,78	113,475	83,00	92,86	111,88	92,90	96,90	104,306	107,72		
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang					72,00	81,32	112,944	75,00	85,96	114,613	80,00	89,60	112	95,00	98,13	103,295	110,713		
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang					59,00	47,83	81,0678	63,00	35,71	56,6825	66,00	52,73	79,8939	60,00	62,71	104,517	80,5402		
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang					60,00	65,94	109,9	63,00	57,14	90,6984	66,00	70,98	107,545	71,00	76,36	107,549	103,923		
	Indeks Pelayanan Publik														3,55	3,88	109,296	109,296		
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi								77,00	100,00	129,87	79,00	93,33	118,139	94,00	100,00	106,383	118,131		
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan														95,00	104,80	110,316	110,316	105,887	tercapai
Meningktanya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan					89,00	90,24	101,393	90,80	91,09	100,319	92,60	95,14	102,743	96,00	96,60	100,625	101,27		
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak														8,00	8,00	100	100		
	Jumlah desa pangan aman														1,00	1,00	100	100		
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya														1,00	1,00	100	100	100,318	tercapai
Mneingkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji					50,00	50,00	100	50,00	50,00	100	50,00	50,00	100	50,00	50,00	100	100		
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji					50,00	50,00	100	50,00	50,00	100	50,00	50,00	100	50,00	50,00	100	100	100	tercapai
Meningktanya efektivitas	Persentase keberhasilan penindakan keiahatan di					65,00	87,50	134,615	67,50	81,25	120,37	70,00	77,33	110,471	78,00	88,00	112,821	119,569	119,569	tercapai
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi RB					100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	75,00	74,39	99,1867	99,7967		
	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan					100,00	100,00	100										100		
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian					100,00	100,00	100										100		
	Nilai AKIP BPOM di Surakarta								80,60	74,65	92,6179	82,20	71,15	86,5572	78,66	74,39	94,5716	91,2489		
	Nilai Pengelolaan Kearsipan														76,64	85,66	111,769	111,769	100,563	tercapai
Terwujudnya SDM UPT	Indeks Profesionalitas ASN UPT					85,70	85,45	99,7083	85,80	85,45	99,5921	86,00	90,57	105,314	90,64	87,27	96,282	100,224	100,224	tercapai
Meguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat														40,00	43,98	109,95	109,95		
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang								2,25	2,00	88,8889	2,50	3,00	120	3,00	3,00	100	102,963	106,456	tercapai
Terkelolanya keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta					90,00	91,19	101,322	90,60	91,02	100,464	91,80	90,73	98,8344	90,51	91,23	100,795	100,354		
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di					90,00	100	111,111										111,111		
	Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan barangdan Jasa														80	95	118,75	118,75		
	Nilai Pengelolaan BMN														88	93,73	106,511	106,511		
	Negeri														60	97,8	163	163	119,945	tercapai

3.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Matriks Tindak lanjut Rekomendasi tahun 2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	**Persentase Obat yang memenuhi syarat**	capaian 101,79%	Koordinasi dengan Balai penguji dan melakukan monitoring kegiatan sampling dan pengujian Obat	Akhir TW IV	Koordinasi dengan Balai penguji dan melakukan monitoring kegiatan sampling dan pengujian Obat			capaian 101,82%
		capaian 101,79%	Pengaturan jadwal petugas sampling dan berkoordinasi dengan katim yang lain	Akhir TW IV	Pengaturan jadwal petugas sampling dan berkoordinasi dengan katim yang lain			capaian 101,82%
2	**Persentase Makanan yang memenuhi syarat**	Tercapai capaian 100,26%	Melakukan Koordinasi dengan Balai Penguji	TW IV	Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji Semarang, Yogjakarta, Bandung, Serang, DKI Jakarta			Tercapai capaian 100,26%
		Tercapai capaian 100,26%	Melakukan monitoring kegiatan sampling	TW IV	Melakukan montoring kegiatan sampling			Tercapai capaian 100,26%

3	**Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**	Tercapai capaian 111.11%	Koordinasi dengan Balai penguji dan melakukan monitoring kegiatan sampling dan pengujian Obat	Akhir TW IV	Koordinasi dengan Balai penguji dan melakukan monitoring kegiatan sampling dan pengujian Obat			Tercapai capaian 111.11%
		Tercapai capaian 111.11%	Pengaturan jadwal petugas sampling dan berkoordinasi dengan katim yang lain	Akhir TW IV	Pengaturan jadwal petugas sampling dan berkoordinasi dengan katim yang lain			Tercapai capaian 111.11%
4	**Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**	Capaian 88,80%	Melakukan reviuw Target Indikator Kinerja	TW IV	Melakukan reviuw Target Indikator Kinerja			Sudah dilakukan review target
5	**Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat**	Capaian 88.24%	Melakukan reviuw Target Indikator Kinerja	TW IV	Melakukan reviuw Target Indikator Kinerja			Sudah dilakukan review target
6	**Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**	Capaian 100,70%	Monitoring terhadap tindak lanjut yang dilaksanakan dari Pusat/UPT lain.	TW IV	Membuat tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			Capaian 100,70%
7	**Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**	Telah dilakukan monitoring feedback TW III	Melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Surakarta		Dilakukan monitoring feedback TW IV			Telah dilakukan monitoring feedback hingga TW IV
		Telah dilakukan desk CAPA pada TW II	Melakukan desk CAPA di kantor Balai POM di Surakarta oleh petugas terkait		Telah desk CAPA pada tanggal 21 Juni 2024 dan 28 November 2024			Telah dilakukan desk CAPA TW II dan TW IV
8	**Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**	Pelaku usaha kesulitan memahami layanan sertifikasi	Penyusunan panduan layanan sertifikasi	TW IV	pengumpulan materi layanan sertifikasi	penyusunan panduan layanan sertifikasi dalam bentuk brosur atau buku saku	s.d triwulan 4 tahun 2025	Telah memiliki brosur layanan IP CPPOB
9	**Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**		Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap penerapan GMP		Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha agar pelaku usaha menerapkan GMP			Program Satu Dahsyat bertempat di PT Deltomed Laboratories dan diikuti oleh 31 pelaku usaha

			Melakukan pertemuan evaluasi dengan internal secara periodik	Oktober	Melakukan pertemuan evaluasi dengan internal secara periodik			Sudah dilakukan sharing informasi melalui grup whatsap (internal)
10	**Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**		Melakukan monitoring hasil kinerja secara periodik		Pembahasan hasil pengawasan sarana distribusi saat rapat progresif			
11	**Indeks Pelayanan Publik**	Penggunaan televisi yang tersedia di ruang layanan sebagai tempat publikasi layanan belum optimal	Menyusun rencana pemenuhan rekomendasi penilaian UPP Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkesinambungan baik secara kualitas maupun kuantitas		Optimalisasi penggunaan televisi yang tersedia di ruang layanan sebagai tempat publikasi layanan dan informasi Keamanan Obat dan Makanan			Televisi digunakan sebagai tempat publikasi layanan dan informasi keamanan Obat dan Makanan
12	**Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik**		Pendamp ingan CAPA hasil evaluasi	TW IV	Dilakukan pendampingan CAPA atas evaluasi untuk komoditi OT dan Kosmetik			Dilakukan Desk CAPA pada tanggal 16 Desember untuk pelaku usaha UMKM
		Audit UMK PO 5 sarana	Sertifikas i UMK PO	TW IV	-	Akan dilakukan sertifikasi lapangan untuk UMK PO yang belum diaudit	Triwulan I Tahun 2025	Terlaksana Audit UMK PO 6 sarana
		Tersedia monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan UMKM pada TW 3	Monitori ng target pendamp ingan UMKM	TW IV	Telah dilakukan monitoring UMKM yang didampingi	-	-	Tersedia monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan UMKM pada TW 4
13	**Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota**	1. TPPS Sukoharjo belum mendapatkan data Hasil Pengawasan Pangan Fortifikasi	1. Koordinasi dan Audiensi dengan TPPS Kab Sukoharjo atau Wonogiri terkait Pangan Fortifikasi.	TW IV	1. Telah dilakukan koordinasi dan audiensi dengan TPPS Kab Wonogiri dan Kab. Sukoharjo			1. Tersedianya hasil pengawasan pangan fortifikasi yang disampaikan ke TPPS Sukoharjo.
		2. Belum Tersedianya rencana pembentukan TKPPOM dan rencana pelaksanaan kegiatan sidak obat dan makanan ilegal.	2. Melanjutkan Audiensi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen terkait pembentukan TKKPOM di Kab. Sragen.	TW IV	2. Telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kab. Sragen			2. Telah disampaikan terkait Pentingnya Pembentukan TKPPOM Ke Pemda Kab Sragen

		3. Belum tersedianya data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK NF POM Triwulan IV	3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK NF POM Triwulan IV	TW IV	3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK NF POM Triwulan IV			3. Telah tersedianya data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK NF POM Triwulan IV
14	**Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan**	1. KIE melalui media sosial pada bulan September tahun 2024 dengan tema utama Jalan panjang produk Obat dan Makanan 2. Total KIE melalui pameran dan penyuluhan sampai dengan bulan September tahun 2024: 26 kali	Melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan KIE yang telah berjalan rutin sejak triwulan I tahun 2024	TW IV	1. Melakukan KIE secara rutin dan terjadwal melalui media sosial Balai POM di Surakarta sepanjang tahun 2024. Tema yang diangkat telah diselaraskan dengan Agenda Setting Media Sosial BPOM 2024 2. Melakukan KIE DIPA dan memenuhi permohonan narasumber dari pihak eksternal			1. KIE melalui media sosial pada bulan tahun 2024 telah sesuai agenda setting tahunan 2. Total KIE melalui pameran dan penyuluhan sampai dengan bulan Desember tahun 2024: 36 kali
		Jumlah berita aktual dengan total publikasi sampai dengan bulan September tahun 2024 sebanyak 20 dan pembaca lebih dari 2.000	Melakukan publikasi dan penyebaran informasi melalui platform baru yaitu subsite UPT Balai POM di Surakarta	TW IV	Melakukan publikasi kegiatan UPT melalui subsite UPT Balai POM di Surakarta			Jumlah berita aktual dengan total publikasi sampai dengan bulan Desember tahun 2024 sebanyak 24 dan pembaca lebih dari 2.400
		Tingkat efektivitas KIE pada bulan September tahun 2024 yaitu 96,24 dengan jumlah responden: 85 orang (target: 155 orang)	Melanjutkan metode survei yang telah terlaksana dengan baik	TW IV	1. Pemilihan responden lebih heterogen 2. Pendampingan saat pengisian agar jenis KIE yang dipilih sesuai dengan yang diterima oleh responden			Tingkat efektivitas KIE tahun 2024 yaitu 96,6 dengan jumlah responden: 160 orang (target: 155 orang)
15	**Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman**	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman telah dilakukan namun belum dilaporkan melalui aplikasi siapsapa	Menyusun laporan pelaksanaan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman		Laporan pelaksanaan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman telah selesai disusun dan dilaporkan melalui aplikasi siapsapa			Pelaksanaan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman telah dilaporkan melalui aplikasi siapsapa

16	**Jumlah desa pangan aman**	Perlu pemantauan agar pelaksanaan pengawasan post-intervensi dan monev program tepat waktu; Progres jumlah desa pangan aman sampai bulan September tahun 2024 sebesar 77%	1. Penyelesaian laporan bimtek komunitas, fasilitasi, dan pengawasan pre-intervensi 2. Pelaksanaan pengawasan post-intervensi 3. Pelaksanaan monev desa panga naman 4. Persiapan lomba desa pangan aman	TW IV	1. Penyelesaian laporan bimtek komunitas, fasilitasi, dan pengawasan pre-intervensi 2. Pelaksanaan pengawasan post-intervensi 3. Pelaksanaan monev desa panga naman 4. Persiapan lomba desa pangan aman			Progres jumlah desa pangan aman sampai bulan Desember tahun 2024 sebesar 100%
17	**Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya**	Progres jumlah pasar pangan aman sampai bulan September tahun 2024 sebesar 86%	1.Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Tahap 2 dengan target 100 sampel2.Pembuatan laporan kegiatan Sampling dan Pengujian Tahap 2 3.Pembuatan data suplier produk pangan aman yang dijual di pasar	TW IV	1.Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Tahap 2 dengan target 100 sampel2.Pembuatan laporan kegiatan Sampling dan Pengujian Tahap 2 3.Pembuatan data suplier produk pangan aman yang dijual di pasar			Progres jumlah pasar pangan aman sampai bulan Desember tahun 2024 sebesar 100%
18	**Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**	Pada TW III tercapai 127 sampel	Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat	TW IV	Pada TW IV telah dilakukan sampling sesuai rencana			Pada akhir TW IV tercapai 164 sampel
		Monitoring hingga TW III tahun 2024	Melakukan monitoring kegiatan	TW IV	Telah dilakukan monitoring kegiatan pada TW IV			Monitoring hingga TW IV tahun 2024
19	**Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**		Melakukan sampling sesuai dengan prioritas sampling pangan dan melakukan monitoring kegiatan	TW IV	Sudah dilakukan sampling sesuai dengan prioritas sampling pangan dan melakukan monitoring kegiatan			Pada akhir TW IV tercapai 85 sampel dan terdapat monitoring hingga TW IV tahun 2024

20	**Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**	Belum tercapainya target perkara tahun 2024 di TW 1	Perkuatan koordinasi dengan CJS (Criminal Justice System) di wilayah kerja		Telah dilaksanakan koordinasi dengan CJS dalam rangka pencapaian target perkara, yaitu: 1. Koordinasi dengan Kepala Rupbasan Kelas II Sragen terkait dengan penitipan barang sitaan pada tanggal 15 Mei 2024, 4 Juni 2024 dan 19 Juni 2024 2. Koordinasi dengan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sragen dalam rangka pemberkasan perkara pada tanggal 4 Juni 2024 dan 13 juni 2024 3. Koordinasi dengan Korwas PPNS Polres Sragen dalam rangka pemberkasan perkara pada tanggal 20 Mei 2024 4. Koordinasi dengan PPNS dan Lab BBPOM di Semarang mengenai pengujian dan pemberkasan perkara pada tanggal 16 Mei 2024 dan 20 Juni 2024			Tercapainya target perkara tahun 2024 sejumlah 3 perkara dengan nilai keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 88%
		Belum tercapainya target perkara tahun 2024 di TW 1	Berkoordinasi secara intensif dengan CJS dalam rangka pemberkasan perkara		Berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait pemberkasan perkara : 1. Berkoordinasi dengan JPU KN Sragen terkait P-21 dan rencana serah tahap II pada tanggal 26 Juli 2024 2. Koordinasi dengan Kapolres Wonogiri, Kasar Reskrim, Kasat Narkoba pada tgl 29 Juli 2024 3. Koordinasi dengan Rupbasan Kota Surakarta pada tanggal 25 Juli 2024 4. Koordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Wonogiri dan Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Wonogiri mengenai pengantar SPDP pada tanggal 20 Agustus 2024 5. Koordinasi dengan Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Wonogiri mengenai serah tahap 1 (13 Sept 2024) dan serah tahap 2 (30 Sept 2024)			Tercapainya target perkara tahun 2024 sejumlah 3 perkara dengan nilai keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 88%

		Belum tercapainya target perkara tahun 2024 di TW 1	Mengintensifkan kegiatan patroli siber dalam rangka skrining peredaran Obat dan Makanan illegal dan diduga mengandung bahan berbahaya		Profiling terhadap akun-akun penjualan di marketplace dengan jumlah pembelian besar di wilayah kerja Dilakukan profiling akun dan permohonan penjejakan digital terhadap 3 akun di marketplace kepada Dit Siber melalui surat nomor R-PD.04.01.18B.07.24.838 tanggal 18 Juli 2024 yang sudah ditindaklanjuti oleh direktorat siber Obat dan Makanan			Tercapainya target perkara tahun 2024 sejumlah 3 perkara dengan nilai keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 88%
		Personil baru an Dinar Yoggy Pindarto, STP belum mendapatkan peningkatan kompetensi di bidang siber	Peningkatan kompetensi dalam bidang siber untuk personil		Mengikutkan personal dalam peningkatan kompetensi SiberPeserta Coaching Clinic Siber dan Intel di Banjarmasin pada tanggal 15-19 Juli 2024 a.n Dinar Yoggy P, STP			Pelatihan Siber yang diikuti oleh personil baru an Dinar Yoggy Pindarto, STP melalui Coaching Clinic Siber di Banjarmasin pada 15-19 Juli 2024
21	**Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan**	1. Pengadaan alat laboratorium sesuai kebutuhan pengujian laboratorium level 1 2. DIlakukan uji fungsi terhadap alat laboratorium yang telah dibeli 3. Melakukan instalasi listrik untuk menunjang penambahan daya listrik 4. Gedung untuk laboratorium telah dilakukan renovasi dan penyekatan 5. Melakukan peningkatan pengembangan kompetensi personel 6. Melakukan pengujian rapid test kit obat, pangan dan mikrobiologi	1. Penetapan target pengujian dalam rangka peningkatan Standar Ruang Lingkup (SKL) 2. Penetapan peralatan dan penyedia peralatan laboratorium 3. Pengadaan peralatan laboratorium sesuai spesifikasi	TW IV	1. Penetapan target pengujian dalam rangka peningkatan Standar Ruang Lingkup (SKL) 2. Penetapan peralatan dan penyedia peralatan laboratorium 3. Pengadaan peralatan laboratorium sesuai spesifikasi			Target telah tercapai setelah dilakukan penilaian oleh PPPOMN dimana target yang tercapai melebihi hasil yang direncanakan. Hal ini dikarenakan sebagian besar personel laboratorium BPOM di Surakarta adalah pegawai selter(seleksi terbatas) sehingga memberikan nilai lebih dalam penilaian kompetensi pegawai yang merupakan salah satu unsur SKL
22	**Indeks pengelolaan data dan informasi**	Realisasi belum mencapai target	Monitoring pemanfaatan email	TW IV	Dilakukan Monitoring pemanfaatan email coorporate dan			Target Tercapai

	BBPOM di Surakarta yang optimal		coorporate dan dashboard BOC		dashboard BOC setiap bulan			
		Pegawai masih banyak yang belum menggunakan email kedinasan	Membuat pegawai untuk mengakses setidaknya satu kali dalam satu bulan	TW IV	Mengirimkan daftar hadir rapat progresif menggunakan email kedinasan dan menampilkan tarikan data akses email bulan n-1			Lebih banyak pegawai yang mengakses email kedinasan
23	**Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu**	Progres publikasi terhadap obat dan makanan aman sampai bulan September tahun 2024 sebanyak 27 publikasi	Melakukan penyebaran informasi melalui media luar ruang yaitu baliho	TW IV	Melakukan penyebaran informasi melalui media luar ruang yaitu baliho yang ada di wilayah Surakarta terkait keamanan Obat dan Makanan dan branding Balai POM di Surakarta			Progres publikasi terhadap obat dan makanan aman sampai bulan Desember tahun 2024 sebanyak 34 publikasi
24	**Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**	Tidak terdata jumlah KBP dan responden	Melakukan entri kegiatan pemberian bimbingan dan pembinaan ke dalam Aplikasi Survei pada kegiatan desk CAPA, desk UMKM, sosialisasi dan desk layanan sertifikasi	TW IV	Melakukan entri kegiatan pemberian bimbingan dan pembinaan ke dalam Aplikasi Survei pada kegiatan desk CAPA, desk UMKM, sosialisasi dan desk layanan sertifikasi			Tahun 2024 menjaring 13 KBP dan 141 responden
		Tidak ada daftar pelaku usaha yang mengisi survey	Mendampingi pelaku usaha mengisi survei pada kegiatan desk CAPA, desk UMKM, sosialisasi dan desk layanan sertifikasi	TW IV	Mendampingi pelaku usaha mengisi survei pada kegiatan desk CAPA, desk UMKM, sosialisasi dan desk layanan sertifikasi			Tersedia dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan beserta daftar pelaku usaha yang harus didampingi
25	**Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan**	Belum pernah dilakukan survey kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan untuk unit kerja BPOM di Surakarta	Meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan	TW IV	Meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskankan informasi keamanan Obat dan Makanan			Telah dilakukan survey kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan untuk unit kerja BPOM di Surakarta oleh PUSAKOM dengan capaian 108,29%
26	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Surakarta**	RTL belum ditindaklanjuti	Melakukan tindak lanjut terhadap RTL dalam laporan SKM	TW IV	Rekomendasi SKM 2024 telah ditindaklanjuti dan dilaporkan			RTL telah ditindaklanjuti dan dilaporkan
		Pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan maklumat	TW IV	Pelayanan publik telah sesuai standar pelayanan dan maklumat pelayanan yang ditetapkan			Peningkatan kualitas pelayanan publik Balai POM di Surakarta

		yang telah ditetapkan	pelayanan yang telah ditetapkan					
27	**Indeks RB BBPOM di Surakarta**	Belum dilakukan upaya perbaikan LKE ZI	Perbaikan atas rekomendasi saat Desk ZI	TW IV	Perbaikan atas rekomendasi saat Desk ZI			Rekomendasi ZI sudah diperbaiki, contohnya penyusunan SK Mekanisme Pemilihan Tim RB
		Pelaksanaan sebagian rencana rencana aksi seperti MANDATS danMINAPADI belum dapat terealisasi	Pelaksanaan sebagian rencana rencana aksi seperti MANDATS dan MINAPADI belum dapat terealisasi	TW IV	Melaksanakan rencana aksi seperti MANDATS dan MINAPADI			Sudah dilaksanakan rencana aksi seperti MANDATS dan MINAPADI
		Pencanangan ZI belum dilaksanakan	Pencanangan Zona Integritas	TW IV	Sudah dilaksanakan pencanangan Zona Integritas			pencanangan Zona integritas sudah dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2024
28	**Nilai AKIP BBPOM di Surakarta**	Target Nilai AKIP BPOM di Surakarta tahun 2023 tidak tercapai dengan kontribusi komponen nilai paling rendah adalah di capaian kinerja yaitu 12,67/20.00	Pemantauan nilai capaian kinerja secara rutin setiap bulan melalui rapat progresif bulanan dan dilakukan tindak lanjut terhadap nilai capaian kinerja yang belum tercapai	-	Pemantauan capaian kinerja secara rutin setiap bulan melalui rapat progresif			Komponen capaian Kinerja pada evaluasi AKIP 2024 15,07 (Nilai AKIP UPT tahun 2024: 74,39)
		Belum terdapat kertas kerja penetapan target indikator sasaran kinerja yang disusun berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten termasuk belum mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta pemanfaatan data dari sumber data yang dapat	Menyusun Kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten termasuk mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta memanfaatkan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya	-	Menyusun kertas kerja penetapan target			Hasil Evaluasi pada komponen perencanaan kinerja AKIP Tahun 2024 sebesar 17,76 (NIlai AKIP UPT 74,39)

		diyakini validitasnya; Hasil Evaluasi pada komponen perencanaan kinerja AKIP Tahun 2023 sebesar 17,76 (NIlai AKIP UPT 71,15)						
		SOP pengumpulan data kinerja yang telah disusun belum diformalkan dan disahkan; Hasil Evaluasi pada komponen pengukuran kinerja AKIP Tahun 2023 sebesar 17,28 (NIlai AKIP UPT 71,15)	Mengesahkan dan menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria	-		Membuat draft SOP Monitoring dan Evaluasi	TW II 2025	Hasil Evaluasi pada komponen pengukuran kinerja AKIP Tahun 2024 sebesar 17,28 (NIlai AKIP UPT 74,39)
		Data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance) belum selaras; Hasil Evaluasi pada komponen pelaporan kinerja AKIP Tahun 2023 sebesar 8,64 (NIlai AKIP UPT 71,15)	Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance) dengan membentuk SK Tim Laporan Kinerja Tahun 2024 sehingga terdapat kroscek penyajian data kinerja	-	Terbentuknya SK Tim Laporan Kinerja Tahun 2024 sehingga terdapat kroscek penyajian data kinerja			Hasil Evaluasi pada komponen pelaporan kinerja AKIP Tahun 2023 sebesar 9,48 (NIlai AKIP UPT 74,39)

		Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan Permasalahan /kendala/hambatan yang dapat menjelaskan akar penyebab kegagalan pencapaian kinerja; Hasil Evaluasi pada komponen evaluasi kinerja AKIP Tahun 2023 sebesar 13,60 (NIlai AKIP UPT 71,15)	Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan Permasalahan/kendala/hambatan yang dapat menjelaskan akar penyebab kegagalan pencapaian kinerja;	-	Laporan evaluasi internal sudah menyajikan Permasalahan/kendala/ hambatan yang dapat menjelaskan akar penyebab kegagalan pencapaian kinerja			Hasil Evaluasi pada komponen evaluasi kinerja AKIP Tahun 2023 sebesar 14,80 (NIlai AKIP UPT 74,39)
29	**Nilai Pengelolaan Kearsipan**	Terdapat naskah dinas yang tidak sesuai tata naskah dinas	Melakukan verifikasi naskah dinas yang dibuat	-	Sudah dilakukan verifikasi naskah dinas oleh tim kearsipan sebelum dilakukan penandatanganan			Naskah dinas yang dibuat telah sesuai dengan tata naskah dinas
		Arsip Aktif belum diberkaskan dan di simpan pada tempat yang sesuai	penyediaan anggaran untuk pemenuhan sarana penyimpanan arsip aktif	-	telah dilaksanakan pengadaan filling cabinet dan penambahan rak arsip untuk menunjukan pemberkasan arsip aktif pada tahun 2024			Arsip aktif telah diberkaskan dan disimpan pada filling cabinet
		pengelola kearsipan belum semuanya mengikuti diklat/ sosialisasi/ Bimtek/ Pembelajaran Mandiri terkait kearsipan	Minimal Mengikuti pembelajaran terkait kearsipan	-	Pengelola arsip telah mengikuti pembelajaran terkait kerasipan melalui laman ideas BPOM			pengelola kearsipan telah mengikuti Pembelajaran Mandiri terkait kearsipan
30	**Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surakarta**	Realisasi belum mencapai target	Memonitoring IP ASN Setiap bulannya		Dilakukan monitoring IP ASN setiap bulan			Target tercapai
			Meningkatkan pegawai ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi baik dari D3 ke S1 ataupun dari S1 ke S2;		Sudah mengusulkan pegawai untuk mengikuti tugas belajar			ada 1 pegawai tubel
			Melaksanakan diklat teknis bagi jabatan fungsional baik mandiri maupun dari instansi Pembina;		Sudah melaksanakan diklat teknis analis APK APBN bagi pegawai yang sudah diangkat dalam jabatan fungsional APK APBN			1 Analis PK PBN sudah diklat fungsional

			Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai yang tepat waktu dan bernilai baik;		Sudah dilakukan monev penilaian SKP			SKP sudah dinilai
			Mengusulkan untuk Pejabat Fungsional agar dapat mengikuti uji kompetensi termasuk Uji kompetensi manajerial;		Sudah dilakukan pengusulan pejabat fungsional untuk mengikuti uji kompetensi			Ada 3 pegawai yang telah mengikuti ukom
			Pemantauan kedisiplinan dan pembinaan kepada seluruh pegawai agar tidak melanggar aturan kepegawai.		Sudah dilakukan pemantauan kedisiplinan pegawai dalam pelaksanaan apel dan upacara			Pelaporan kedisiplinan pegawai telah dilaporkan setiap minggu dan setiap bulan
31	**Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surakarta**	Realisasi belum mencapai target	Memonitoring IKPA setiap bulan	-	Dilakukan monitoring IKPA setiap bulan			Target Tercapai
32	**Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Realisasi belum mencapai target	Monitoring Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	Dilakukan Monitoring setiap bulan, dan menginput data di LPSE			Target Tercapai
33	**Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**	Realisasi belum mencapai target	Monitoring Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	-	Dilakukan Monitoring setiap bulan pengelolaan BMN			Target Tercapai
		Nilai Tanah dan Banguan belum sesuai	Melakukan Penilain Ulang Terhadap Tanah dan Bangunan Hasil Hibah	-	Berkoordinasi dengan KPKNL Surakarta untuk melakukan penilaian Kembali terhadap tanah dan bangunan hasil hibah Pemkot Surakarta			Nilai Tanah dan Banguan sudah sesuai dan Closed temuan BPK
34	**Persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri**		Agar melaksanakan instruksi presiden untuk penggunaan produk dalam negeri	-	BPOM Surakarta sudah melaksanakan instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			BPOM Surakarta melaksanakan intruksi presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3.5 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2024 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian kinerja pada tahun 2024. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain :

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2024.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja pada tahun 2024.
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2024

3.6. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 Balai POM di Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 24 November 2023 sebesar **Rp9.867.975.000,00**. Dan mengalami perubahan di tgl 06 September 2024 menjadi sebesar **Rp.10.839.975.000,00** dengan Realisasi anggaran tahun 2024 adalah Rp10.664.271.577,00 atau 98,38% tahun 2024 anggaran Balai POM di Surakarta dilakukan *Automatic Adjusment* sehingga pagu anggaran menjadi **Rp10.664.271.577,00** sehingga persentase realisasi terhadap pagu *Automatic Adjusment* adalah 99,23%.

Pengelolaan anggaran Balai POM di Surakarta senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Surakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
c. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi

suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ capaian\ output}{\%\ capaian\ input}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengam membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Surakarta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 146. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Balai POM di Surakarta tahun 2024

No	Indikator	TE	Capaian TE	Kategori
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	-0.01	75 %	Tidak Efisien
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	0.14	100 %	Efisien
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0.06	100 %	Efisien
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerjaBalai POM di Surakarta	0.07	100 %	Efisien
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	0.00	100 %	Efisien
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	0.00	100 %	Efisien
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	0.13	100 %	Efisien
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Surakarta yang optimal	0.02	100 %	Efisien
	Terwujudnya SDM Balai POM di Surakarta yang berkinerja optimal	-0.04	75 %	Tidak Efisien
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	0.04	100 %	Efisien
	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Surakarta secara Akuntabel	0.22	95 %	Efisien

Pada tahun 2024 Balai POM di Surakarta melaksanakan 34 (tiga puluh empat) indikator kegiatan untuk mendukung pencapaian 11 (sebelas) sasaran strategis dengan hasil 9 sasaran strategis efisien dan 2 sasaran strategis tidak efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,04 sampai 0,22. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Surakarta belum mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih

memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Tahun 2021 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis Balai POM di Surakarta Tahun 2021-2024. Pada tahun 2024 ini evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra Balai POM di Surakarta Tahun 2021-2024 dan DIPA Tahun 2024. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 20 kegiatan utama.

1) Pada tahun 2024 dari 11 sasaran strategis Balai POM di Surakarta telah berhasil mencapai target 9 sasaran strategis dengan kategori "sangat baik", 1 sasaran strategis dengan kategori "Cukup" dan1 sasaran strategis belum.
2) Hasil capaian tiap sasaran strategis pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :
   a. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 98,62% dengan kategori cukup, menunjukkan masih membutuhkan upaya untuk mencapai target Balai POM di Surakarta dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada tahun 2024
   b. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 105,80% dengan kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Balai POM di Surakarta pada tahun 2024
   c. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 100,16% dengan kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada tahun 2024
   d. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 120,00% dengan kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada tahun 2024

e. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 112,82% dengan kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada tahun 2024.
f. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 120,00% dengan kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada tahun 2024
g. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh sebesar 114,07% dengan kategori Sangat Baik menunjukkan keberhasilan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan pada tahun 2024.
h. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 105,48% dengan kategori Sangat Baik menunjukkan keberhasilan Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2024
i. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan sebesar 101,84% dengan kategori Sangat Baik menunjukkan keberhasilan Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Surakarta yang optimalpada tahun 2024.
j. Indikator pada sasaran strategis kesepuluh yaitu terwujudnya SDM Balai POM di Surakarta yang berkinerja optimal, dikecualikan dalam perhitungan NPSS.
k. Capaian indikator pada sasaran strategis kesebelas sebesar 111,51% dengan kategori Sangat Baik menunjukkan keberhasilan Terkelolanya keuangan Balai POM di Surakarta secara akuntabel.

3) Pada tahun 2024 Balai POM di Surakarta melaksanakan 34 (tiga puluh empat) indikator kegiatan untuk mendukung pencapaian 11 (sebelas) sasaran strategis dengan hasil 9 sasaran strategis efisien dan 2 sasaran strategis tidak efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,04 sampai 0,22. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

4.2. SARAN

1) Melakukan Monitoring tindak lanjut sebagai upaya peningkatan berkelanjutan terhadap capaian kinerja utama pada renstra 2025-2029
2) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada semua bisnis proses untuk mengintegrasikan data, terutama dalam pengumpulan data kinerja (bulanan, triwulan) secara berjenjang sampai ke level individu sehingga diperoleh data base kinerja yang realtime, akuntabel dan mempermudah evaluasi oleh pimpinan.
3) Melakukan pemantauan terhadap tingkat efisiensi kegiatan utama, khususnya kegiatan utama yang tidak efisiensi pada tahun 2024.

LAMPIRAN I

1. PERJANJIAN KINERJA

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI POM DI KOTA SURAKARTA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt
Jabatan	: Kepala Balai POM di Surakarta

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS
Jabatan	: Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai POM di Surakarta	Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt	Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI POM DI KOTA SURAKARTA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.4 Persen
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95.4 Persen
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90 Persen
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97.6 Persen
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85 Persen
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.3 Persen
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	92.9 persen
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95 persen
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60 Persen
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71 Persen
		06 - Indeks Pelayanan Publik	3.55

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	94 Persen
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96 Nilai
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	8
		03 - Jumlah desa pangan aman	1
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 Persen
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 Persen
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78 Persen
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72.56
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.4
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74.41
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	95.75 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	75
		03 - Nilai AKIP UPT	78.66
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	76.64
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	90.64
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.51
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	80
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	88
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 9,867,975,000 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5,502,129,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	4,365,846,000

Surakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai POM di Surakarta	Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt	Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024
BALAI POM DI SURAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME			ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,40%	99,17%	101,82%	35.557.250	35.496.989	99,83
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,40%	95,65%	100,26%	27.574.450	27.512.853	99,78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%	100,00%	111,11%	23.619.850	23.559.741	99,75
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,60%	89,47%	91,67%	20.198.650	20.137.968	99,70
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85%	75,00%	88,24%	17.112.300	17.051.905	99,65
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72,56	82,77	114,07%	46.222.000	36.975.575	80,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di BPOM di Surakarta	90,40%	97,34%	107,68%	25.866.250	23.574.043	91,14
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BPOM di Surakarta	74,41%	80,58	108,58%	69.373.100	63.916.593	92,13
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di BPOM di Surakarta	95,75	96,2	100,47%	19.350.000	19.342.810	99,96
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,30%	100,00%	100,70%	67.299.300	58.967.771	87,62
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	92,90%	96,90%	104,31%	67.299.300	58.967.771	87,62
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	98,13%	103,29%	61.595.100	61.595.019	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	62,71%	104,52%	63.962.500	55.799.100	87,24
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00%	76,35%	107,54%	116.323.600	101.992.943	87,68
		Indeks Pelayanan Publik	3,55	3,88	109,30%	19.350.000	19.342.810	99,96
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	94,00%	100,00%	106,38%	40.337.100	35.829.306	88,82
		Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00%	95,00%	100,00%	14.540.450	12.749.118	87,68
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,00	96,60	100,63%	49.144.400	47.929.514	97,53
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	8	8	100,00%	285.941.000	231.929.125	81,11
		Jumlah desa pangan aman	1	1	100,00%	138.313.000	138.303.715	99,99
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	1	1	100,00%	62.340.000	62.331.198	99,99

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME			ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	29.843.500	29.843.120	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	20.885.000	20.882.311	99,99
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00%	88,00%	112,82%	355.337.300	347.758.918	97,87
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Surakarta yang	Indeks RB Balai POM di Surakarta	75,00%	74,39%	99,19%	858.800.500	851.734.223	99,18
		Nilai AKIP Balai POM di Surakarta	78,66%	74,39%	94,57%	858.800.500	851.734.223	99,18
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	76,64%	85,66%	111,77%	591.908.200	586.717.637	99,12
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Surakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta	90,64%	87,27%	96,28%	861.750.500	854.662.488	99,18
10	Terwujudnya SDM Balai POM di Surakarta yang berkinerja optimal	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40,00%	49,43%	123,58%	3.189.952.000	3.188.212.959	99,95
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta yang optimal	3,00%	3,00%	100,00%	597.708.200	592.482.370	99,13
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Surakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta	90,51%	91,23%	100,80%	623.870.000	617.942.237	99,05
		Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80,00%	95,00%	118,75%	606.358.200	601.083.570	99,13
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	88,00%	93,73%	106,51%	342.415.900	338.995.249	99,00
		Persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri	60,00%	97,80%	163,00%	635.470.000	629.471.702	99,06

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

indeks	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,40%	99,17%	101,82	35.557.250	35.496.989	99,83	**1,02**	**0,02**	**100 %**	Efisien
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,40%	95,65%	100,26	27.574.450	27.512.853	99,78	**1,00**	**0,00**	**100 %**	Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%	100,00%	111,11	23.619.850	23.559.741	99,75	**1,11**	**0,11**	**100 %**	Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,60%	89,47%	91,67	20.198.650	20.137.968	99,70	**0,92**	**-0,08**	**75 %**	Tidak Efisien
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00%	75,00%	88,24	17.112.300	17.051.905	99,65	**0,89**	**-0,11**	**75 %**	Tidak Efisien
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Surakarta				**98,62**	**124.062.500**	**123.759.456**	**99,76**	**0,99**	**-0,01**	**75 %**	**Tidak Efisien**
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	72,56%	82,77%	114,07	36.977.600	36.975.575	99,99	**1,14**	**0,14**	**100 %**	Efisien
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan				**114,07**	**36.977.600**	**36.975.575**	**99,99**	**1,14**	**0,14**	**100 %**	**Efisien**
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,40%	97,34%	107,68	23.630.500	23.574.043	99,76	**1,08**	**0,08**	**100 %**	Efisien
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74,41%	80,58%	108,29	64.101.300	63.916.593	99,71	**1,09**	**0,09**	**100 %**	Efisien
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	95,75%	96,20%	100,47	19.350.000	19.342.810	99,96	**1,01**	**0,01**	**100 %**	Efisien
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan				**105,48**	**107.081.800**	**106.833.446**	**99,88**	**1,06**	**0,06**	**100 %**	**Efisien**
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,30%	100,00%	100,70	59.188.300	58.967.771	99,63	**1,01**	**0,01**	**100 %**	Efisien
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	92,90%	96,90%	104,31	59.188.300	58.967.771	99,63	**1,05**	**0,05**	**100 %**	Efisien
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	98,13%	103,29	61.595.100	61.595.019	100,00	**1,03**	**0,03**	**100 %**	Efisien
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	65,31%	108,85	55.800.500	55.799.100	100,00	**1,09**	**0,09**	**100 %**	Efisien
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00%	76,36%	107,55	102.433.600	101.992.943	99,57	**1,08**	**0,08**	**100 %**	Efisien
15	Indeks Pelayanan Publik	3,55%	3,88%	109,30	19.350.000	19.342.810	99,96	**1,09**	**0,09**	**100 %**	Efisien

indeks	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	94,00%	100,00%	106,38	35.841.600	35.829.306	99,97	**1,06**	**0,06**	**100 %**	Efisien
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00%	104,84%	110,36	12.804.200	12.749.118	99,57	**1,11**	**0,11**	**100 %**	Efisien
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerjaBalai POM di Surakarta				**106,34**	**406.201.600**	**405.243.838**	**99,76**	**1,07**	**0,07**	**100 %**	**Efisien**
18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,00	96,60	100,63	47.944.400	47.929.514	99,97	**1,01**	**0,01**	**100 %**	Efisien
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	8,00	8,00	100,00	231.941.000	231.929.125	99,99	**1,00**	**0,00**	**100 %**	Efisien
20	Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	100,00	138.313.000	138.303.715	99,99	**1,00**	**0,00**	**100 %**	Efisien
21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1,00	1,00	100,00	62.340.000	62.331.198	99,99	**1,00**	**0,00**	**100 %**	Efisien
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta				**100,16**	**480.538.400**	**480.493.552**	**99,99**	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00	29.843.500	29.843.120	100,00	**1,00**	**0,00**	**100 %**	Efisien
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00	20.885.000	20.882.311	99,99	**1,00**	**0,00**	**100 %**	Efisien
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta				100,00	50.728.500	50.725.431	99,99	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00%	88,00%	112,82	348.458.600	347.758.918	99,80	**1,13**	**0,13**	**100 %**	Efisien
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta				112,82	348.458.600	347.758.918	99,80	**1,13**	**0,13**	**100 %**	**Tidak Efisien**
25	Indeks RB UPT	75,00%	74,39%	99,19	852.057.900	851.734.223	99,96	**0,99**	**-0,01**	**75 %**	Tidak Efisien
26	Nilai AKIP UPT	78,66%	74,39%	94,57	852.057.900	851.734.223	99,96	**0,95**	**-0,05**	**75 %**	Tidak Efisien
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	76,64%	85,66%	111,77	586.950.600	586.717.637	99,96	**1,12**	**0,12**	**100 %**	Efisien
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Surakarta yang optimal		-	-	**101,84**	**2.291.066.400**	**2.290.186.083**	**99,96**	**1,02**	**0,02**	**100 %**	**Efisien**
28	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta	90,64%	87,27%	96,28	855.007.900	854.662.488	99,96	**0,96**	**-0,04**	**75 %**	Tidak Efisien
Terwujudnya SDM Balai POM di Surakarta yang berkinerja optimal				**96,28**	**855.007.900**	**854.662.488**	**99,96**	**0,96**	**-0,04**	**75 %**	**Tidak Efisien**
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40,00%	49,43%	123,58	3.189.952.000	3.188.212.959	99,95	**1,24**	**0,24**	**95 %**	Efisien
30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	3,00	100,00	592.750.600	592.482.370	99,95	**1,00**	**0,00**	**100 %**	Efisien
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan				**104,10**	**3.782.702.600**	**3.780.695.329**	**99,95**	**1,04**	**0,04**	**100 %**	**Efisien**
31	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta	90,51%	91,23%	100,80	618.218.600	617.942.237	99,96	**1,01**	**0,01**	**100 %**	Efisien
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	80,00%	95,00%	118,75	601.400.600	601.083.570	99,95	**1,19**	**0,19**	**100 %**	Efisien
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	88,00%	93,73%	106,51	339.243.300	338.995.249	99,93	**1,07**	**0,07**	**100 %**	Efisien
34	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60,00%	97,80%	163,00	629.818.600	629.471.702	99,94	**1,63**	**0,63**	**90 %**	Efisien
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Surakarta secara Akuntabel				**122,26**	**2.188.681.100**	**968.466.951**	**99,94**	**1,22**	**0,22**	**95 %**	**Efisien**

4. PENGUKURAN NPS

No	Sasaran Strategis		Nama Indikator	2024				
				Target 2024	Target s.d TW IV	Realisasi s.d TW IV	Capaian terhadap Target TW IV	Capaian terhadap Target Tahun 2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,40%	97,40%	99,17%	101,82%	101,82%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,40%	95,40%	95,65%	100,26%	100,26%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%	90,00%	100,00%	111,11%	111,11%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,60%	97,60%	89,47%	91,67%	91,67%
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00%	85,00%	75,00%	88,24%	88,24%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							**98,62%**	**98,62%**
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	72,56%	72,56%	82,77%	114,07%	114,07%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							**114,07%**	**114,07%**
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan	90,40%	90,40%	97,34%	107,68%	107,68%
		2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74,41%	74,41%	80,58%	108,29%	108,29%
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	95,75%	95,75%	96,20%	100,47%	100,47%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							**105,48%**	**105,48%**
NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF							**98,62%**	**98,62%**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,30%	99,30%	100,00%	100,70%	100,70%
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	92,90%	92,90%	96,90%	104,31%	104,31%
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	95,00%	98,13%	103,29%	103,29%
		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	60,00%	62,71%	104,52%	104,52%
		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00%	71,00%	76,36%	107,55%	107,55%
		6	Indeks Pelayanan Publik	3,55%	3,55%	3,88%	109,30%	109,30%
		7	Persentase UMKM yang	94,00%	94,00%	100,00%	106,38%	106,38%
		8	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan	95,00%	95,00%	104,84%	110,36%	110,36%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							**105,80%**	**105,80%**

No	Sasaran Strategis		Nama Indikator	2024				
				Target 2024	Target s.d TW IV	Realisasi s.d TW IV	Capaian terhadap Target TW IV	Capaian terhadap Target Tahun 2024
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di	1	Tingkat Efektifitas KIE Obat	96,00	96,00	96,60	100,63%	100,63%
		2	Jumlah sekolah dengan	8,00	8,00	8,00	100,00%	100,00%
		3	Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%
		4	Jumlah pasar aman dari	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							**100,16%**	**100,16%**
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							**100,00%**	**100,00%**
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00%	78,00%	88,00%	112,82%	112,82%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							**112,82%**	**112,82%**
NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF							**104,69%**	**104,69%**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Surakarta yang optimal	1	Indeks RB UPT	75,00%	75,00%	74,39%	99,19%	99,19%
		2	Nilai AKIP UPT	78,66%	78,66%	74,39%	94,57%	94,57%
		3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	76,64%	76,64%	85,66%	111,77%	111,77%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							**101,84%**	**101,84%**
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Surakarta yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta	90,64	90,64	87,27	96,28%	96,28%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							**96,28%**	**96,28%**
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40,00	40,00	49,43	120,00%	120,00%
		2	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	3,00	3,00	100,00%	100,00%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							**110,00%**	**110,00%**
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Surakarta secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta	90,51	90,51	91,23	100,80%	100,80%
		2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	80,00	80,00	95,00	118,75%	118,75%
		3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	88,00	88,00	93,73	106,51%	106,51%
		4	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60,00	60,00	97,80	120,00%	120,00%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							**111,51%**	**111,51%**
RATA-RATA NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF							**221,51%**	**221,51%**
NILAI PENCAPAIAN SASARAN TOTAL							**141,61%**	**141,61%**

LAMPIRAN II
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

1. RAPK KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN

No	Jenis Produk	Metode Sampling	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d. Desember											
				Jumlah sampling Desember	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
					TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar															
1	Obat	Random	40	40	0	0	0	0	40	40	40	0	0	0	40
		Targeted	9	9	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9
		TOTAL	49	49	0	0	0	0	49	49	40	0	0	0	49
2	Obat Tradisional	Random	25	25	0	0	0	0	25	25	24	1	1	0	25
		Targeted	10	10	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	10
		TOTAL	35	35	0	0	0	0	35	35	34	1	1	0	35
3	Obat Kuasi	Random	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Targeted	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		TOTAL	2	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2
4	Suplemen Kesehatan	Random	6	6	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	6
		Targeted	3	3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3
		TOTAL	9	9	0	0	0	0	9	9	9	0	0	0	9
5	Kosmetik	Random	49	49	0	0	0	0	49	49	49	0	0	0	49
		Targeted	20	20	0	0	0	0	20	20	20	0	0	0	20
		TOTAL	69	69	0	0	0	0	69	69	69	0	0	0	69
6	Rokok	Targeted							0	0			0	0	0
	TOTAL	**Random**	121	121	0	0	0	0	121	121	**120**	1	1	0	**121**
			121	121	0	0	0	0	121	121	**120**	1	1	0	**121**
		Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			43	43	0	0	0	0	43	43	**34**	0	0	0	**43**
			43	43	0	0	0	0	43	43	**34**	0	0	0	**43**
	TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			164	164	0	0	0	0	164	164	154	1	1	0	**164**
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar															
1	Pangan **(selain Fortifikasi)**	Random	46	46	0	0	0	0	46	46	44	2	2	0	46
		Targeted	19	19				0	19	19	17	2	2	0	19
		TOTAL	65	65	0	0	0	0	65	65	61	4	4	0	**65**
2	Fortifikasi	Targeted	20	20				0	20	20	15	5	5	0	20
		TOTAL	20	20	0	0	0	0	20	20	15	5	5	0	**20**
	TOTAL PANGAN	**Random**	**46**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**46**	**44**	**2**	**2**	**0**	**46**
		Targeted	**39**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39**	**39**	**32**	**7**	**7**	**0**	**39**
		TOTAL	**85**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85**	**85**	**76**	**9**	**9**	**0**	**85**

2. RAPK RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

No	Keputusan/ Rekomendasi	Komoditi	s.d. Desember		
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	61	61	100
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	31	31	100
		Suplemen Kesehatan	1	1	100
		Kosmetik	23	23	100
		Pangan	18	18	100
		Total	134	134	100
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0	0
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0
		Pangan	0	0	0
		Total	0	0	0,
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0	0
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0
		Pangan	0	0	0
		Total	0	0	0
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0	0
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0
		Pangan	0	0	0
		Total	0	0	0
TOTAL		**Total**	**134**	**134**	**100**

3. RAPK KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

No	Komponen Keputusan/Rekomendasi	Komoditi	s.d. Desember		
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	57	58	98,28
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	26	28	92,86
		Suplemen Kesehatan	0	0	0,00
		Kosmetik	25	25	100,00
		Pangan	17	18	94,44
		Total	125	129	96,90
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0,00
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0,00
		Suplemen Kesehatan	0	0	0,00
		Kosmetik	0	0	0,00
		Pangan	0	0	0,00
		Total	0	0	0,00
TOTAL			**125**	**129**	**96,90**

4. RAPK KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	Total			Realisasi % Serttifikasi	
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah keputusan tepat waktu	Jumlah permohonan
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	0	0	0	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	0	0	0	0	0
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	160	157	157	157	160
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	0	0	0	0	0
Total			**160**	**157**	**157**	**157**	**160**

5. RAPK PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d. Desember		
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	5	3	3	2	1
2	Industri Bahan Baku Obat	0	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit	1	0	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	5	4	2	2	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	3	0	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	45	14	14	9	5
7	Usaha Mikro Obat Tradisional	7	3	3	3	0
8	Industri Farmasi (IF) yang	4	3	3	3	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi	1	0	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0
11	Industri Kosmetik	49	21	19	8	11
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi	3	0	0	0	0
13	Industri Pangan	150	13	13	8	5
14	Industri Rumah Tangga Pangan	32290	2	2	2	0
TOTAL		**32563**	**61**	**59**	**37**	**22**

6. RAPK PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI

No	Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d. Desember		
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	69	7	7	6	1
2	Apotek	691	35	35	24	11
3	Toko Obat	71	8	8	2	6
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	5	5	5	4	1
5	Rumah Sakit (RS)	59	20	20	18	2
6	Puskemas	111	21	21	21	0
7	Klinik	258	24	24	19	5
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	258	44	40	17	23
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	140	24	24	24	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	213	62	59	37	22
13	Klinik Kecantikan	0	0	0	0	0
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	623	70	70	67	3
TOTAL		**2.498**	**320**	**313**	**239**	**74**

7. RAPK INDEKS PELAYANAN PUBLIK

BERITA ACARA
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BALAI POM DI SURAKARTA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

Pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh empat**, kami Tim Penilai Kinerja UPP BPOM, berdasarkan hasil penilaian menyatakan sebagai berikut:

A. Indeks Pelayanan Publik : 3.88/B (Baik)

8. RAPK UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N	Progres s.d. bulan Des
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	2	2	10
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	30%	Maret-April			20
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan	40%	70%	Maret-Oktober			40
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-			20
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan			10
								100
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang	10%	10%	Januari	3	0	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor	40%	50%	Februari-Maret			40
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-			40
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November			10
Total Progres								100
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	7	7	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			20
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-			40
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-			17,14
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			10
Total Progres								97,14
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						**12**	**9**	**99,05**

9. RAPK KETERLIBATAN UPT DALAM PROGRAM SEDIAAN FARMASI MAKANAN MINUMAN SERTA PROGRAM PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/ Balai/Loka POM)	CAPAIAN (berdasarkan bobot)		
	TARGET (KUMULATIF) diisi oleh UPT sesuai	TOTAL REALISASI (KUMULATIF)	% CAPAIAN (KUMULATIF)
	12	12	12
Surakarta	95,00	99,60	104,84

10. RAPK TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

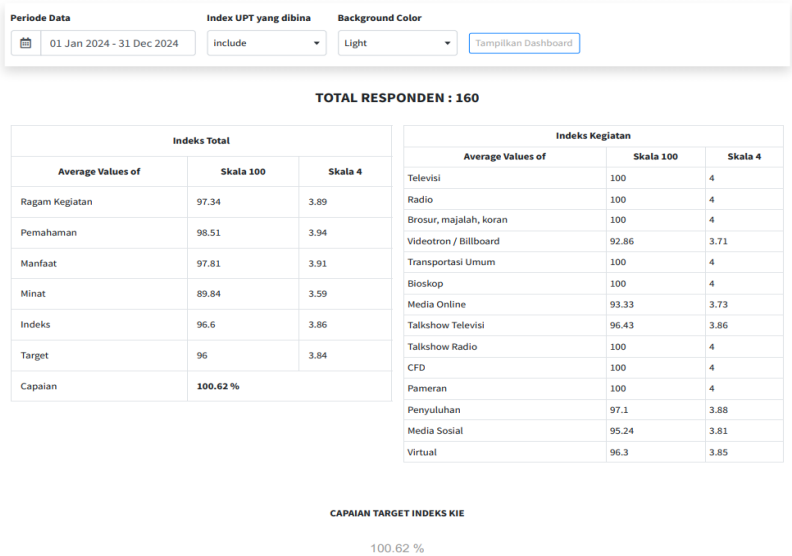

Indeks Total

Average Values of	Skala 100	Skala 4
Ragam Kegiatan	97.34	3.89
Pemahaman	98.51	3.94
Manfaat	97.81	3.91
Minat	89.84	3.59
Indeks	96.6	3.86
Target	96	3.84
Capaian	100.62 %	

Indeks Kegiatan

Average Values of	Skala 100	Skala 4
Televisi	100	4
Radio	100	4
Brosur, majalah, koran	100	4
Videotron / Billboard	92.86	3.71
Transportasi Umum	100	4
Bioskop	100	4
Media Online	93.33	3.73
Talkshow Televisi	96.43	3.86
Talkshow Radio	100	4
CFD	100	4
Pameran	100	4
Penyuluhan	97.1	3.88
Media Sosial	95.24	3.81
Virtual	96.3	3.85

11. RAPK JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d. Tahun N	Progres s.d. bulan (KUMULATIF) s.d. Desember
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	25,00	Januari – Mei	8	8	25,00
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10,00	Maret - Mei			10,00
3	Bimbingan Teknis Keamanan	15,00	April – Juli			15,00
4	Pemberian Paket Edukasi/Produk	10,00	April - Nov			10,00
5	Monitoring Pemberdayaan Kader	20,00	Juli – Nov			20,00
	- Pembentukan Tim Keamanan					
	- Intervensi Keamanan Pangan					
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS	20,00	Agustus - Des			20,00
	Total skor (Tahun N)	**100,00**		**8**	**8**	100,00

12. RAPK JUMLAH DESA PANGAN AMAN

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s,d Tahun N	Progres (%) s.d. Desember
1	Advokasi Kelembagaan Desa	22,00	Jan-Mei	1	1	22,00
2	Pengadaan Gimmick, Rapid Test, dll	5,00	TW1-TW2			5,00
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	17,00	Mei-Ags			17,00
4	Bimtek Komunitas	17,00	Jun-Okt			17,00
5	Fasilitas Keamanan Pangan	11,00	Jun-Okt			11,00
6	Pengawasan Keamanan Pangan	11,00	Jun-Nov			11,00
7	Monitoring dan Evaluasi	12,00	Nov - Des			12,00
8	Lomba Desa Pangan Aman	5,00	Des			5,00
	Total	**100,00**		**1**	**1**	**100,00**

13. RAPK JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s,d Tahun N	Progres (Capaian DJA) s.d. Desember
1	Advokasi	20,00	Jan-Mei			20,00
2	Survey Pasar	5,00	Jan-Mei			5,00
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	17,00	Apr - Juni			17,00
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	17,00	Apr - Juni			17,00
5	Penyuluhan	12,00	Jun - Agustus			12,00
6	Kampanye	12,00	Jun - Agustus			12,00
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	17,00	Sep - Nov			17,00
	Total	**100,00**		**1**	**1**	**100,00**

14. RAPK TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. DESEMBER										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d. bulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	3	3	1			1,00		0,15	15,00%	88,00%	100,00%	88,00
Tahap I				1		1,00	0,25	0,4	40,00%			
P21						0,67	0,25	0,3	22,00%			
Tahap II				2	1	0,67	0,25	0,15	11,00%			
Total		3	1	3	1							

15. RAPK PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP

PEMENUHAN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM
Tahun 2024

BALAI POM : SURAKARTA

Monev/Penilaian		2024		
No	**Bidang/Laboratorium**	**Persentase Pemenuhan SRL (%)**	**Persentase Pemenuhan Kompetensi (%)**	**Persentase Pemenuhan Peralatan (%)**
1	Obat	6,35	37,89	52,58
2	Kosmetik	0,00		
3	OTOKSK	0,00		
4	Pangan	17,39		
	Rata-rata Kimia	5,94		
5	Mikrobiologi	28,21	100,00	72,00

No	Bidang/Laboratorium	2024 (%)
1	Persentase	17,07
2	Persentase Pemenuhan Kompetensi (%)	68,95
3	Persentase Pemenuhan Peralatan (%)	62,29
Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (%)		49,43

16. RAPK INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI UPT YANG OPTIMAL

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email

	TW IV		
	Oktober	November	Desember
total_akun_individu	32	32	32
total_akun_unit	1	1	1
total_individu_login	31	32	31
total_individu_aktif	31	32	31
total_unitbalai_aktif	1	1	1
Aspek Login (%)	**29,06**	**30**	**29,06**
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	**40**	**40**	**40**
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	**29,06**	**30**	**29,06**
Perhitungan (%)	**98,12**	**100**	**98,12**
Perhitungan per Bulan	**96,99**	**97,26**	**97,33**
Nilai Indeks per Bulan	**3**	**3**	**3**
Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC			
	TW IV		
Aktifitas	**Oktober**	**November**	**Desember**
Login BOC	40	40	40
Akses BCC	60	60	60
Total	**100**	**100**	**100**
Perhitungan per Bulan	**92**	**92,73**	**93,33**
Nilai Indeks Per Bulan	**3**	**3**	**3**
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal			
	Oktober	**November**	**Desember**
Indeks Pemanfaatan	**3**	**3**	**3**
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	**3**	**3**	**3**

17. RAPK INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU

Tabel 2. Realisasi Indeks dan Capaian Kesadaran Masyarakat Per UPT

No	Balai Besar/Balai POM	Jumlah Sampel	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	510	84,00	84,45	100,54%
2	Balai Besar POM di Medan	470	86,00	92,10	107,09%
3	Balai Besar POM di Padang	490	87,00	90,12	103,59%
4	Balai POM di Payakumbuh	490	82,59	81,93	99,20%
5	Balai Besar POM di Pekanbaru	500	85,00	86,33	101,57%
6	Balai POM di Jambi	490	84,00	86,65	103,15%
7	Balai Besar POM di Palembang	490	89,00	87,13	97,90%
8	Balai POM di Bengkulu	480	88,74	88,30	99,50%
9	Balai Besar POM di Bandar Lampung	440	91,00	95,37	104,80%
10	Balai POM di Pangkalpinang	500	82,25	84,49	102,73%
11	Balai POM di Batam	480	90,00	89,96	99,95%
12	Balai Besar POM di Jakarta	460	91,90	92,00	100,10%
13	Balai Besar POM di Bandung	470	86,70	94,33	108,80%
14	Balai POM di Tasikmalaya	470	74,47	82,23	110,42%
15	Balai POM di Bogor	470	88,67	87,39	98,56%
16	Balai Besar POM di Semarang	520	84,00	86,22	102,64%
17	Balai POM di Surakarta	520	72,56	82,77	114,07%
18	Balai Besar POM di Yogyakarta	470	88,00	89,50	101,81%

18. RAPK INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

No	Unit Penyelenggara KBP	Target	Capaian Indeks	Persen Capaian	Jumlah KBP	Jumlah Responden
30	Balai POM di Kendari	96,4	96,92	100,54%	24	349
31	Balai POM di Kupang	94,7	95,86	101,22%	8	213
32	Balai POM di Mamuju	98,3	99,18	100,89%	4	34
33	Balai POM di Manokwari	92,3	97,06	105,16%	11	155
34	Balai POM di Palopo	86,7	97,89	112,91%	9	52
35	Balai POM di Palu	97,5	97,80	100,31%	11	59
36	Balai POM di Pangkalpinang	95,6	98,94	103,53%	25	137
37	Balai POM di Payakumbuh	85,9	92,34	107,49%	5	13
38	Balai POM di Sofifi	99,1	99,74	100,64%	8	109
39	Balai POM di Surakarta	90,4	97,34	107,68%	13	141

19. RAPK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

No	Balai Besar/Balai POM	Jumlah Sampel	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
3	Balai Besar POM di Padang	490	80,01	87,73	109,65%
4	Balai POM di Payakumbuh	490	77,87	75,21	96,59%
5	Balai Besar POM di Pekanbaru	500	77,80	82,36	105,86%
6	Balai POM di Jambi	490	80,00	81,92	102,40%
7	Balai Besar POM di Palembang	490	80,01	80,60	100,74%
8	Balai POM di Bengkulu	480	81,88	83,97	102,55%
9	Balai Besar POM di Bandar Lampung	440	87,60	88,74	101,31%
10	Balai POM di Pangkalpinang	500	81,30	85,11	104,69%
11	Balai POM di Batam	480	76,30	80,20	105,11%
12	Balai Besar POM di Jakarta	460	80,16	85,89	107,15%
13	Balai Besar POM di Bandung	470	85,01	88,57	104,19%
14	Balai POM di Tasikmalaya	470	87,54	83,18	95,02%
15	Balai POM di Bogor	470	82,63	84,91	102,75%
16	Balai Besar POM di Semarang	520	76,90	79,88	103,88%
17	Balai POM di Surakarta	520	74,41	80,58	108,29%
18	Balai Besar POM di Yogyakarta	470	83,20	84,51	101,58%

20. RAPK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

9	Balai POM di Surakarta	**1 April s.d. 12 Juli 2024**	96.43	97.02	96.03	98.07	96.13	96.43	98.36	95.39	91.96	96.20	A (Sangat Baik)	112	Online	1. U3 (Waktu Penyelesaian) 2. U8 (Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan) 3. U9 (Sarana dan Prasarana)	1. U3 (Waktu Penyelesaian): Mengoptimalkan pelayanan secara daring termasuk layanan melalui whatsapp aktif 24 jam (chatbot). 2. U8 (Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan): Publikasi layanan pengaduan melalui berbagai kanal yang tersedia termasuk aplikasi LAPOR! sehingga lebih dimanfaatkan oleh masyarakat. 3. U9 (Sarana dan Prasarana): a) Menyediakan sarpras tambahan di ULPK Balai POM di Surakarta di antaranya: WiFi bagi konsumen, penambahan meja dan kursi layanan, APAR, media hiburan dan konsumsi (air minum dan permen) bagi konsumen di	100%

No.	UPP	Periode Pelaksanaan	Indeks 2024 (per Unsur)									Indeks 2024	Kategori	Jumlah Responden	Metode Survei	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut Periode Sebelumnya
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
																	area tunggu; b) Mengoptimalkan layanan tatap muka di loket MPP (Surakarta, Sukoharjo, Sragen) yang memiliki sarana prasarana lebih mendukung.	

21. RAPK INDEKS RB

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	**Komponen Pengungkit**		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	1,76	2,67	4,43	**TMS**
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	1,49	1,00	2,49	**TMS**
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	2,78	4,25	7,03	**MS**
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	3,48	2,56	6,04	**MS**
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	2,24	6,88	9,12	**MS**
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	3,99	3,34	7,33	**MS**
TOTAL PENGUNGKIT						**36,42**	**TMS**
B.	**Komponen Hasil**		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			21,16	**MS**
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi	17,50			17,41	**MS**

okumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

-2-

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
		(SPAK)					
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	**MS**
		Pelayanan Publik yang Prima	17,50				
	II.	Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,80	**MS**
TOTAL HASIL						**37,96**	
NILAI PMPZI						**74,39**	

22. RAPK NILAI AKIP

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2024	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
9	Balai POM di Surakarta	74,39	17,76	17,28	9,48	14,80	15,07
10	Balai POM di Tangerang	75,34	17,76	17,28	8,88	14,80	16,62
11	Balai POM di Payakumbuh	74,31	17,28	17,28	8,88	14,80	16,07

23. NILAI PENGELOLAAN KEARSIPAN

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2024	Keterangan
22	Balai Besar POM di Padang	95,30	AA (Sangat Memuaskan)
23	Balai POM di Kendari	95,30	AA (Sangat Memuaskan)
24	Balai Besar POM di Semarang	95,18	AA (Sangat Memuaskan)
25	Balai Besar POM di Palangkaraya	95,10	AA (Sangat Memuaskan)
26	Balai Besar POM di Denpasar	94,82	AA (Sangat Memuaskan)
27	Balai Besar POM di Makassar	94,35	AA (Sangat Memuaskan)
28	Balai POM di Sofifi	94,32	AA (Sangat Memuaskan)
29	Balai POM di Kupang	93,70	AA (Sangat Memuaskan)
30	Balai POM di Bogor	93,66	AA (Sangat Memuaskan)
31	Balai Besar POM di Bandar Lampung	93,27	AA (Sangat Memuaskan)
32	Balai Besar POM di Samarinda	92,99	AA (Sangat Memuaskan)
33	Balai POM di Gorontalo	92,26	AA (Sangat Memuaskan)
34	Balai POM di Tarakan	92,33	AA (Sangat Memuaskan)
35	Balai POM di Kediri	91,33	AA (Sangat Memuaskan)
36	Balai Besar POM di Banjarmasin	91,89	AA (Sangat Memuaskan)
37	Balai POM di Tasikmalaya	91,32	AA (Sangat Memuaskan)
38	Balai POM di Payakumbuh	88,15	A (Memuaskan)
39	Balai POM di Jember	87,85	A (Memuaskan)
40	Balai POM di Surakarta	85,66	A (Memuaskan)

24. RAPK INDEKS PROFESIONALITAS ASN

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Balai POM di Mamuju	87,09	88,66
Balai POM di Bogor	87,42	90,16
Balai POM di Tasikmalaya	85,42	89,63
Balai POM di Surakarta	87,27	90,64

25. RAPK NILAI KINERJA ANGGARAN

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	672839	BALAI POM DI SURAKARTA	86,70	95,76	91,23

26. RAPK NILAI KUALITAS PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa - Indeks Pemanfaatan Sistem

IPS 2024

Show 10 entries Copy Data To Excel To PDF Search: surakarta

No	Satuan Kerja	Indikator Pemanfaatan Sistem					Total	Status	Aksi
		SiRUP	E-Tendering	E-Purchasing	Non E-Tendering dan Non E-Purchasing	E-Kontrak			
1	Balai POM di Surakarta	20.00	20.00	15.00	20.00	20.00	95.00	Sangat Baik	

27. RAPK NILAI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

03 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara KPI Sendiri Isi Realisasi 88 93.73 106.51%

No	Satuan Kerja	Ketepatan Waktu (25%)	Kualitas (75%)	Pelaporan yang Baik (30%)	RKBMN (10%)	PSP (20%)	Penghapusan (20%)	Pemusnahan (20%)	Total	Penilaian
1	Sekretariat Utama	25,00	70,50	28,65	10,00	19,99	20	20	98,64	sangat baik
2	BBPOM Semarang	25,00	70,75	28,73	10,00	19,98	20	20	98,71	sangat baik
3	BBPOM Yogyakarta	25,00	70,75	28,73	10,00	19,99	20	16	94,72	sangat baik
4	BPOM Surakarta	25,00	69,75	28,43	10,00	15,31	20	20	93,73	sangat baik

28. RAPK PERSENTASE REALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
34	Balai POM di Manokwari	47,14	28,43	60,06	60	65
35	Balai POM di Kota Palopo	32,05	28,80	92,20	60	92
36	Balai POM di Palu	38,90	30,23	79,84	60	80
37	Balai POM di Pangkal Pinang	4,56	37,58	71,25	60	71
38	Balai POM di Kota Payakumbuh	51,08	33,07	95,63	60	96
39	Balai POM di Sofifi	9,97	75,57	60,51	75	75
40	Balai POM di Kota Surakarta	29,45	31,78	97,80	60	98

29. CAPAIAN INDIKATOR BALAI POM DI SURAKARTA

- Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,40	120	121	99,17	101,82	101,82

- Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,40	44	46	95,65	100,26	100,26

- Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	43	43	100,00	111,11	111,11

- Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,60	17	19	89,47	91,67	91,67

- Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00	15	20	75,00	88,24	88,24

- Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,30	134	134	100,00	100,70	100,70

- Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	92,90	125	129	96,90	104,30	104,30

- Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00	157	160	98,13	103,29	103,29

- Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	37	59	62,71	104,52	104,52

- Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	239	313	76,36	107,55	107,55

- Indikator Indeks Pelayanan Publik

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Indeks Pelayanan Publik	3,55	-	-	3,88	109,30	109,30

- Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	94,00	-	-	100,00	106,38	106,38

- Indikator Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaaan Masyarakat bidang Kesehatan di provinsi/kabupaten/kota

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	-	-	104,84	110,36	110,36

- Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	96,00	-	-	96,60	100,63	100,63

- Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator	Target 2024 (mengguna kan koma dan tanpa satuan%)	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	8,00	-	-	8,00	100,00	100,00

- Indikator Jumlah desa pangan aman

Indikator	Target 2024 (mengguna kan koma dan tanpa satuan%)	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Jumlah desa pangan aman	1,00	-	-	1,00	100,00	100,00

- Indikator Jumlah Pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator	Target 2024 (mengguna kan koma dan tanpa satuan%)	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	-	-	1,00	100,00	100,00

- Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator	Target 2024 (mengguna kan koma dan tanpa satuan%)	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	164	164	50,00	100,00	100,00

- Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	85	85	50,00	100,00	100,00

- Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00	-	-	88,00	112,82	112,82

- Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan standar GLP

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40,00	-	-	49,43	100,00	123,58

- Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta yang optimal

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surakarta yang optimal	3,00	-	-	3,00	100,00	100,00

- Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness indeks) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72,56	-	-	82,77	114,07	114,07

- Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,40	-	-	97,34	107,68	107,68

- Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74,41	-	-	80,58	108,29	108,29

- Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Surakarta

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Surakarta	95,75	-	-	96,20	100,47	100,47

- Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Surakarta

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Indeks RB BBPOM di Surakarta	75,00	-	-	74,39	99,19	99,19

- Indikator Nilai AKIP Balai POM di Surakarta

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Nilai AKIP BBPOM di Surakarta	78,66	-	-	74,39	94,57	94,57

- Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Nilai Pengelolaan Kearsipan	76,64			85,66	111,77	111,77

- Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta

Indikator	Target 2024 (*mengguna kan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surakarta	90,64	-	-	87,27	96,28	96,28

- Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta

Indikator	Target 2024 (*menggunak an koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surakarta	90,51	-	-	91,23	100,80	100,80

- Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Indikator	Target 2024 (*menggunakan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80,00	-	-	95,00	118,75	118,75

- Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Indikator	Target 2024 (*menggunakan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	88,00	-	-	93,73	106,51	106,51

- Indikator Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Indikator	Target 2024 (*menggunakan koma dan tanpa satuan%)*	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri	60,00	-	-	97,80	163,00	163,00